

B u l e t i n

S O M B A O P U

V O L . 2 5 N O . 2 9 T A H U N 2 0 2 2



B u l e t i n

S O M B A O P U



Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Sulawesi Selatan

B u l e t i n
SOMBAOPU
VOL. 25 No. 29 TAHUN 2022

Buletin Somba Opu oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan dengan Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Buletin ini diharapkan dapat menjadi media kajian ilmiah, deskripsi dan survey mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. Tulisan pada buletin ini tidak terbatas mengenai arkeologi, namun juga disiplin ilmu lainnya seperti Sejarah, Arkeologi, Antropologi, Kesenian, Arsitektur, dan bidang lain yang berkaitan.

Redaksi menerima kiriman naskah dari para ahli atau penulis manapun yang berminat pada masalah pelestarian Cagar Budaya dan bidang ilmu yang menjadi cakupan penerbitan buletin ini. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris; panjang naskah 10 - 20 halaman A4 (termasuk daftar acuan), font arial, spasi 1.5, karangan harus asli (bukan jiplakan), boleh terjemahan, saduran asalkan disebutkan sumbernya dengan jelas.

Redaksi berhak menyunting karangan tanpa mengubah atau menyimpang dari isi tulisan. Jika terdapat tulisan yang dimuat dalam Buletin Somba Opu berisi tentang suatu kritik atau perbedaan pendapat, hal ini bukanlah pendapat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh tulisan yang telah dimuat oleh Buletin Somba Opu adalah pendapat pribadi dari penulis.

PENULIS

Laode Muhammad Aksa

Supriadi

Iswadi

Abdullah, Yadi Mulyadi, Andi Jusdi, Amirullah, Muhammad Akil

Andini Perdana

Dewi Susanti

Anggi Purnamasar

Linda Siagian

Fatriani Fara

Cresentia Zita Octaviani

Akhmad Idris

Alamat Redaksi :

Jalan Ujungpandang No 1
Kompleks Benteng Ujungpandang
Makassar, Sulawesi Selatan, 90111
Email: bpcbmakassar@yahoo.com
Website: bpcbsulsel.id

PENULIS

Laode Muhammad Aksa

Supriadi

Iswadi

Abdullah, Yadi Mulyadi, Andi Jusdi, Amirullah, Muhammad Akil

Andini Perdana

Dewi Susanti

Anggi Purnamasari

Linda Siagian

Fatriani Fara

Cresentia Zita Octaviani

Akhmad Idris

ISBN : 1411-2930

Redaktur :

Laode Muhammad Aksa

Penyunting :

Andriany

Desain sampul dan Tata letak

Anzhar

Penerbit :

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan

Redaksi :

Jalan Ujungpandang No 1
Kompleks Benteng Ujungpandang
Makassar, Sulawesi Selatan, 90111
Email: bpcbmakassar@yahoo.com
Website: bpcbsulsel.id

Cetakan Pertama, September 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa
ijin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Kantinu Lohia: Sebuah Referensi Menggali masa Lalu – Kini – Esok Laode Muhammad Aksa	1
Sistem Perbentengan Kesultanan Buton Dan Konsep Pelestariannya Supriadi	11
Barata sebagai Sistem Pertahanan Kesultanan Buton (Sebaran dan Karakteristik Benteng Nusantara di Buton Utara) Iswadi	21
Kota Lama Bantaeng sebagai Kawasan Cagar Budaya Abdullah, Yadi Mulyadi, Andi Jusdi, Amirullah, Muhammad Akil	31
Penghargaan Keterbukaan Informasi Dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan Andini Perdana	45
Perilaku Pengunjung Pada Kompleks Makam Raja-raja Lamuru Kabupaten Bone, Prov. Sulawesi Selatan Dewi Susanti	55
Olang Mesa dan Landschapesziekenhuis at Madjene sebagai Koleksi Museum Anggi Purnamasari	65
Pemanfaatan Website dan Museum Virtual Bagi Museum Linda Siagian	75
Suku Kajang Sebagai Tujuan Wisata Budaya Di Sulawesi Selatan Fatriani Fara	81
Pameran Cagar Budaya Bertajuk “Kereta Api Riwayatmu Dulu” Cresentia Zita Octaviani	91
Kampung Budaya di Jawa Timur: Permainan, Bangunan, dan Kesenian Akhmad Idris	101

Salam Redaksi

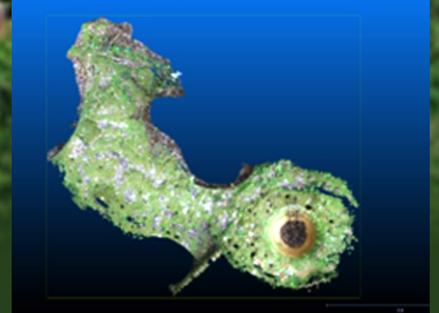
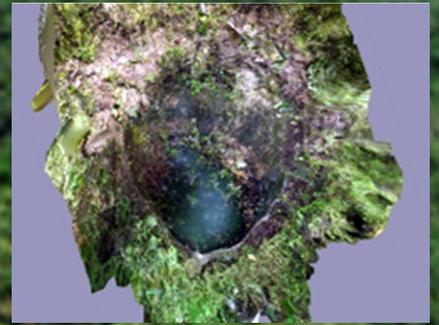
Sejak tahun 1997, Buletin Somba Opu terus berusaha mengembangkan diri dalam menyampaikan informasi terkait Pelestarian Cagar Budaya. Pelestarian Cagar Budaya masa kini banyak berkembang, menggunakan disiplin ilmu yang beragam. Demikian pula dengan tulisan-tulisan dalam Buletin Somba Opu menjadi sangat berkembang dengan menggunakan perspektif berbagai jenis disiplin ilmu yang saling berkaitan. Mencari benang merah dalam Pelestarian Cagar Budaya yang kemudian disampaikan untuk para pembaca Buletin Somba Opu.

Tidak lah mudah memenuhi harapan pembaca Buletin Somba Opu dalam menghadirkan bacaan-bacaan yang menyegarkan dalam bidang Pelestarian Cagar Budaya. Gagasan kreatif dan semangat dalam membagi ilmu Pelestarian sangat dibutuhkan dalam media yang sederhana ini.

Semoga Buletin Somba Opu edisi kali ini dapat menghanyutkan pembaca betapa pentingnya Pelestarian Cagar Budaya karena Pelestarian Cagar Budaya harus dilakukan bersama.

Selamat membaca!





Kantinu Lohia: Sebuah Referensi Menggali masa Lalu – Kini – Esok

Laode Muhammad Aksa

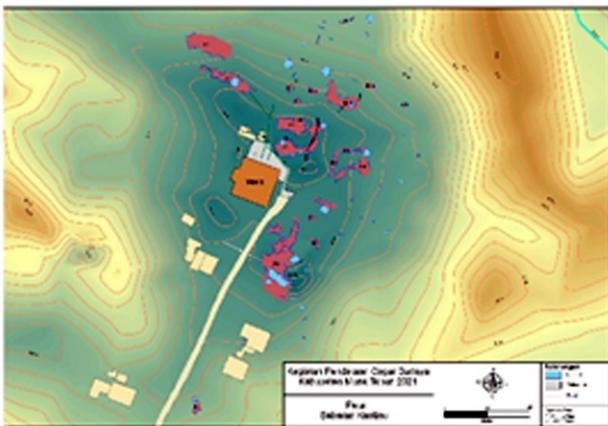
1. Pendahuluan

Bentang alam karst di Kawasan Lohia, Pulau Muna, meskipun menunjukkan kekurangan atau keberadaan air yang langka di permukaan, menjadi tuan rumah berbagai karya penyimpanan air kuno yang direalisasikan untuk dikumpulkan dan menyimpan sumber daya air, untuk kebutuhan pemukiman lokal dan untuk tujuan minum, mandi, cuci, dan juga pertanian. Penduduk Lohia kuno dipaksa untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang wilayah tersebut untuk mengeksploitasi sedikit sumber daya air yang tersedia, dan mengembangkan beberapa teknik untuk tujuan ini, hingga mencapai tingkat kemampuan yang tinggi untuk mengumpulkan, mengangkut, dan mendistribusikan air, bahkan pada jarak yang jauh. Banyak wilayah di kawasan karst Lohia saat itu masih menghadirkan karya tangki penyimpanan air yang luar biasa di karst.



Selama ribuan tahun, air yang sama telah didaur ulang, mengikuti pola alami penguapan dari bumi dan laut, pembentukan awan, dan presipitasi. Sistem ekonomis ini menyediakan lebih dari cukup air untuk semua orang di bumi. Kalau begitu, mengapa ada masalah air yang luar biasa mengganggu umat manusia? Solusi apa yang mungkin? Sebagai jawaban, mari kita lihat situasi air di Pulau Muna masa kuno. Pada musim hujan yang normal berlangsung dari tiga sampai empat bulan, tetapi bukannya turun terus-menerus selama seluruh periode, sebagian besar hujan turun dalam waktu

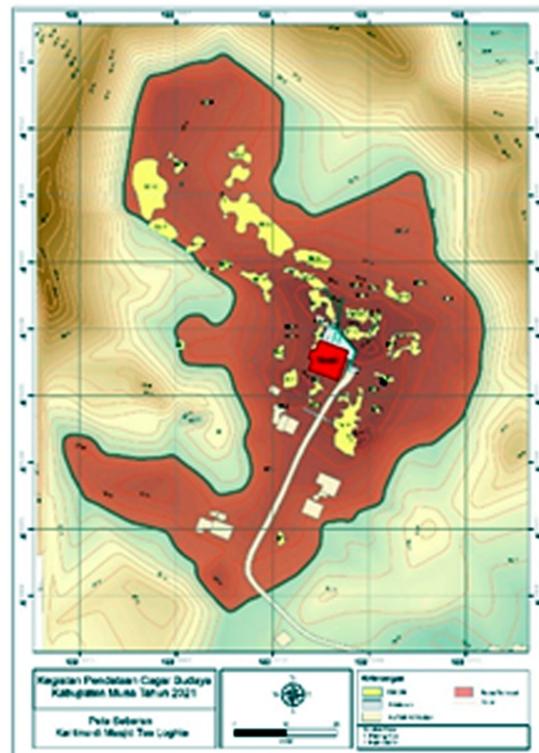
singkat dalam bentuk hujan deras. Akibatnya, muncul genangan air, sungai meluap dan ke bawah laut. Selain itu arus deras menyapu lapisan tanah atas, menggunduli tanah. Lumpur menumpuk di danau dan kolam, membuatnya dangkal, sehingga menampung lebih sedikit air. Untuk semua tujuan praktis, sebagian besar air hujan yang berharga hilang. Kemudian musim penghujan berakhir.



Pada zaman kuno, orang-orang di seluruh pelosok bumi belajar bahwa yang terbaik adalah tidak hanya bergantung pada sungai dan danau, yang akan mengering ketika musim hujan berakhir. Mereka mengembangkan seni menangkap hujan di tempat jatuhnya, menggunakannya untuk kebutuhan mendesak, dan menyimpannya ketika hujan berhenti turun. Ini adalah panen air hujan dengan sistem tangkapan air kuno. Tetapi metode ini tidak digunakan lagi ketika orang bisa mendapatkan air dari keran di rumah atau dipedesaan.

Di hampir semua tempat pemukiman bersejarah yang dipelajari dari berbagai referensi, tempat dan air dalam definisi yang paling umum, baik simbolis maupun praktis, tampak terjalin dan saling ketergantungan. Ada banyak referensi mengenai metode konstruksi, bentuk, dan penggunaan struktur pengelolaan air di permukiman bersejarah. Namun, sedikit penelitian telah dilakukan untuk membandingkan temuan struktur air satu sama

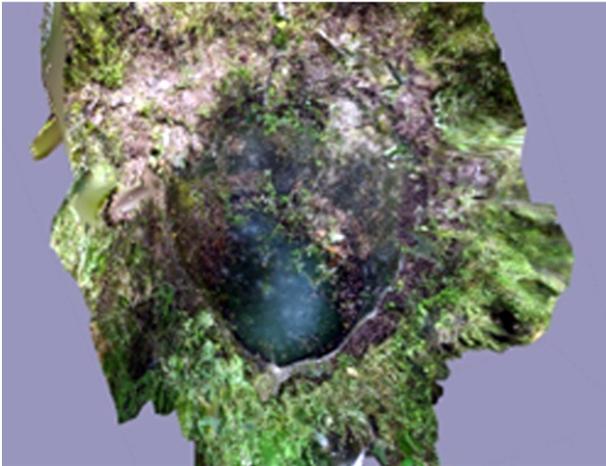
lain. Dalam tulisan ini, kategorisasi bangunan pengelolaan air yang ada signifikan di permukiman bersejarah berdasarkan fungsi dan peran utama mereka dalam proses eksploitasi air.



Bentang alam karst atau wilayah batu gamping dicirikan oleh kekurangan atau kelangkaan air di permukaan. Oleh karena itu, kondisi kehidupan manusia di banyak kawasan batu gamping tidak terlalu baik harus menghadapi masalah ketersediaan air, dan perlu pengetahuan yang mendalam tentang wilayah tempat mereka menetap pada masa lampau. Di masyarakat kuno beberapa teknik dikembangkan untuk mendapatkan air, hingga mencapai tingkat kemampuan yang tinggi untuk mengumpulkan, mengangkut, dan mendistribusikan air, bahkan pada jarak yang jauh.

Tulisan ini merupakan ikhtisar dari karya-karya kuno utama yang dirancang dan dibangun oleh manusia untuk memanfaatkan sumber daya air di batu gamping. Penulis mencoba menjelaskan beberapa contoh tangki tempat penyimpanan

air permukaan bersumber dari air hujan. Bersama ini bahwa karakter dan desain khusus yang digunakan untuk penyimpanan air di daerah batu gamping. Pelajaran dari kemampuan masyarakat kuno di Lohia, Kabupaten Muna untuk menggunakan sumber daya air secara berkelanjutan layak untuk dievaluasi kembali saat ini, di saat kita secara berkala menghadapi krisis air dan kekeringan.



Alasan utama untuk hal tersebut di atas adalah masa air tahunan yang pada musim penghujan dengan curah hujan yang berlebihan menyebabkan banjir, yang seringkali berlangsung lama. Segera setelah banjir berakhir, periode kering yang panjang dimulai. Fakta tersebut memaksa manusia untuk membangun penampung air di batu gamping dengan cara menggali batu gamping menghasilkan lubang yang dalam, dan memungkinkan air disimpan di dalam lubang tersebut. Demikian diciptakan, yang memungkinkan sejumlah besar air hujan dengan cara ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan menghadapi wilayah krisis air. Salah satu point penting berdamai dengan alam adalah air hujan yang sebelumnya mengalir ke jalan raya, sungai terus ke laut dan kemudian hilang lebih baik dialirkan ke tangki Kantinu berbagai berkapasitas 5000–10.000 liter.

2. Inovasi leluhur dan Bangkitnya Peradaban Lohia Kuno

Air hujan yang dikumpulkan dalam tanah dan batu di permukaan kedap air dan biasanya disimpan di *reservoir* buatan, yang dikenal sebagai tangki air. Air ini digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti mandi atau mencuci, irigasi atau keperluan pemukiman pedesaan dan perkotaan lainnya. Pengumpulan dan pemanfaatan air hujan sudah dikenal sejak zaman Minoa (Cadogan, 2006).

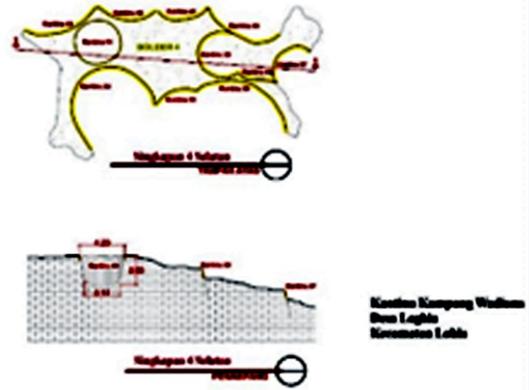


Contoh sistem penggunaan air hujan di beberapa negara wilayah kering dan semi-kering. Sisa-sisa tangki air hujan, yang berasal dari 4000 hingga 5000 tahun lalu, ditemukan di Yunani kuno. Beberapa dipasang dengan baik dan dioperasikan selama berabad-abad. Sebagian besar dari mereka digunakan untuk mengumpulkan air hujan dan berfungsi sebagai sumber utama pasokan air. Namun, dalam beberapa kasus mereka digunakan untuk tujuan lain, yaitu pengaturan musiman air yang dibawa oleh sistem pengangkutan besar. Di Yunani penadah dan penggunaan air hujan telah dipraktekkan sejak zaman Minoa, ca. 3300-1200 SM (Viollet, 2003; Angelakis dan Koutsoyiannis, 2003). Teknologi yang paling awal dikenal seperti itu mengacu pada zaman Minoa awal 3300-2200 SM.

Masyarakat kuno di Pulau Muna juga sudah menerapkan solusi efektif untuk mengatasi masa krisis air. Setiap daerah memanfaatkan

teknik penadah dan penyimpanan air tradisionalnya sendiri, dengan menadah setiap tetes air hujan. Penadahan air hujan telah dipraktikkan sejak dahulu kala. Situasi air bagi masyarakat kuno sedikit rumit tetapi mereka pada masa lalu tidak mengalami krisis air, hal ini solusi yang diperlukan untuk menadah dan mengisi tempat penyimpanan air. Orang Muna pada masa kuno berusaha memiliki cukup air untuk kebutuhan sehari-hari. Jika ada kelangkaan air yang mengancam, itu karena salah urus sumber daya yang menyelamatkan kehidupan. Mereka pada masanya lebih fokus untuk menghemat di tempat konsumsi dari pada mengangkut dari titik pusat untuk konsumsi.

Muna kuno memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa, misalnya 'Kantinu' (tangki penyimpanan air) di Kodiri-Lohia sekarang ini banyak terdapat struktur penyimpanan air yang cerdas dengan tangkapan air buatan. Apa pun hujan yang turun ditadah dan disimpan di lubang batu gamping yang dibentuk seperti sumur bawah tanah, kadang berdiri sendiri dan terdapat juga yang terintegrasi ataupun tangki terpadu adalah tangki yang meluap ke serangkaian tangki yang lebih rendah untuk menampung air hujan yang dialirkan melalui kontur tanah. Akal sehat yang sederhana tersebut membuat mereka aman dari kekurangan air. Tiga ratus lebih kantinu dengan deliniasi situs Kantinu sekitar empat hektar lahan menyimpan jutaan liter air pada setiap curah hujan. Bahkan di tempat seperti Desa Lohia, Desa Kondongia, dan Desa Mabolu yang memiliki kondisi permukaan lapisan tanah yang tipis di wilayah batu gamping yang kering. Pulau Muna sendiri telah berkembang meskipun hanya menerima musim hujan yang pendek dalam setahun. Berkat menadah setiap tetes air hujan mereka bisa bertahan hidup secara berkelanjutan.



Awal masa bercocok tanam atau budaya tani membawa inovasi dalam menadah dan menyimpan air hujan dan menggunakannya untuk mengairi tanaman, kapan mulanya Kantinu dibuat, paling tidak masa sebelum ada kerajaan Muna kurang lebih selama 500 tahun terakhir telah sangat menjauhkan sebagian besar dari kita dari jenis panen air. Tapi siapa yang pertama kali membuat konsep atau menemukan pemanenan air hujan dan kapan?

Di beberapa tempat pemukiman kuno di Pulau Muna telah mengembangkan sistem penyimpanan air dalam batu gamping yang unik, berdasarkan penangkapan, konservasi, dan konsumsi hujan di tingkat masyarakat kuno yang memiliki Kantinu, dengan tetesan hujan dan struktur penadah air yang benar-benar dibangun sebagai tangki penyimpanan air di kawasan batu gamping. Kantinu ini berbentuk silinder dengan berbagai ukuran diameter bibir permukaan dan juga berbagai ukuran kedalaman lubangnya. Bentuk silinder menyerupai sumur cuman semakin dalam semakin kecil ukurannya untuk menghargai anugerah hujannya.

Sistem ini memiliki elemen unik dari penadahan air hujan lokal, keragaman ilmiah dan pengelolaan air berbasis masyarakat. Bagaimana menadah dan menampung air hujan digunakan di zaman kuno. Air hujan biasanya dikumpulkan dari singkapan

permukaan batu gamping yang dilubangi serta di bagian keliling singkapan permukaan batu gamping yang lebih rendah banyak lubang tempat air yang menyertanya, hal ini adalah pemikiran teknis pengumpulan air yang diarahkan ke lubang-lubang yang lebih kecil dan dapat berfungsi sebagai reservoir ataupun tandon air perlokasi untuk menjaring dan mengumpul air dari embun dan hujan.

Penyimpanan air telah dikelola di Muna sejak zaman kuno, dengan nenek moyang Orang Muna menyempurnakan seni pengelolaan air. Banyak struktur tangki penyimpanan air dan sistem penadah air khusus di wilayah pemukiman dengan permukaan lahan batu gamping dan budaya ini telah dikembangkan. Masyarakat kuno Muna memanen air hujan secara langsung dan mereka juga mengumpulkan air dan menyimpannya di tangki yang dibangun di sekitar halaman pemukiman mereka. Sebagai lahan terbuka masyarakat, mereka mengumpulkan air hujan dan menyimpannya di sumur buatan tersebut.

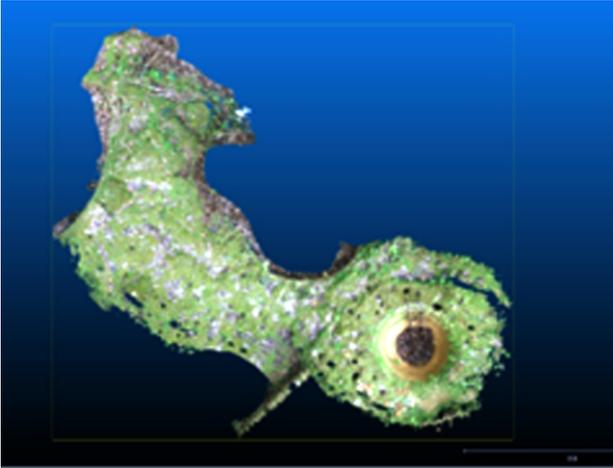
3. Kesaksian Sejarah Lohia

Pemukiman yang ditinggalkan, pada periode pemukiman kuno di Lohia menyimak dari beberapa informan dan ceritera rakyat yang berkembang, akan berbeda bila terdapat naskah kuno tentang masyarakat pra kerajaan Wuna. Banyak informasi yang membutuhkan pembuktian dan kepastian jika kita menelusuri menggunakan mesin pencarian google, menjadi hal yang biasa tulisan tanpa referensi yang dapat memperkuat argumen. Akan tetapi masa sekolah dasar penulis di Raha dengan bacaan buku kertas stensilan tahun 70an menguraikan dan menyebutkan sejarah Kerajaan Muna dan beberapa pemimpinnya, termasuk yang menarik atau perlu kajian mendalam adalah kisah penemuan masyarakat Lohia wanita cantik yang bernama Tenri Abeng

seorang diri menggunakan wadah loyang atau baskom mengapung dan terdampar di pantai Lohia. Ketika masyarakat menyainya di pesisir pantai Lohia, Tenri Abeng mengatakan bahwa dirinya mencari sang suami yang lahir dari bambu atau Bheteno Ne Tombula. Dalam ceritera rakyat dikisahkan bahwa suatu hari seorang penduduk di Pulau Muna mencari bambu di hutan dan setelah menemukan orang tersebut lalu menebangnya, ketika memotong bambu orang tersebut mendengar suara kesakitan dari dalam bambu, sehingga pencari bambu berhenti memotong dan mencoba membelah bambu secara perlahan dan hati-hati agar suara dalam bambu tidak merasa kesakitan. Ketika berhasil membelah munculah manusia dari dalam bambu, lalu anak manusia tersebut dibawa pulang ke kampung pencari bambu tersebut, kemudian masyarakat setempat memberi nama Bheteno Ne Tombula.

Sejalan waktu, setelah dewasa anak tersebut diangkat sebagai pemimpin masyarakat dan diangkat sebagai raja pertama bernama La Eli alias Baidhuldhmani Gelar Bheteno Ne Tombula. Kisah ini menurunkan sejarah awal Kerajaan Muna dalam sejarah lokal salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Tenggara. Hal lain yang dapat dipetik dari folklore tersebut, juga menggambarkan adanya pemukiman dan struktur masyarakat di Pulau Muna pra kerajaan. Pada masa ini pendirian kekuasaan dan penguasaan wilayah sedang meningkat, sehingga struktur masyarakat membentuk namanya kerajaan untuk membuat satu sistem kekuatan dalam struktur masyarakat. Keinginan menguasai wilayah lain sehingga terjadilah perang antar suku atau kerajaan-kerajaan lokal yang lagi tren pada masanya. Ini juga menghasilkan budaya untuk melindungi pemukiman dengan mendirikan benteng dan berlanjut ke sistem mendirikan tembok untuk pertahanan kerajaan.

4. Belajar dari masa lalu



Kantinu atau tangki penyimpanan air hujan yang digali sehingga menjadi lubang melingkar di batu gamping, permukaan lubang digosok dan dipoles dengan batu halus. Lubang ini air hujan dikumpulkan umumnya memiliki kedalaman 3 meter (m) hingga 7 m. Struktur ini dibangun melalui teknologi penggalian batu gamping dan diperhalus permukaan lubang untuk menutup pori-pori batu gamping dengan menggosok sampai rata dan halus menjadikan lubang tersebut kedap air, dan dibuat secara tradisional. Biasanya lima sampai sepuluh dari setiap endapan permukaan batu gamping tempat pemukiman mereka. Namun tergantung pada ukuran endapan permukaan, jumlah Kantinu atau tangki penyimpanan air ditentukan. Dalam survei BPCB Sulawesi Selatan menyebutkan ada lebih dari 300 Kantinu yang sudah terdata di beberapa desa masuk dalam kecamatan Lohia dan kecamatan Kabawo dan lebih dari 20 Kantinu yang masih digunakan. Kantinu kuno tersebut banyak yang sudah tertimbun lumpur atau tanah dan banyak juga yang masih berisi air tapi tidak dimanfaatkan manusia karena tidak terawat kebersihannya. Kantinu adalah bentuk penadah dan sekaligus penampungan air hujan yang paling dominan di wilayah pemukiman batu

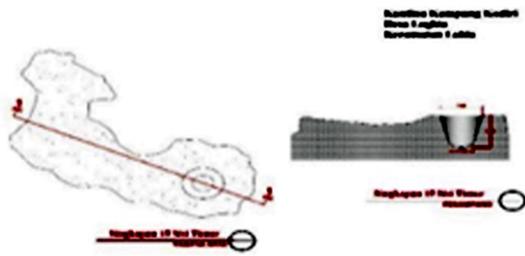
gamping Desa Lohia. Air hujan yang dipanen melalui teknik reservoir atau tandon air yang disebut dalam masyarakat Muna atau dikenal sebutan Kantinu.



Situs pemukiman kuno Lohia yang bersejarah menghadirkan banyak lubang Kantinu atau tangki penyimpanan air buatan manusia. Semua digunakan untuk mengumpulkan air, sehingga tipologi Kantinu yang berbeda bila diamati. Kantinu pada dasarnya adalah lubang galian dipermukaan batu gamping dengan membulat diameter bervariasi 2 - 6 meter dan kedalaman juga bervariasi antara 3-7 meter serta biasanya terisi oleh air hujan.

Tangki penyimpanan air tersebut mungkin merupakan reservoir pemukiman kuno atau sebuah kota kuno yang berfungsi untuk pasokan air. Air dari tandon tersebut mungkin juga untuk keperluan pertanian atau peternakan pedesaan (Hodge, 2002). Air hujan biasanya dikumpulkan dan disimpan langsung dari permukaan terbuka. Kantinu sebagai tangki penyimpanan air umumnya berbentuk silinder dan permukaan merupakan bagian bibir berbentuk lingkaran. Dalam kebanyakan kasus, tangki dilengkapi dengan tangga yang dibangun di satu sisi yang mengarah ke bawah. Dinding mereka biasanya dilapisi secara internal dengan plester kedap air. Tangki air mungkin paling berguna untuk dibagi menjadi tertutup dan terbuka, tetapi tidak mudah untuk mengategorikan berdasarkan fungsi.

Bekas tempat kehidupan masa lampau seperti situs Kantinu di Lohia, Kabupaten Muna saat ini masih menampilkan inovasi pemikiran karya masa lalu dengan nilai pengetahuan dan sejarah yang luar biasa. Lokasi ini oleh Tim Survei BPCB



wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat menyebutnya situs Kantinu atau tangki penyimpanan air menjadi karya inovasi tangki penyimpanan air kuno yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan sumber daya air. Kantinu untuk kepentingan pemukiman lokal pada masa itu dipergunakan untuk tujuan mandi, cuci, minum, dan mungkin juga untuk kebutuhan pertanian dan peternakan.

Di masyarakat Lohia pada masa lalu, teknologi penyimpanan air permukaan untuk persediaan air berkembang sangat baik dan digunakan hingga zaman modern. Inisiasi penyimpanan air di batu gamping dan evolusi selanjutnya melalui lubang-lubang penyimpanan (*reservoir*) dengan ukuran berbeda-beda di titik-titik utama resapan air dan tangki penyimpanan air permukaan di batu gamping harus dipastikan kecap air.

Pertanyaan yang masih tersimpan adalah Kantinu ada ditempat strategis, tapi dimana masyarakat penggunaanya. Pemukiman kuno Lohia berpindah sejalan dengan perkembangan budaya Muna mulai menyebar dari pesisir ke daerah daratan sekitarnya dan juga pembangunan Kota Raha sebelum kedatangan bangsa Belanda di Pulau Muna, Kota Raha sudah terbentuk dengan berpindahnya Kota Kerajaan dari Kota Wuna ke Kota Raha pada masa lalu. Hal ini beberapa informasi yang didapatkan dari ceritera rakyat bahwa adanya Kota Raha menjadikan masyarakat Lohia berpindah tempat tinggal di Raha. Kota Raha dibangun sebagian besar tenaga adalah jasa masyarakat Lohia, dan akhirnya ditinggalkan oleh penduduknya, untuk menetap di Raha.

Tulisan ini bukanlah presentasi lengkap dari semua pengetahuan tentang Kantinu sebagai tangki penyimpanan air sepanjang sejarah. Karakteristik dan dimensi Kantinu yang berbeda disajikan sebagai contoh sejarah inovasi tangki air masyarakat kuno. Bahkan sistem Kantinu mungkin memiliki arti penting bagi rekayasa air saat ini. Beberapa pelajaran yang didapat antara lain:

- a) Sepanjang sejarah, Kantinu telah menjadi bagian penting dari inovasi penyimpanan air untuk kelangsungan hidup agar mendapatkan keberlanjutan sumber daya air;
- b) Kombinasi dan keseimbangan ukuran skala yang lumayan besar dan kecil seperti tangki untuk sistem penyimpanan air yang digunakan oleh banyak peradaban kuno;
- c) Teknologi penyimpanan air kuno dari Kantinu harus dianggap bukan tidak hanya sebagai artefak sejarah, tetapi juga sebagai model potensial untuk teknologi air berkelanjutan untuk masa kini dan masa depan;
- d) Teknologi penyimpanan air kuno seperti tangki air dicirikan oleh kesederhanaan, kemudahan pengoperasian, dan tidak memerlukan kontrol yang rumit, menjadikannya lebih berkelanjutan. Namun demikian, desain dan pengoperasian yang sukses dari beberapa sistem ini merupakan pencapaian besar dalam bidang inovasi;
- e) Tangki air digunakan oleh peradaban kuno untuk keberlanjutan sumber daya air dan telah digunakan sejak saat itu, meskipun pentingnya mereka untuk keperluan pasokan air daerah batu gamping telah atau mulai menghilang di bagian dunia yang maju, meskipun terus berlanjut di beberapa negara.
- f) Orang dahulu menganggap keamanan air sebagai salah satu aspek penting dari desain dan sistem penyimpanan air mereka. Keamanan air juga menjadi perhatian masyarakat kuno pada saat itu dan pasokan

air telah menjadi penting sepanjang sejarah dan harus terus berlanjut di masa depan.

Seiring dengan berlanjutnya abad ke-21, peningkatan sumber daya air tawar akan dibutuhkan di banyak lokasi untuk memenuhi peningkatan kebutuhan populasi dan ketidakpastian serta konsekuensi dari perubahan iklim.

Perubahan demografis adalah tantangan paling signifikan bagi air kita saat ini dan tantangan masa depan. Apa yang dapat kita pelajari dari zaman dahulu, dengan menggunakan pengetahuan tradisional, dapat menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan air kita, terutama untuk bagian-bagian dunia yang sedang berkembang.

Tentu saja tulisan ini bukanlah presentasi lengkap tentang apa yang diketahui saat ini tentang tangki penyimpanan air atau penggunaan teknologi terkait yang ada di beberapa situs di Italia, Romawi, dan lain sebagainya, tetapi juga ternyata ada di Indonesia yang terletak di Lohia, Kondogia, Mabolu, dan Kota Wuna Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, contoh teknologi tangki air dan praktik manajemen air yang diberikan dalam tulisan ini mungkin memiliki beberapa kepentingan untuk meningkatkan sistem rekayasa penyimpanan air saat ini, seperti yang akan dibahas kemudian dalam tulisan ini.

Kekurangan air pada pemukiman kuno mengharuskan penggunaan berbagai metode pengumpulan dan tangki penyimpanan penadah air hujan di daerah pemukiman dengan permukaan lanskap batu gamping di Lohia berasal dari masa awal pemukiman sebelum terbentuknya kerajaan Muna (diperkirakan abad ke-14). Sejak itu, beberapa jenis dan bentuk tangki telah berevolusi dan berkembang secara signifikan tampaknya telah terjadi di seluruh pemukiman kuno wilayah krisis air. Selain itu, kemajuan teknologi ini sudah digunakan dari masa periode Romawi, Bizantium, Venesia, dan Ottoman dalam

konteks ini, beberapa contoh yang berkaitan dengan karakteristik tangki Helenistik menyampaikan ilustrasi perkembangan teknologi selama periode sejarah tersebut.

Hal tersebut di atas menunjukkan adanya jumlah Kantinu/ tangki penyimpanan air merupakan representasi atau mewakili dari jumlah penduduk dengan status air yang memadai di permukaan lanskap pemukiman daerah batu gamping. Ini juga merupakan energi yang tersedia untuk menguapkan air, dan angin yang tersedia untuk mengangkut uap air dari tanah ke atmosfer yang lebih rendah.

5. Kesimpulan

Uraian singkat tentang beberapa karya dan struktur situs penyimpanan air kuno seperti di Situs Kantinu Lohia Kabupaten Muna yang disajikan dalam kontribusi ini menunjukkan pentingnya menjaga ingatan akan inovasi tersebut. Karya ini tidak hanya mewakili bukti luar biasa dari ide membuat tangki penyimpanan air wilayah karst Lohia, tetapi beberapa karya Kantinu masih difungsikan masyarakat masa kini, dan dapat digunakan untuk menghadapi kekeringan dan krisis air secara berkala terjadi di daerah-daerah tersebut.

Lebih jauh, mereka mewakili pelajaran yang bisa dipetik untuk penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Perlindungan karst harus menjadi prioritas, untuk menghindari hilangnya ekosistem alam yang tidak dapat dipulihkan dan berharga, dengan perhatian khusus pada spesies kehidupan dan air yang terkandung di dalamnya. Perlu juga dicatat bahwa pentingnya pengelolaan dalam penyediaan air minum di wilayah batu gamping.

Sampai pertengahan tahun 1970an, rumah-rumah di Kabupaten Muna yang berada di wilayah lapisan soil sangat tipis di permukaan batu gamping di daerah pedesaan memiliki tangki air permukaan tanah yang terbuat dari

semen. Namun, daerah dengan kelangkaan air, pasokan air didukung oleh tangki air tadah hujan dari atap mengalir bagian curah hujan dihubungkan ke tangki terbuat beton di atas permukaan tanah. Seperti misalnya di masyarakat desa Kecamatan Lohia air hujan sebagian besar masih banyak terbuang melalui sistem drainase dan mengalir di jalan-jalan dan langsung mengalir ke permukaan atau air tanah. Saat ini, tidak ada informasi yang tercatat tentang jumlah rumah yang memiliki fasilitas penampung air hujan untuk minum atau untuk keperluan tambahan seperti menyiram dan mencuci.

Air hujan bersifat terbarukan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu pengelolaan tadah air hujan telah dikembangkan dan diekspresikan dengan teknologi yang canggih tidak hanya bak penampung air hujan, umum atau tidak, tetapi juga permukaan limpasan dan konstruksi pengumpul juga. Dalam hal apapun dan periode apapun, orang telah mengumpulkan air hujan langsung dari atap dan menyimpannya di gentong tanah liat sampai tangki air dari beton dengan berbagai ukuran, kapasitas, dan jenis.

Terakhir, studi arkeologi dan sejarah tentang teknologi penadah, pengumpulan, dan penyimpanan air hujan memberikan wawasan tentang kemungkinan tanggapan masyarakat modern terhadap pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di masa depan. Di dunia masa depan yang sangat urban, sistem penampungan air hujan dan penggunaan kembali air harus sangat penting. Sistem ini dapat berkontribusi pada (a) peningkatan konservasi air, ketersediaan dan efisiensi penggunaan dan (b) pengurangan risiko banjir.

Kapan, jika tidak sekarang. Jika kita belajar menghargai alam, kita bisa hidup dengannya. Rasionalitas ekologi dari sistem Kantinu Muna kuno ini harus dipahami dan dipadukan dengan tantangan masa kini. Krisis terbesar adalah Perubahan Iklim. Ini akan membawa lebih banyak hujan dengan banyak banjir di kota-kota.

Satu-satunya cara untuk mengelola air hujan adalah dengan meningkatkan potensi penampungan air hujan di Kantinu atau tangki penyimpanan air. Membangun ini, cukup sederhana. Untuk itu diperlukan perencanaan pembuatan lubang melingkar membentuk silinder dan penampungan yang harus dijaga kebersihannya. Itu juga membuat kita sadar akan lingkungan lokal kita. Dan itu membutuhkan partisipasi masyarakat, dari kita masing-masing. Kondisi iklim zaman sekarang sangat rentan terhadap kekeringan dan banjir, sehingga membangun ketahanan sangat penting. Rekayasa cerdas ditambah dengan layanan yang masuk akal kepada alam akan menjadi penting.

Yang kita butuhkan adalah bekerja sama untuk memperbaiki ratusan Kantinu dan mengisi kembali sebagai cadangan air dari air hujan. Air di Kantinu merupakan cadangan penting selama kekeringan. Kita harus mengisi ulang ini dengan mengurangi pemompaan ke tingkat yang sesuai dengan pengisian ulang dan secara aktif mengisi ulang tangki air yang telah di habiskan. Strategi penting lainnya untuk menjaga air minum adalah melindungi sumber air kita karena hutan yang sehat membantu membersihkan air dan mengurangi kebakaran hutan.

Sekarang para pemerhati lingkungan dan otoritas wilayah terkait merasa perlu untuk mempromosikan keterlibatan pribadi dalam konservasi air. Penampungan air hujan harus didorong di rumah, pabrik, kantor, sekolah, dan di mana pun penyimpanan air dalam skala kecil itu praktis. Mengapa, banyak kota dan negara telah mewajibkan bangunan baru untuk memiliki fasilitas tangki air hujan.

Jutaan galon air hujan jatuh di daerah yang tidak disalurkan ke tempat penyimpanan tetapi hanya menguap atau mengalir ke laut. Namun, dalam penampungan air hujan yang didasarkan pada konsep menangkap air di mana ia jatuh, air disimpan secara individu. Dan tidak seperti air dari bendungan dan kanal, dan PDAM yang

harus dibayar dan dengan demikian menjadi beban mahal bagi orang miskin, air ini gratis. Ingat, air yang tersedia terbatas; tidak akan ada cerukan jika tidak ada air.

Menghidupkan kembali metode kuno menadah air hujan sederhana dan murah. Penggunaan Kantinu berfungsi kelebihan air hujan dapat dikumpulkan ke dalam Kantinu dan diarahkan ke Kantinu yang berteras untuk mengisi kembali Kantinu. Solusi ini memulihkan keseimbangan siklus air, sehingga di padang belantara air akan

menyembur, dan mengalir deras di dataran batu gamping, tanah yang gersang akan menjadi seperti kolam alang-alang, dan tanah yang haus akan menjadi mata air”. Benar-benar panen air hujan yang menyegarkan. Kita harus membangun kembali hubungan kita dengan air sekarang. Kita dapat melakukan ini dengan menghormati kebijakan Kantinu atau tangki penampung air hujan dari Muna masa Lalu – Kini – Esok.

Daftar Pustaka

1. Abdel Khaleq, R.A., and Alhaj Ahmed, I. (2007). *Rainwater harvesting in ancient civilizations in Jordan, Water Science and Technology*.
2. Aitken humanities. (2021). *Water in Ancient Greece*. Retrieved from <https://aitkenhumanities.files.wordpress.com/2015/11/water-in-ancient-greece.pdf>
3. Angelakis, A. N. and Spyridakis, S. V. (1996). *The status of water resources in Minoan times: A preliminary study, In: A. N.*
4. Angelakis, A.S. Issar (Eds.), *Diachronic Climatic Impacts on Water Resources with Emphasis on Mediterranean Region, Springer-Verlag, Heidelberg, Germany, pp. 161-191 (Ch. 8)*.
5. Angelakis, A., Koutsoyiannis, D., & Tchobanoglous, G. (2005). *Urban wastewater and stormwater technologies in ancient Greece*. Researchgate.
6. Cadogan, G. (2006). *Water management in Minoan Crete, Greece: The two cisterns of one Middle Bronze Age settlement. Water Science and Technology (this issue)*.
7. Crouch D.P. (1993). *Water Management in Ancient Greek Cities*. Oxford University Press, New York, USA.
8. Evans H.B. (1994). *Water Distribution in Ancient Rome: The Evidence of Frontius*. University of Michigan Press, Ann Arbor, USA.
9. Fonder, N., and Xanthoulis, S. (2007). *Roman Aqueducts and Hydraulic Engineering: Case of Nimes Aqueduct and its Pont du Gard Bridge. Water Science and Technology (this issue)*.
10. Hassan, F. A. (2003). *Water management and early civilizations: From cooperation to conflict*. In F.A. Hassan, M. Reuss, J. Trottier,
11. Koutsoyiannis, D., Mamassis, N., and Tegos, A. (2007b). *Logical and illogical exegeses of hydrometeorological phenomena in ancient Greece. Water Science and Technology (this issue)*.
12. Koutsoyiannis, D., & Patrikiou, A. (2014). *Water Control in Ancient Greek Cities*. Researchgate.
13. Showleh, T. (2007). *Water Management in Bronze Age. Greece and Anatolia. Water Science and Technology*.
14. Tassios, T. P. (2007). *Water supply of ancient Greek cities. Water Science and Technology*.



Sistem Perbentengan Kesultanan Buton Dan Konsep Pelestariannya

Supriadi

Universitas Hasanuddin

adisupriadi.as60@gmail.com

A. Pendahuluan

Mendengar kata benteng, pikiran kita akan selalu tertuju pada sebuah kondisi yang mengalami kekacauan, pertentangan antara berbagai pihak, atau kondisi dimana ada pihak penyerang dan pihak yang diserang. Mengantisipasi penyerangan, maka pihak yang diserang akan melakukan upaya pertahanan dengan cara membangun sarana pertahanan berupa dinding tembok yang menutupi tempat kedudukan. Dinding tembok yang menutupi sebuah area tersebut yang berfungsi untuk melindungi diri yang kemudian kita kenal dengan nama benteng. Benteng hadir sebagai sarana utama perlindungan yang berperan mencegah musuh melakukan penetrasi kedalam jantung pertahanan. Benteng merupakan dinding yang membatasi antara pihak penyerang dengan pihak yang diserang (Hooq, 1981:9).

Pikiran dan anggapan bahwa benteng tersebut hadir sebagai sarana utama pertahanan diri

tentu tidak keliru. Bila kita merujuk pendapat para ahli, secara umum benteng diterjemahkan sebagai alat utama untuk mencegah musuh melakukan penetrasi jantung pertahanan. Kamps, dkk (1999) misalnya menyebut benteng merupakan bangunan yang berdiri sendiri, tertutup, dan dapat dipertahankan pada semua sisi. Jansen (2016) menyatakan bahwa pendirian benteng merupakan upaya kolaboratif untuk melindungi baik harta maupun jiwa komunitas yang mendirikan benteng. Muth, dkk (2016), menyebutkan benteng merupakan konstruksi yang dibangun untuk pertahanan dan melindungi suatu daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga dinyatakan bahwa benteng merupakan tempat berlindung atau bertahan (dari serangan musuh); dinding (tembok) untuk menahan serangan; sesuatu yang dipakai untuk memperkuat atau mempertahankan kedudukan dan sebagainya.

Pada sisi yang lain, perkembangan kajian tentang benteng nampaknya mengalami perluasan makna dan tidak terbatas hanya pada aspek pertahanan semata. Bullbeck (1998) menyebutkan bahwa kehadiran makam-makam raja pada tengah-tengah benteng menunjukkan bahwa benteng merupakan pusat kekuatan spiritual. Penelitian Novida Abbas (2001) dan Syahrudin Mansyur (2014) menyimpulkan bahwa tujuan utama pendirian benteng-benteng kolonial di wilayah Indonesia lebih pada motif ekonomi. Silke Müth, Eric Laufer Christiane Brasse, dan Mitwirkung von Mike Schnelle (2016), menyebut bahwa benteng pertahanan yang kokoh seringkali ingin mengkomunikasikan kepada pihak luar tentang sebuah kota yang megah, representasi kekuasaan, dan legitimasi. Simon Halama (2018) berkesimpulan bahwa pemberian nama-nama dewa untuk pintu gerbang benteng bertujuan sebagai pengingat ideologi kepada masyarakat. Pemahaman ideologi yang kuat oleh masyarakat secara otomatis akan meningkatkan legitimasi raja sebagaimana konsep dewa raja.

Merujuk pada defenisi-defenisi diatas, kehadiran benteng tidak bisa lagi dilihat lagi sebagai sebuah bangunan tunggal yang terlepas dari unsur kelengkapannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Secara fungsi, benteng juga tidak bisa hanya dilihat sebagai sarana pertahanan semata. Walaupun pembangunan benteng pada dasarnya bertujuan sebagai sarana utama pertahanan, namun ada berbagai aspek yang terkait dengan kehadiran benteng. Baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun ideologi ketika benteng tersebut dibangun (Supriadi, Nasution, dan Wayudi, 2021: 836).

Perluasan fungsi dan makna, termasuk keterkaitan benteng dengan unsur

pelengkapannya tentu berimplikasi dengan konsep pelestarian benteng kemudian. Pelestarian benteng tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yang berkaitan dengan pertahanan semata tetapi termasuk unsur-unsur yang secara fungsional tidak berkaitan dengan fungsi pertahanan.

Hal ini sejalan dengan pemikiran arkeologi pasca prosesual yang menyatakan bahwa, budaya materi merepresentasikan ide. Pemahaman tentang ide, gagasan dan makna dibalik budaya bendawi dengan sendirinya menjelaskan apa yang tampak (Hodder, 1989: 147-152). Maka yang perlu dilestarikan adalah budaya bendawi sekaligus makna yang terdapat pada benda tersebut. Dalam konteks benteng-benteng Kesultanan Buton, pelestarian tidak hanya menjaga fisik benteng dari ancaman kerusakan, tetapi juga mencakup nilai dan konsep benteng dan perbentengan. Konsep perbentengan dapat diungkap dengan melihat hubungan antara satu benteng dengan benteng lainnya. Informasi yang asli harus dipertahankan untuk tetap memberi peluang pada masyarakat untuk menafsirkan masa lampau sesuai dengan imajinasinya (Tanudirjo, 1996: 16).

B. Sistem Perbentengan Kesultanan Buton

Kesultanan Buton adalah kerajaan yang terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Wilayah kekuasaan Kesultanan Buton mencakup Pulau Buton, Pulau Muna, dan Kepulauan Tukang Besi. Secara geografis, wilayah Kesultanan Buton berada di tengah-tengah antara Kerajaan Gowa di sebelah barat dan Kesultanan Ternate di sebelah timur. Berdasarkan *Nagarakertagama*, yang menyebut *Buton* sebagai salah satu wilayah yang dikuasai Majapahit (1364), maka Buton sebagai kerajaan diperkirakan berdiri sekitar abad ke-14.

Munculnya Buton sebagai kesultanan maritim tidak terlepas dari letaknya yang berada di jalur pelayaran Asia Tenggara yang memosisikan pelabuhan Buton sebagai tempat persinggahan (Zuhdi, 2010:19).

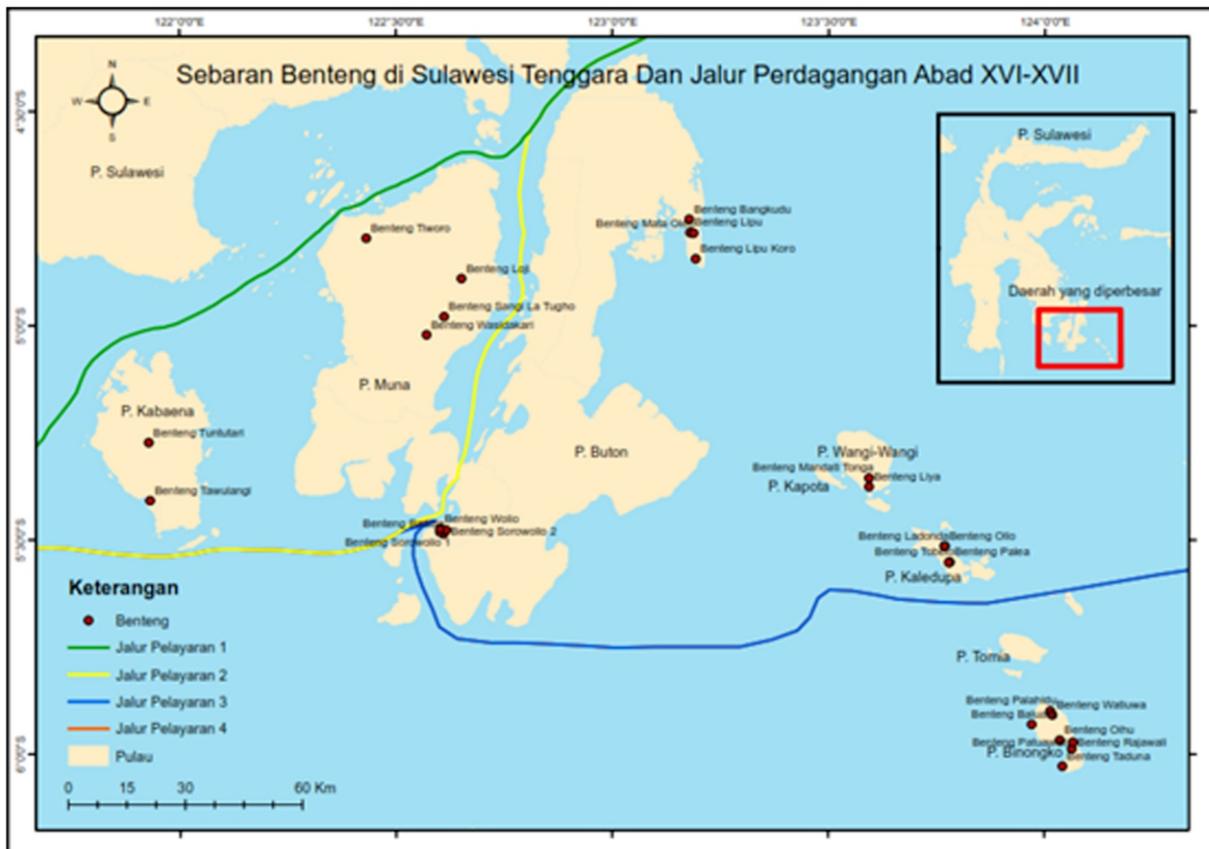
Deskripsi wilayah Buton baru dapat diketahui pada abad ke-19 berdasarkan catatan Ligtoet (1878), seorang pejabat Belanda (*Sectretaris voor Indlanshe zaken*) wilayah Sulawesi yang berkedudukan di Makassar dan mengkonfirmasi bahwa wilayah kekuasaan Kesultanan Buton meliputi : (1) Pulau Buton; (2) Pulau Muna; (3) Pulau Kabaena; (4) Pulau-pulau kecil yang berada sekitar Pulau Buton dan Pulau Muna yakni Pulau : Tiworo, Tikola, Tobeya, Pulau Makassar, Kadatuang, Masiring, Siaompu, Tagala; (5) Kepulauan Tukang Besi yang mencakup Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko; (6) Poleang dan Rumbia; (7) Pulau Wawoni; (8) Pulau-pulau kecil lainnya

yang berada diantara pulau-pulau tersebut diatas (Ligtvoet, 1878: 1-2). Keseluruhan wilayah tersebut terbagi dalam empat *barata* yakni: (1) Barata Kaledupa, (2) Barata Kalisusu, (3) Barata Tiworo, dan (4) Barata Wuna (Muna) (Zuhdi, 2018: xix).

Sebagai kesultanan yang memegang peranan dalam alur pelayaran nusantara pada abad ke 16 - 17 M , jejak-jejak keberadaan Kesultanan Buton masih dapat dijumpai sampai saat ini. Salah satu bukti kehadiran kesultanan Buton adalah benteng kesultanan yang tersebar di hampir seluruh wilayah kesultanan. Berdasarkan hasil inventarisasi yang pernah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, serta hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Balai Arkeologi Makassar, tercatat ada 65 benteng yang terdapat dalam wilayah kesultanan Buton.



Gambar 1. Peta Wilayah Kesultanan Buton
Sumber: Google Earth
dimodifikasi oleh Supriadi (2021)



Gambar 2. Peta Sebaran Benteng Kesultanan Buton
 Sumber: Supriadi (2022)

Sebagai negara maritim dan mempunyai wilayah berupa kepulauan serta berada pada jalur pelayaran utama rempah pada abad ke 16 – 17 M, penempatan benteng kesultanan Buton berada pada wilayah pantai. Berdasarkan pada analisis jarak benteng dengan garis pantai terdekat, ditemukan bahwa rata-rata jarak benteng Kesultanan Buton antara 0 – 3 km. Jarak benteng dengan pantai di pusat kesultanan yakni di wilayah Benteng Wolio antara 1,8 hingga 3,4 km. Berbeda dengan benteng lainnya yang berada daerah Buton, benteng-benteng yang kesultanan yang terletak dipulau Muna menjauh dari garis pantai dengan jarak antara 6–9,5 km.

Selain dekat dengan garis pantai dan jalur pelayaran, rata-rata benteng Kesultanan Buton ditempatkan pada daerah ketinggian atau puncak bukit. Rata-rata posisi benteng berada pada ketinggian antara 200 – 800 meter diatas

permukaan laut. Walau demikian, terdapat juga beberapa benteng yang keletakannya dibawah 50 mdpl. Umumnya benteng yang berada pada ketinggian dibawah 50 mdpl berada digaris pantai atau tidak jauh dari garis pantai.

Secara teknologi, material struktur atau konstruksi benteng-benteng Kesultanan Buton berupa batu karang yang tidak mengalami proses pengerjaan sebelumnya. Berbeda dengan benteng-benteng pada periode kolonial di Indonesia, batu karang yang digunakan sebagai material utama pembangunan dinding telah mengalami proses pengerjaan dan membentuk balok batu. Penggunaan batu karang sebagai material utama ditemukan di keseluruhan Benteng Kesultanan Buton kecuali Benteng Tuntutari dan Benteng Tawulangi di Pulau Kabaena yang menggunakan batu gunung yang berbentuk pipih

(Supriadi,2022:161).

Penggunaan batu karang sebagai bahan utama penyusunan dinding menggunakan pertimbangan ketersediaan bahan yang disediakan oleh alam di lingkungan sekitar benteng. Bahan utama pembangunan Benteng Wolio misalnya bersumber dari Katobengke, sebuah kampung yang terletak 1 km dari Benteng Wolio. Demikian pula benteng lain dalam wilayah Kesultanan Buton menggunakan bahan yang disediakan oleh alam disekitarnya. Secara geologis, ketersediaan batu-batu karang di wilayah Kesultanan Buton adalah hasil bentukan pengangkatan terumbu karang akibat proses tektonik.

Berbeda dengan teknik pembangunan dinding benteng secara umum pada periode abad

pertengahan, teknik pengerjaan pembangunan dinding benteng-benteng Kesultanan Buton tidak menggunakan bahan tanah sebagai isian. Dinding-dinding benteng dibangun dengan menggunakan dua cara. Cara pertama menyusun batu karang yang belum mengalami proses pengerjaan dengan menggunakan spesi batu kapur yang dihaluskan sebagai perekat. Cara kedua dengan menumpuk batu karang tanpa menggunakan perekat. Batu yang berukuran besar ditempatkan pada bagian paling bawah yang sekaligus berfungsi sebagai pondasi dinding benteng.

Sebagai benteng yang didirikan ketika wilayah Indonesia Timur menjadi puncak persaingan empat kekuatan besar yakni Portugis, VOC, Gowa, dan Ternate, akibat perebutan



Foto 1. Benteng Wolio
Sumber: BPCB Prov. Sulsel

perdagangan rempah, maka kehadiran benteng-benteng tersebut tidak bisa dilepaskan sebagai sarana pertahanan. Terutama pada benteng-benteng yang dilengkapi dengan Meriam dan bastion sebagai elemen utama benteng pertahanan. Selain itu, berdasarkan tradisi tutur masyarakat, pembangunan benteng bertujuan sebagai sarana pertahanan dari ancaman bajak laut Tobelo yang sering beroperasi di wilayah kesultanan buton.

Fungsi benteng kesultanan buton sebagai sarana pertahanan diperkuat dengan posisinya pada ketinggian dari permukaan laut yang strategis. Posisi benteng memungkinkan dapat memantau dan mengawasi jalur lalu lintas laut yang berada di depan benteng, termasuk mengawasi ancaman musuh yang datang dari laut. Oleh karena itu, melihat ketiga jenis ancaman tersebut berasal dari jalur laut, posisinya pada ketinggian dan dapat memantau laut menjadikan benteng-benteng kesultanan buton pada posisi yang strategis. Keuntungan lain posisi benteng-benteng tersebut adalah dikelilingi oleh tebing yang terjal. Implikasi dari hal tersebut, dari perspektif pertahanan sangat menguntungkan. Musuh akan sulit mendekati pada dinding benteng untuk melakukan serangan langsung pada jantung pertahanan. Tebing yang terjal menjadi perisai pertama yang menjadi penghalang musuh untuk mendekati benteng (Supriadi: 2021: 842).

Pertimbangan lokasi dalam penempatan Benteng Wolio sebagai sarana pertahanan sejalan dengan pendapat Huey (2010) yang menyatakan Pertimbangan lokasi dalam pembangunan benteng memperhitungkan : 1). Dekat sungai yang sempit, 2). Tidak bisa ditembak dari tempat yang lebih tinggi, 3). Kapal besar tidak bisa terlalu dekat ke benteng, 4). Dapat memantau lingkungan yang jauh dan tidak terhalang pohon atau bukit, 5). Jika memungkinkan dikelilingi parit yang berair, 6).

Bukan pada daerah yang berpasir (Huey, 2010: 152).

Selain sebagai sarana pertahanan, benteng-benteng kesultanan buton menyimpan berbagai aspek simbolis yang harus dibaca. Aspek tersebut terutama elemen kelengkapan benteng yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi pertahanan. Baik yang menyatu dengan dinding benteng maupun yang tidak menyatu tetapi menjadi bagian dari benteng. Kehadiran benteng-benteng kesultanan buton dengan jumlah yang besar dan tersebar diseluruh wilayah kesultanan setidaknya memperlihatkan dan menggambarkan tiga hal yang berkaitan dengan pemilik benteng yaitu :

1. Benteng merupakan teks dan media komunikasi pihak kesultanan baik kedalam maupun kepada pihak luar. Hal ini sejalan dengan pendapat Muth dkk (2016) yang menyatakan bahwa benteng pertahanan yang kokoh seringkali ingin mengkomunikasikan kepada pihak luar tentang sebuah kota yang megah. Benteng-benteng tersebut dapat dianggap bahwa kesultanan Buton ingin menyampaikan pesan bahwa kesultanan Buton adalah kesultanan yang kaya. Kesultanan yang mapan secara ekonomi. Benteng pertahanan yang kokoh menjadi simbol kekuatan pertahanan. Aspek monumental dari benteng merupakan demonstrasi yang memperlihatkan kekuatan militer, ekonomi, maupun demarkasi (Muth dkk B, 2016: 134).
2. Benteng-benteng yang dilengkapi dengan istana, tempat pelantikan, masjid, serta makam-makam raja atau makam bangsawan memperlihatkan status dan hirarki benteng. Benteng Wolio, Kotawuna, Tiworo, dan Benteng Lipu Kulisusu misalnya adalah benteng yang lengkap dan memperlihatkan bahwa benteng tersebut merupakan pusat-pusat kekuasaan.

Benteng-benteng yang secara kategori termasuk benteng urban yang menandakan dimana kekuasaan berada. Benteng dimana Sultan atau Raja berkedudukan. Desain benteng dan kelengkapan yang dimiliki oleh sebuah benteng merepresentasikan pemilik benteng. Semakin besar dan semakin lengkap sebuah benteng menandakan semakin besar dan tinggi kekuasaan sang pemilik benteng.

3. Benteng merupakan pembatas pemukiman. Pembatas antara masyarakat yang tinggal dalam wilayah benteng dengan masyarakat diluar benteng. Keberadaan dinding benteng sebagai pembatas pemukiman tidak hanya berfungsi sebagai pembatas secara fisik, tetapi lebih dari itu. Dinding benteng merupakan pembatas pemukiman antar kelas sosial yang berbeda. Hanya golongan bangsawan yang boleh tinggal dalam benteng, sedang masyarakat umum bermukim diluar benteng. Pembatas antara masyarakat yang lebih maju dan beradab dengan masyarakat yang kurang beradab. Dalam konteks kesultanan buton, masyarakat yang boleh tinggal dalam lingkungan benteng adalah masyarakat dari golongan *Kaomu* dan *Walaka* yang merupakan kelas/kasta bangsawan masyarakat Buton. Kelas yang dapat dipilih menjadi sultan, pejabat kesultanan, maupun penguasa-penguasa yang lebih kecil wilayahnya misalnya *barata* dan *kadie*.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, jelas bahwa benteng-benteng kesultanan buton tidak bisa dilihat sebagai sebuah bangunan yang berdiri sendiri. Benteng terikat dengan lokasi dan tempat pendirian benteng yang dapat memberikan informasi tentang fungsi benteng secara praksis. Benteng dengan segala kelengkapan, baik yang melekat pada fisik benteng maupun terpisah tetapi berada

didalam benteng adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Secara fisik melindungi bagian utama dari suatu negara, dan secara simbolis memperlihatkan status, hirarki, dan kekuasaan sang pemilik benteng.

Demikian pula hubungan antara satu benteng dengan benteng lain dalam satu wilayah kekuasaan yang sama. Benteng tidak berdiri sendiri dan sekedar melindungi masyarakat dan harta benda pemukim dalam benteng, tetapi dalam konteks lebih luas benteng-benteng merupakan sebuah sistem pertahanan yang melindungi kedaulatan negara serta mempertahankan kekuasaan dari ancaman baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Memahami benteng kesultanan buton tidak terlepas dari keletakannya, teknologi yang digunakan, kelengkapan benteng, serta hubungan antara satu benteng dengan benteng lainnya.

C. Konsep Pelestarian Benteng Buton

Pelestarian, merujuk pada Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Merujuk pada pengertian tersebut, ada tiga hal pokok yang perlu dicermati yakni upaya dinamis, mempertahankan fisik, dan menjaga nilainya tetap ada. Secara jelas, pelestarian menurut undang-undang tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang terus bergerak mempertahankan atau mengembalikan fisik sumberdaya budaya, termasuk melindungi nilai yang dikandungnya.

Sebagai upaya dinamis untuk tetap menjaga fisik dan nilai sumberdaya budaya, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menciptakan hubungan emosional antara masyarakat dan benda budaya. Menempatkan kembali atau menjaga sumberdaya budaya

dalam konteks sistem, merupakan sebuah langkah agar sumberdaya budaya tetap memiliki nilai, baik nilai yang dikandung ketika sumberdaya dibangun maupun pemaknaan kembali oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan tetap menganggap bahwa sumberdaya budaya tersebut merupakan bagian dari dirinya dan kebudayaannya.

Mengembalikan benteng-benteng kesultanan buton dalam konteks sistem berarti harus melihat sistem perbentengan kesultanan. Benteng-benteng tersebut tidak berdiri sendiri tetapi selalu terkait dengan tempat berdirinya benteng, sumberdaya budaya lain yang berada dalam wilayah benteng, serta hubungannya dengan benteng yang lain yang ada di wilayah kesultanan buton. Menempatkan Kembali kedalam konteksnya, maka benteng-benteng kesultanan buton yang merupakan manifestasi dari masyarakat pendukungnya lewat intervensi terhadap lingkungan, maka dapat memberikan informasi terhadap masa lampau (Carman, 2002: 16). Budaya material yang hadir berupa benteng merupakan sebuah teks yang dapat memberikan gambaran tentang sebuah proses budaya dan peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Baik di Kesultanan Buton maupun dalam konteks Indonesia Timur.

Merujuk pada pengertian dan konsep pelestarian sebagaimana dalam UU No. 11 tahun 2010, maka dalam pelestarian benteng-benteng kesultanan buton setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan. Keempat hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelestarian dinding benteng, baik dalam upaya perlindungan maupun rekonstruksi kembali dinding tetap mengikuti teknologi ketika dinding tersebut dibuat. Baik bahan maupun cara buat. Hal ini harus tetap dilakukan mengingat bahwa teknologi dinding benteng bukan sekedar pekerjaan teknis tetapi menyimpan informasi tentang

sistem kerja, akses kepada sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, dan status benteng . Semakin besar sebuah benteng dan semakin maju teknik pembuatan dinding, hal ini menunjukkan semakin tinggi status social sang pemilik benteng yang berarti semakin besar kekuasaan yang dimilikinya.

2. Pelestarian yang terkait dengan dinding benteng tidak sebatas melestarikan fisik dinding, tetapi mencakup hal-hal non fisik. Misalnya penamaan pintu (*lawā*) dan bastion harus dihadirkan kembali. Nama pada pintu maupun bastion selain berperan sebagai identitas, juga mempunyai fungsi-fungsi simbolik. Baik sebagai penanda daerah kekuasaan, maupun nama orang yang mempunyai kedudukan penting yang terkait dengan benteng tersebut.
3. Untuk mengungkap jenis benteng, aktivitas dalam benteng, maupun status benteng, maka tinggalan arkeologis dalam benteng merupakan *evidence* yang harus dijelaskan. Oleh karena itu, pelestarian benteng harus mencakup segala *evidence* yang berada dalam benteng. Keberadaan batu pelantikan misalnya menegaskan bahwa benteng tersebut merupakan pusat kekuasaan. Masjid selain menandakan agama juga sekaligus penanda aktivitas. Pelestarian benteng tanpa ikut melestarikan *evidence* tersebut berarti telah menghilangkan informasi dan nilai terhadap benteng.
4. Menyeluruh rangkain benteng-benteng kesultanan buton merupakan satu kesatuan dalam konteks sistem pertahanan buton. Penempatan dan teknologi benteng dalam sistem perbentengan buton jelas memberikan gambaran tentang model pertahanan terhadap berbagai ancaman. Jejeran perbentengan tersebut juga

memperlihatkan bagaimana bentuk pengawasan dan pemantauan kesultanan buton terhadap jalur pelayaran yang melintasi wilayah Buton. Oleh karena itu, pelestarian terhadap benteng-benteng tersebut tidak dilakukan secara parsial, tetapi secara menyeluruh. Benteng-benteng tersebut dalam konteks tertentu dapat dimaknai secara individu, tetapi dalam konteks system pertahanan wilayah benteng-benteng tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk sistem.

D. Penutup

Benteng-benteng kesultanan buton merupakan jejak peninggalan berupa budaya material yang dibangun ketika Indonesia Timur mengalami pergolakan politik dan ekonomi akibat perdagangan rempah. Oleh karena itu, benteng-benteng tersebut merupakan salah satu “lubang kunci” untuk mengungkap sebuah sistem pertahanan negara maritim. Mengungkap konsep dan strategi kekuasaan kesultanan buton untuk tetap bertahan pada kekuasaannya, baik rongrongan dari dalam maupun ancaman dari kekuatan besar. Baik Portugis, VOC, kerajaan gowa, maupun

kesultanan Ternate. Menghubungkan benteng dengan tinggalan didalamnya dengan sendirinya akan mengungkap fungsi dan status benteng.

Oleh karena itu, untuk tetap mempertahankan fisik benteng-benteng tersebut, termasuk nilai dan informasi yang dikandungnya, pelestarian harus dilakukan secara menyeluruh. Mencakup teknologi benteng, hal-hal non fisik yang berkaitan dengan benteng, tinggalan lain sekonteks yang berada dalam lingkungan benteng, serta hubungan dengan benteng lain sebagai satu kesatuan sistem. Pelestarian menempatkan benteng-benteng tersebut dalam konteks sistem.

Sebagai penutup, mengutip pernyataan Nurhadi Magetsari (2016), apa yang terucap belum tentu itu yang benar dan apa yang terlihat belum tentu itu adalah realitas sesungguhnya. Pengungkapan realitas sesungguhnya dengan cara membaca benteng-benteng kesultanan buton sebagai sebuah teks. Benteng-benteng kesultanan buton harus tetap dilestarikan sebagai sumber informasi agar dapat terus dibaca sehingga banyak hal-hal yang terungkap kemudian.

Daftar Pustaka

- Abbas, Novida. 2001. “Dutch Forts of Java: A Locational Study”. *Thesis*. National University of Singapore: Singapore.
- Bulbeck, David. 1998. “Construction History and Significance of the Makassar Fortification” dalam Robinson, Kathryn & Muhlis Paeni (ed). 1998. *Living Through Histories: Culture, History and Sosial Life in South Sulawesi*. Canberra: The Australian National University in Association With the National Archive of Indonesia.
- Carman, John. 2002. *Archaeology and Heritage : An Introduction*. London – New York: Continuum.
- Halama, Simon. 2018. “Protecting Civilization : Cosmological and Ideological Concept Behind City Wall in Assyria”. Dalam Arianne Ballmer, Manuel Fernandez-Gotz and Dirk Paul Mielke (ed). 2018. *Understanding Ancient Fortification: Between Regionality and Connectivity*. Oxford and Philadelphia : Oxbow Book.

Hodder, Ian. 1989. *Reading The Past..* Cambridge – New York: Cambridge University Press.

Hooq, Ian. 1981. *The History of Fortification*. London: Orbis Publishing.

Jansen, Brita, 2016. “Defensive Functionen” dalam Dalam Silke Müth, Peter I. Schneider, Mike Schnelle and Peter D. De Staebler (ed). 2016. *Ancient Fortification: A Compendium of Theory and Practice*. Oxbow Book: Oxford and Philadelphia

Kamps, P. J. M, P. C. van Kerkum, & J. de Zee. 1999. *Terminologie Verdedigingswerken: Inrichting, aanval en Verdediging*. Utrecht: Stichting Menno van Coehoorn

Magetsari, Noerhadi. 2016. *Perspektif Arkeologi Masa Kini dalam Konteks Indonesia*. Jakarta. Kompas.

Mansur, Syahrudin. 2014. “Sistem Perbentengan dalam Jaringan Niaga CengkihMasa Kolonial di Maluku” dalam *Jurnal Kapata Arkeologi* Vol. 10 No. 2 November 2014. Balai Arkeologi Ambon.

Muth, Silke, Eric Laufer Christiane Brasse, dan Mitwirkung von Mike Schnelle. 2016. “Symbolische Funktionen. Dalam Silke Müth, Peter I. Schneider, Mike Schnelle and Peter D. De Staebler (ed). 2016. *Ancient Fortification: A Compendium of Theory and Practice*. Oxford and Philadelphia : Oxbow Book.

Supriadi, Isman P. Nasution, Wanny R. Wahyudi. 2021. “Wolio Fortress, Buton: Between Its Defense and Symbolic Functions”. *Jurnal International Review of Humanities Study* Vol. 6, No. 2, Juli 2021.

Supriadi. 2022. “Benteng-Benteng Kesultanan Buton: Strategi kekuasaan Kesultanan Abad Ke- 16 – 17 M. *Disertasi*. Universitas Indonesia: Depok.

Tanudirjo, Daud Aris. 1996. “Arkeologi Pasca-modernisme untuk Direnungkan”. *Makalah*. Disampaikan dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) VII*. Cipanas, 12-16 Maret 1996.

Zuhdi, Susanto. 2010. *Labu Rope Labu Wana: Sejarah Buton yang terabaikan*. Jakarta: Rajawali Press.

Zuhdi, Susanto. 2018. *Sejarah Buton yang Terabaikan : Labu Rope Labu Wana (edisi revisi)*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.



Barata sebagai Sistem Pertahanan Kesultanan Buton (Sebaran dan Karakteristik Benteng Nusantara di Buton Utara)

Iswadi

iswadimakkaraka@gmail.com

A. Pendahuluan

Peradaban masa lalu manusia penting untuk diketahui berkaitan dengan perkembangan pola kehidupan manusia baik dalam perilaku maupun budaya materi yang dihasilkannya. Aktivitas kehidupan masa lalu tidak dapat dilepaskan dari pola pikir manusia dalam berinteraksi dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi dipandang sebagai sebuah cara untuk mempertahankan diri dan sangat dipengaruhi oleh cara pandang serta perubahan lingkungan yang berlangsung setiap waktu secara perlahan maupun frontal.

Salah satu model adaptasi manusia dalam mempertahankan diri untuk hidup terlihat dari tumbuhnya pemikiran untuk hidup berkelompok dengan membuat tempat berlindung seperti rumah dan gedung, bahkan dalam mempertahankan kelompok mereka dan mempertahankan kedaulatan pemerintahan suatu daerah atau kerajaan dari gangguan musuh, maka di daerah tersebut dibangun sebuah benteng. Pada masa kerajaan, beberapa

daerah telah membangun benteng yang selain digunakan sebagai tempat bermukim para raja dan pembesar kerajaan, tempat menyimpan peralatan persenjataan dan juga dimaksudkan untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan tersebut (Hasanuddin, 2010:24).

Konsep dasar perbentengan sebagai tempat perlindungan dan pertahanan diri atau kelompok sudah ada sejak jaman prasejarah, mengingat bahwa pada masa prasejarahpun keinginan untuk mempertahankan diri sudah menjadi bagian kehidupan mereka. Bukti tersebut dapat kita lihat dengan banyaknya ditemukan struktur batu pada beberapa situs megalitik di Indonesia yang dianggap sebagai perbentengan kecil (Soejono, 1984:19). Menurut W.J.S Poerwadarminta (1986) ada dua yaitu, benteng menurut wujud fisiknya adalah bangunan atau dinding yang berbentuk tembok dari batu, tanah dan sebagainya untuk melindungi kota dari serangan musuh, sedangkan pengertian benteng menurut arti kiasan yaitu apa saja yang bisa dipergunakan

untuk mempertahankan diri dari berbagai bahaya yang mengancam, lebih jauh benteng adalah bangunan yang digunakan oleh militer (dalam Mujib, 1995: 227).

Keberadaan benteng hampir tersebar diseluruh wilayah kepulauan nusantara, dalam perkembangannya kemudian benteng-benteng ini sering disebut sebagai benteng tradisional ataupun benteng nusantara, benteng ini tidak hanya digunakan sebagai benteng pertahanan tetapi lebih dari itu benteng juga difungsikan sebagai pusat pemerintahan, permukiman, dan perekonomian. Salah satu pulau di wilayah nusantara yang memiliki begitu banyak benteng adalah wilayah Pulau Buton, Pulau Muna dan pulau-pulau lain disekitarnya.

Pulau Buton adalah salah satu pulau terbesar diantara pulau-pulau yang berada di selatan/tenggara jazirah Sulawesi Tenggara. Sejak awal abad 14 nama Buton telah terkenal di Nusantara, sebagai daerah yang berada dalam batas pengawasan Majapahit. Hal ini diketahui dari tulisan Mpu Prapanca dalam *Negarakertagama* pupuh XIV bait ke 5. Pulau-pulau lain yang ada disekitarnya adalah Pulau Muna, Pulau Kabaena, Pulau Wowoni, dan Kepulauan Tukang Besi atau Wakatobi (pp. Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko). Ternyata pulau-pulau tersebut kemudian diketahui berada di bawah kekuasaan dan pengaruh Buton sebagai suatu pemerintahan. (A. Ligtvoet: 1878, Zuhdi dkk: 1996:5).

Berdasarkan letaknya Pulau Buton berada pada posisi yang strategis dalam jalur perdagangan di Nusantara. Pulau Buton menghubungkan antara kawasan Indonesia bagian Timur menuju kawasan Indonesia bagian Barat. Jalur ini banyak digunakan oleh para pedagang rempah-rempah dengan membentuk jaringan pelayaran dari Malaka, menuju Maluku, dengan melewati kota-kota pelabuhan yaitu Batavia, Banten, Demak, dan Surabaya (Sutton & Anderson,

2010: 1). Selain itu, Menurut Cortesao (1944:220) bahwa perjalanan yang lebih singkat bagi orang Portugis ke Ternate melalui Singapura ke Borneo, ke Pulau Buton (Buton) lalu ke Ternate. Jalur ini dikenal sebagai jalur yang paling baik dan cocok bagi para pedagang rempah-rempah karena memerlukan waktu yang singkat. Buton sebagai pelabuhan singgah antara jalur pelayaran dari dan menuju Maluku (Aspin, 2019:2).

Ditinjau dari kedudukan geografi, Pulau Buton merupakan mata rantai pelayaran yang menghubungkan antara kawasan Timur dan Barat Nusantara. Kawasan ini termasuk jalur pelayaran paling ramai yang dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari kepulauan rempah-rempah yang berada di Nusantara bagian Timur menuju kota-kota pelabuhan Nusantara bagian Barat (Rahman, 2010:80). Letak Pulau Buton yang strategis menarik perhatian VOC dan Kerajaan Gowa untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah tersebut. Untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, kedua pihak tersebut berusaha memperoleh dukungan dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Sulawesi (Schoorl, 2003:17).

Berdasarkan hal tersebut, sehingga menarik untuk membahas dan mengulas lebih lanjut tentang keberadaan benteng pertahanan Kesultanan Buton khususnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Buton Utara, dalam konteks Kulisusu sebagai Barata, maupun dilihat dari aspek sebaran dan karakteristiknya.

B. Pembahasan

1. Sebaran Benteng Barata Kulisusu (Kalisusu)

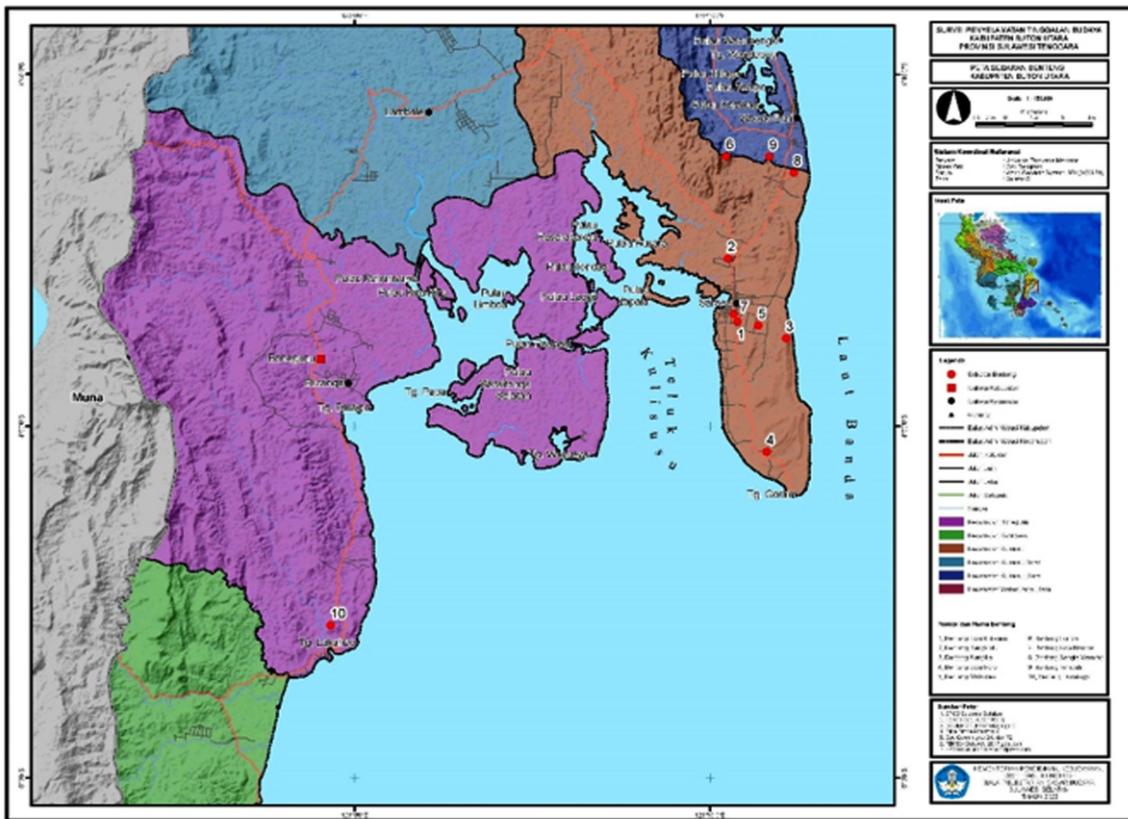
Keberadaan benteng-benteng tradisional atau sering juga disebut sebagai benteng nusantara khususnya di wilayah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, diperoleh dari hasil survei penyelamatan benteng-benteng tradisional oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi

Sulawesi Selatan tahun 2022. Dari berbagai informasi di wilayah ini terdapat 14 benteng, namun berdasarkan hasil survei, hanya 10 benteng yang memiliki tinggalan arkeologis

yaitu: 1. Benteng Lipu Kulisusu, 2. Benteng Bangkudu, 3. Benteng Pangilia, 4. Benteng Lipu Ikoro, 5. Benteng Mataoleo, 6. Benteng Laihori, 7. Benteng Kota Naince, 8. Benteng Sangia Warompi, 9. Benteng Tomoahi dan 10. Benteng Tawa Togo.

Secara administrasi benteng-benteng ini tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara dan

Benteng nusantara di wilayah ini tersebar dari mulai wilayah pesisir pantai, perbukitan hingga ke puncak-puncak gunung, berdasarkan peta sebaran benteng dapat dilihat bahwa, sebaran benteng ini terkonsentrasi di wilayah Ereke/ Kulisusu yaitu Benteng Lipu Kulisusu sebagai pusat pemerintahan. Kemudian Benteng Mataoleo dan Benteng Kota Naince. Dibagian utara terdapat 4 benteng yaitu Benteng Bangkudu, Benteng Laihori, Benteng Sangia Waroampi dan Benteng Tomoahi. Di bagian selatan terdapat Benteng Lipu Ikoro dan dibagian barat terdapat Benteng Tawa Togo. Hal ini sangat wajar apabila dilihat dari aspek



Gambar 1. Peta Sebaran Benteng Nusantara Kabupaten Buton Utara (Sumber: Lap. Survei Penyelamatan Tinggalan Budaya Kulisusu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Selatan. BPCB Sulawesi Selatan 2022).

Kecamatan Bonegunu dan menempati 7 (tujuh) administrasi Desa/ Kelurahan yaitu Wasalabose, Kalibu, Bonelipu, Tomoahi, Saraea, Eerineri, dan Bonegunu (Kioko).

sejarah bahwa Ereke adalah pusat dari Barata Kulisusu Kesultanan Buton, di wilayah ini Benteng Lipu Kulisusu sebagai pusat pemerintahan Barata Kulisusu.

Tabel 1. Keletakan Benteng di Kabupaten Buton Utara

No	No. Inv	Nama Benteng	Kel/Desa	Kec	Koordinat
1	1249	Benteng Lipu Kulisusu	Wasalabose	Kulisusu	123° 10' 49,874" BT - 4° 47' 2,963" LS
2	742	Benteng Bangkudu	Kalibu	Kulisusu	04° 45' 10.9" LS - 123° 10' 41.6" BT
3	1253	Benteng Pangilia	Wasalabose	Kulisusu	04° 47' 8.315" LS - 123° 12' 8.118" BT
4	1251	Benteng Lipu Ikoro	Bonelipu	Kulisusu	04°50'43.4" LS - 123° 11'35.5" BT
5	1252	Benteng Mata Oleo	Wasalabose	Kulisusu	04° 47' 8.315" LS - 123° 11' 21.304" BT
6	-	Benteng Laihori	Tomoahi	Kulisusu	04° 42' 23.36" LS - 123° 10' 27.40" BT
7	-	Benteng Kota Naince	Saraea	Kulisusu	04° 46' 49.65" LS - 123° 10' 39.95" BT
8	-	Benteng Sangia Warompi	Tomoahi	Kulisusu	04° 42' 47.812" LS - 123° 12' 20.88" BT
9	1254	Benteng Tomoahi	Eerinere	Kulisusu Utara	04° 42' 20.33" LS - 123° 11' 40.18" BT
10	-	Benteng Tawatogo	Bonegunu (Kioko)	Bonegunu	04° 56' 7.22" LS - 122° 58' 33.873" BT

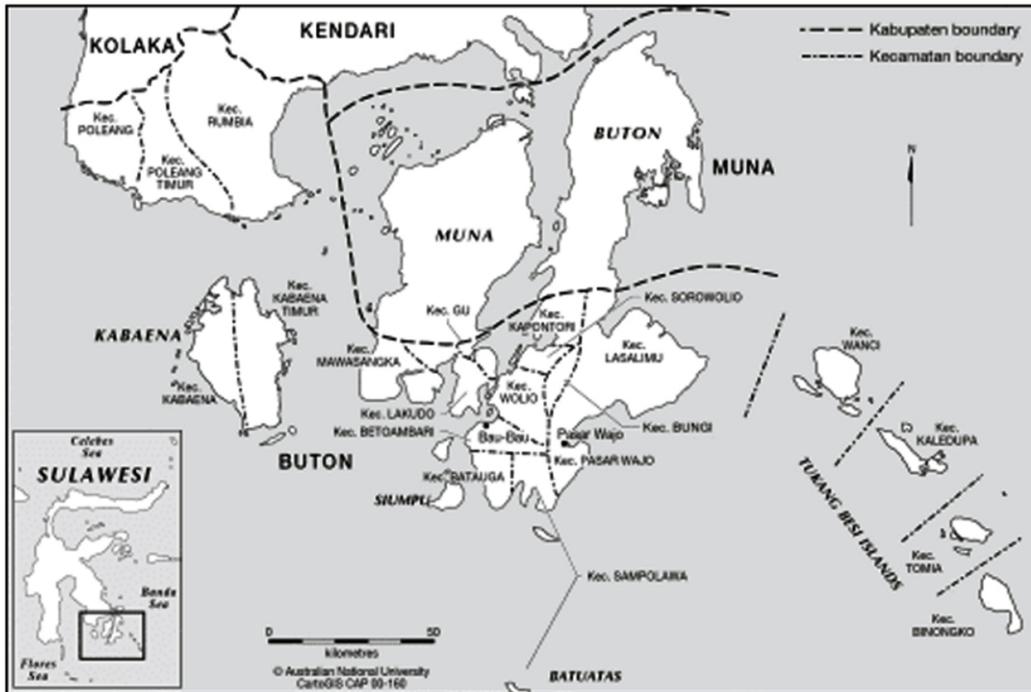
Sumber : (Sumber: Lap. Survei Penyelamatan Tinggalan Budaya Kulisusu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Selatan. BPCB Sulawesi Selatan 2022).

2. Barata sebagai sistem Pertahanan Kesultanan Buton

Sepanjang sejarahnya Kesultanan Buton telah menjadi daya tarik bagi kerajaan-kerajaan atau kekuatan-kekuatan lain yang ingin menguasainya, seperti serangan Kerajaan Ternate tahun 1658 dan 1676. Kerajaan Gowa tahun 1655 dan 1666 dan bahkan Kompeni Belanda (VOC) pada tahun 1655 dan 1775. Oleh karena itu, pemerintah Kesultanan Buton kemudian membentuk sistem pemerintahan sekaligus pertahanan pada wilayah-wilayah

kekuasaannya yang disebut sebagai *Barata*.

Kesultanan Buton yaitu memberdayakan sistem pertahanan rakyat. Setiap kampung baik dalam benteng maupun di luar benteng adalah bagian dari pertahanan Kesultanan Buton. Sistem pertahanan rakyat tergabung dari berbagai wilayah pemerintahan yaitu Sarana Wolio, kadie, dan barata. Dalam wilayah Sarana Wolio sebagai pemerintahan pusat terdapat dua sistem pertahanan yaitu, Pertahanan *patalimbona* dan pertahanan batin dengan istilah *bhisa patamiana*. Pada wilayah kadie



Gambar.2 Wilayah Kesultanan Buton

(Sumber: <https://www.butonmagz.id/2020/10/wilayah-kesultanan-buton-dan-dinamika.html>, diakses, 4 Agustus 2022).

terdapat empat kampung sebagai pertahanan yang dikenal dengan sistem pertahanan matana sorumba, yaitu Lapandewa, Watumotobe, Wabula, dan Mawasangka. Sistem pertahanan barata terdiri dari empat kerajaan kecil yaitu Barata Kaledupa, Barata Muna, Barata Kulisusu, dan Barata Tiworo.

Kesultanan Buton memiliki strategi khusus dalam melindungi wilayahnya yang begitu luas. Wilayah kekuasaan Kesultanan Buton meliputi Pulau Buton, Pulau Muna, Pulau Kabaena, Pulau Wawonii, Poleang, Rumbia, dan Kepulauan Tukang Besi dengan kondisi terpisah antar pulau. Olehnya itu Kesultanan Buton membuat sistem pertahanan berlapis di berbagai wilayah dengan melibatkan beberapa birokrasi pemerintahan. Sistem pertahanan Kesultanan terdiri atas empat lapis yaitu: 1. Kubu pertahanan lapis 1 terdiri atas empat barata. Barata merupakan ujung tombak pertahanan

yang terdiri atas Barata Muna, Barata Tiworo Barata Kulisusu, dan Barata Kaledupa. 2. Kubu pertahanan lapis kedua terdiri atas empat kampung yang disebut dengan matana soromba (empat ujung tombak) yaitu Wabula berada di Timur, Lapandewa berada di sisi Selatan, Watumotobe berada di Utara dan Mawasangka berada di bagian Barat. Kubu pertahanan lapis ketiga disebut dengan Bhisapatamiana sebagai sistem pertahanan batin berada di Ibukota Kesultanan yaitu dalam Benteng Keraton Buton. 4. Kubu pertahanan lapis keempat terdapat di Ibukota Kesultanan, yaitu Benteng Keraton Buton yang disebut dengan patalimbona (Aspin, 2019:70-71).

Khusus untuk sistem pertahanan Barata mempunyai tanggung jawab menjaga kestabilan kerajaan yang beranggotakan empat kerajaan yaitu: Muna, Tiworo, Kulisusu, dan Kaledupa. Keempat barata (Muna, Tiworo,

Kulisusu, dan Kaledupa) yang menjaga wilayah Kesultanan Buton dari serangan musuh-musuhnya di berbagai arah. Pada dasarnya Barata sebagai pertahanan terluar yang lebih dahulu menghalau musuh sebelum masuk dalam wilayah inti. Barata dalam konteks ini dianggap sebagai cadik ganda yang ada di sayap kiri maupun kanan perahu yang berfungsi menjaga keseimbangan. *The ship of state* agar aman dan dapat menghindarkan diri dari ancaman yang datang dari wilayah Barat maupun Timur. Beberapa ancaman tersebut antara lain Kerajaan Gowa dari arah Barat dan kerajaan Ternate dari arah Timur (Zuhdi, 1999:85-87, Aspin, 2019:79-81).

Eksistensi keberadaan Barata merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang terintegrasi dalam Kesultanan Buton, terjadi pada masa pemerintahan Sultan Murhum kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tenggara mengadakan pemufakatan yang disebut dengan “Konvensi Konawe” pada tahun 1538. Konvensi tersebut dihadiri oleh Laposasu Kobangkuduno sebagai Raja Muna, Lolo Batukara sebagai Raja Kaledupa, Mata Sangia sebagai Raja Kulisusu,

Jilabu sebagai Raja Barata Kaledupa, Oheo sebagai Raja Konawe, Teporambo Bokeo sebagai Raja Mekongga dan Hendi Karama sebagai Mokole Kobaena. Konvensi tersebut berisi tentang persatuan kerajaan-kerajaan dengan filosofi “bersatu tidak berpadu, bercerai tidak berantara”(Nurlin, 2017:128).

Adanya Barata sangat berperan penting dalam menjaga keamanan wilayah Kesultanan Buton. Barata sebagai kubu pertahanan terluar Kesultanan Buton. Empat wilayah yang berkedudukan sebagai Barata yaitu Barata Kaledupa berkedudukan di Kaledupa, Barata Muna berkedudukan di Muna, Barata Kulisusu berkedudukan di Kulisusu, dan Barata Tiworo berkedudukan di Pulau Tiworo.

Kesultanan Buton dilindungi oleh keempat Barata di bagian Barat dan Timur. Barata Tiworo dan Barata Muna menjaga keamanan Kesultanan Buton dari arah Barat, Barata Muna mengawasi musuh yang masuk melalui Selat Buton. Barata Tiworo menjaga bagian wilayah Barat Pulau Muna. Barata Kulisusu, dan Barata Kaledupa menjaga keamanan Kesultanan Buton dari arah Timur, Barata Kulisusu terletak di



Gambar 3. Peta Sebaran Barata Kesultanan Buton
(Dimodifikasi sesuai kebutuhan. Sumber: Google Earth tahun 2022)

Selatan sedangkan Barata Kaledupa terletak di bagian Utara. Barata Muna terdapat di tengah Pulau Muna bagian Timur tepatnya di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Di sebelah Utara Barata Muna tepatnya di Kepulauan Tiworo merupakan wilayah yang dikuasai dan diawasi oleh Barata Tiworo atau Kerajaan Tiworo.

Kerajaan Muna menguasai wilayah di Pulau Muna bagian Tengah sedangkan Tiworo menguasai bagian Utara dan pulau-pulau di Selat Tiworo. Perkembangan kemudian ketiga kerajaan ini menjalin hubungan kekerabatan (Zuhdi, 1996:53). Dengan adanya hubungan ini kedua kerajaan ini menjadi bagian Barata sebagai pertahanan Kesultanan Buton. Setiap Barata bertugas untuk melindungi Kesultanan Buton dari serangan musuh yang datang di berbagai arah. Barata Tiworo bersama Barata Muna menjaga keamanan Kesultanan Buton dari arah Barat (buritan). Sementara Kulisusu dan Kaledupa bertugas menjaga serangan musuh dari arah Timur (haluan) (Nurlin, 2017:139).

Salah satu peran Barata Muna bagi Kesultanan Buton yaitu berhasilnya Lakilaponto (putra Raja Muna Sugi Manuru) membunuh La Bolontio seorang pimpinan bajak laut. La Bolontio yang mempunyai mata satu dikenal ganas dan sangat ditakuti karena mempunyai kekuatan besar yang selalu mengganggu keamanan Kesultanan Buton khususnya di daerah perairan Buton (Couvreur, 1935:7).

Pada bagian Timur wilayah Kesultanan Buton terdapat dua Barata yaitu Barata Kaledupa dan Barata Kulisusu. Terbentuknya Barata Kulisusu tidak terlepas dari proses penyebaran agama Islam di Kulisusu pada abad ke-16 (Nurlin, 2017:129). Pada saat kedatangan Sultan La

Elangi di Kulisusu merupakan peristiwa yang mempengaruhi kepercayaan agama bahkan kedudukan politik.

3. Karakteristik Benteng Nusantara Buton Utara

Benteng-benteng Kesultanan Buton tersebar di hampir seluruh wilayah kesultanan. Baik yang berada di pulau pusat kekuasaan yakni Pulau Buton, maupun pulau-pulau yang merupakan Barata dari Kesultanan Buton. Pulau Buton terdiri atas empat wilayah administrasi yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Utara (Supriadi, 2021:106).

Karakteristik benteng-benteng pertahanan Kesultanan Buton yang berada di Barata Kulisusu, akan dibahas selanjutnya mengenai keletakannya dari permukaan laut dan jaraknya baik dari laut maupun jarak dari benteng utama yaitu Benteng Lipu Kulisusu, posisi, bentuk bentengnya, bahan, dan teknik pembuatan yang digunakan sampai kepada komponen utama benteng dan komponen pendukung atau pelengkapannya.

Dari aspek keletakan, benteng di Buton Utara berada pada daerah perbukitan, ataupun di atas daerah puncak gunung dengan ketinggian bervariasi mulai dari ketinggian 23 sampai dengan 213 dari permukaan laut (m.dpl). Sedangkan jarak dari pantai juga sangat bervariasi mulai yang paling dekat adalah Benteng Pangilia berjarak mulai dari 400 meter, hingga yang terjauh adalah Benteng Laihori berjarak sepanjang 4.5 kilometer dari pantai. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Ketinggian dan Jarak Benteng dari Laut

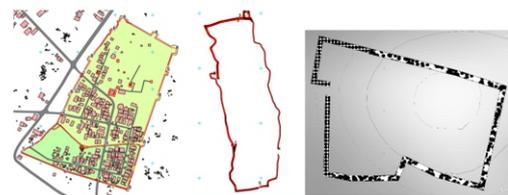
No	Nama Benteng	M.Dpl	Jarak dari Pantai (Kilometer)
1	Benteng Lipu Kulisusu	31	1,2
2	Benteng Bangkudu	71	3,6 (pantai timur), 2,78 pantai barat
3	Benteng Pangilia	77	0,4
4	Benteng Lipu Ikoro	60	1,95
5	Benteng Mata Oleo	56	1,88 (pantai timur)
6	Benteng Laihori	213	4,5 (pantai timur)
7	Benteng Kota Naince	23	1
8	Benteng Sangia Warompi	37	1
9	Benteng Tomoahi	97	2,1
10	Benteng Tawatogo	156	3,2

Dari segi bentuk benteng di wilayah ini sebagian besar mengikuti bentukan lahan atau kontur, bentuk persegi panjang dan tidak diketahui bentuknya. Bentuk benteng yang berada di wilayah Barata Kulisusu yang bentuknya mengikuti bentukan lahan atau kontur dari lokasi pendiriannya yang dikombinasikan dengan struktur batu karang, merupakan bentuk paling dominan yang ditemukan di wilayah ini, hal ini dapat dilihat dari Benteng Bangkudu, Benteng Laihori, Benteng Lipu Ikoro, dan Benteng Mataoleo.



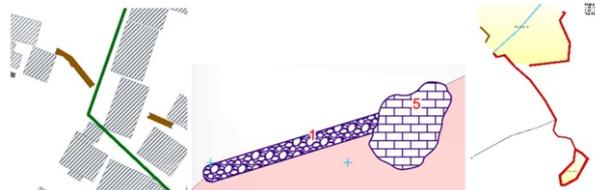
Gambar 4. Benteng Bangkudu, Benteng Laihori, Benteng Lipukoro, dan Benteng Mataoleo. (dari kiri-ke kanan: Sumber BPCB Sulsel Tahun 2022)

Bentuk pola dasar persegi panjang dapat dilihat pada Benteng Lipu Kulisusu, Benteng Pangilia, dan Benteng Tawa Togo. Dapat dilihat di gambar di bawah ini.



Gambar 5. Benteng Lipu Kulisusu, Benteng Pangilia dan Benteng Tawa Togo

Benteng yang Sebagian besar hilang strukturnya, sehingga sangat sulit untuk menemukan bentuk dari benteng ini, hal ini dapat dilihat dari Benteng Kota Naince.



Gambar 6. Benteng Kota Naince, Benteng Sangia Waroampi dan Benteng Tomoahi (Sumber: BPCB Sulsel Tahun 2022)

Menurut Supriadi (2022) pada umumnya benteng Kesultanan Buton, dilihat dari aspek bahan yang digunakan menggunakan bahan

batu kapur-batu karang, yang disusun dengan teknik susun timbun menyusun batu atau menumpuk batu karang tanpa menggunakan perekat. Batu yang berukuran besar ditempatkan pada bagian paling bawah yang sekaligus berfungsi sebagai pondasi dinding. Teknik menumpuk tanpa spesi digunakan dapat dilihat pada semua benteng yang berada di Kabupaten Buton Utara. Adapun spesi yang ditemukan di Benteng Lipu Kulisusu adalah penambahan kemudian dari hasil pemugaran yang telah dilakukan sama halnya yang terdapat di Benteng Bangkudu (berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara), namun teknik semacam ini dapat dilihat di Benteng Keraton Buton (pusat Kesultanan Buton).

Kemudian dari komponen utama yang menjadi satu kesatuan struktur benteng, mulai dari Lawa (pintu), parapet (jalan patroli), lubang bidik, dan meriam. Benteng Lipu merupakan Benteng yang paling lengkap komponennya hampir semua dapat ditemukan di benteng ini, begitu juga dengan Benteng Pangilia, kecuali komponen meriam yang tidak ditemukan di benteng ini. Sedangkan Benteng Bangkudu hanya memiliki Lawa (pintu) dan jalan parapet (jalan patroli).

Kemudian dari segi komponen di dalam benteng seperti baruga, masjid, batu pelantikan, pemukiman, dan makam. Dari data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa, Benteng Lipu Kulisusu merupakan benteng yang memiliki komponen paling lengkap semua komponen di atas dapat ditemukan di Benteng ini, begitu juga dengan Benteng Bangkudu (kecuali batu pelantikan) sedangkan 8 benteng lainnya dominan hanya berupa struktur benteng.

C. Penutup

Tugas utama "**Barata**" adalah bertanggung jawab terhadap pertahanan keamanan, wilayah kekuasaannya masing-masing. Setiap kerajaan yang tergabung dalam Barata ini secara mandiri mengusahakan sistem pertahanan yang kuat, sedangkan pertahanan secara kolektif apabila

salah satu anggota Barata tidak dapat lagi menghadapi musuh, baru meminta bantuan kepada kesultanan Buton. Atas perintah Kapitalao di Buton semua anggota Barata sebagai inti kekuatan bersama memberikan bantuan kepada salah satu kerajaan yang sedang berperang. Panglima tertinggi Barata ada pada Kapitalao yang berkedudukan di kesultanan Buton, sedangkan di kerajaan-kerajaan itu bertugas mengamankan wilayah kerajaannya.

Keberadaan 10 benteng yang berada di wilayah Kabupaten Buton Utara adalah peninggalan dari Kerajaan Kulisusu yang merupakan salah satu Barata dari Kesultanan Buton yang memiliki tugas sebagai sistem pertahanan terluar dari arah timur bersama dengan Barata Kaledupa.

Walaupun wilayah ini tidak masuk di dalam jalur utama pelayaran dan perdagangan rempah-rempah di Abad 17 hingga 19, namun wilayah Barata Kulisusu memiliki peran penting dalam sistem pertahanan Kesultanan Buton, akibat adanya serangan dan ancaman kedaulatan dari Kerajaan Ternate-Tidore dan ancaman dari bajak laut. Sistem pertahanan Barata ini berakhir setelah masuknya Belanda di Buton pada tahun 1906.

Di dalam Barata Kulisusu, dengan adanya benteng-benteng yang dibangun baik di daerah pesisir pantai, area perbukitan, dan pegunungan merupakan, salah satu bentuk strategi dalam memantau daerah di sekitarnya, utamanya terhadap adanya ancaman dari laut. Dilihat dari sebarannya, Benteng-benteng di daerah perbukitan yang cenderung landai digunakan sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan pemukiman. Sedangkan benteng di daerah pesisir pantai difungsikan sebagai benteng pertahanan dan benteng-benteng di daerah pedalaman di atas puncak bukit dan gunung digunakan sebagai benteng pertahanan, pemantauan, dan secara temporal digunakan sebagai tempat berlindung dari adanya serangan yang memasuki wilayah ini.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2022. *Laporan Survei Penyelamatan Tinggalan Budaya Kulisusu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara*. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan.
- Aspin. Laode. 2019. Sistem Pertahanan dan Keamanan Wilayah Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. *Tesis*. Program Studi Arkeologi. Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Corteseo, Armando. 1994. *“Suma Oriental Of Tome Pire*. Hakluyt Society, Series LXXXIX. Vol. I. London.
- Couvreur, J. 2001. *“Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna”*. Diterjemahkan Oleh Dr. Rene van den Berg) Kupang: Artha Wacana Press.
- Hasanuddin. 2010. Eksistensi Benteng Wabula Sebagai Bentuk Pertahanan Berlapis Kerajaan Buton, Sulawesi Tenggara dalam. *Jurnal WalennaE, Vo. 12 No. 1-Febuari 2010*. Balai Arkeologi Makassar.
- Ligtvoet. 1878. *“Beschrijving En Gescheiden Van Boetton”*. BKI: Mailrapporten
- Mujib, 1995. *“Spesifikasi Benteng-Benteng di Kawasan Bengkulu pada masa Kolonial Inggris”*. Berkala Tahun XV Edisi Khusus Tahun 1995. Balai Arkeologi : Yogyakarta;
- Nurlin. 2017. *“Menyikap Tabir Kuasa di Tanah Buton : Orang Kulisusu, Identitas Dan Kekuasaan”*. Yogyakarta: Ombak;
- Poerwadarminta, W.J.S. 1999. Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Rahman, Abd H. 2011. *“Orang Buton: Suku Bangsa Bahari Indonesia”*. Penerbit Ombak; Yogyakarta:
- Soejono R.P (E.d). 1984. *Sejarah Nasional Indonesia I, Balai Pustaka: Jakarta;*
- Schoorl, J.W. 1985. *“Belief in Reincarnation on the island of Buton. Southeast Sulawesi”*. Bidjragen tot de taal, Land-en Volkenkunde Deel 141.
- , 2003. *“Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton”*. Jakarta, Penerbit Djambatan- KITLV.
- Zuhdi, Susanto dkk. 1996. *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara, Kesultanan Buton*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta.

VUE DE LA
BAYE DE BONTHAIN
Située à environ 30. lieues au
S.E. de MACASSAR dans
L'ISLE DES CELEBES
Latit. 5° 34' S.

Kota Lama Bantaeng Sebagai Kawasan Cagar Budaya

Abdullah¹, Yadi Mulyadi², Andi Jusdi³, Amirullah⁴, Muhammad Akil Ridho⁵

¹ Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

² Departemen Arkeologi FIB Universitas Hasanuddin

³ Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

⁴ Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

⁵ Pusat Kajian Arkeologi untuk Masyarakat

Pendahuluan

Bantaeng merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang keberadaannya telah dikenal sejak lama. Berdasarkan bukti arkeologis yang ditemukan di Situs Cagar Budaya Batu Ejayya, hunian di Bantaeng telah ada sejak 4700 hingga 4300 cal. BP (Suryatman, 2017). Hunian di Bantaeng terus berlanjut di periode sejarah yang salah satunya ditandai dengan kehadiran komunitas-komunitas masyarakat yang menjadi cikal bakal Kerajaan Bantaeng. Dalam periode ini, Bantaeng terekam dalam Kitab Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365 Masehi, dengan nama *Bantayan*. Penulis kitab ini adalah Mpu Prapanca yang menyebut kitab ini dengan nama *Deçawarnana* atau uraian tentang desa-desa. Namun, nama yang diberikan oleh pengarangnya tersebut terbukti telah dilupakan oleh umum, hingga sekarang biasa disebut sebagai Kitab *Nagarakretagama*.

Nama Nagarakretagama tercantum pada [kolofon](#) terbitan [Dr. J.L.A. Brandes](#): "*Iti Nagarakretagama Samapta*". Hal ini menandakan bahwa Bantaeng dengan nama Bantayan telah dikenal di kancah Nusantara sejak abad 14 Masehi sebagai daerah penting bersama dengan wilayah-wilayah lain di Sulawesi Selatan yaitu: Luwu dan Uda (?) (Pigeaud, 1962: 17 dalam Bougas, 1998: 84). Kitab ini bahkan menyebut *Bantayan* sebagai nama keseluruhan wilayah (Hardiati, 1996-1997: 5 Mahmud, 2007: 95). Jaringan-jaringan dagang yang dibentuk oleh Bantaeng sekitar abad ke-13 hingga abad ke-14 telah memberi keuntungan signifikan bagi perkembangan Makassar dalam aspek perdagangan hingga abad ke-17.

Sampai saat ini, belum ada data tertulis yang meriwayatkan bahwa Mpu Prapanca pernah

datang ke Bantayan, artinya pengetahuan Mpu Prapanca mengenai Bantayan dia peroleh dari orang lain atau mungkin telah menjadi pengetahuan umum pada masa itu di Majapahit. Artinya pada abad ke 14 telah ada kontak budaya yang intens antara Bantayan dan Majapahit, dua wilayah yang secara geografis berada di dua pulau yang berbeda yang dihubungkan oleh lautan yaitu Laut Jawa dan Selat Makassar.

Lautanlah yang menjadi penghubung antara Majapahit dan Bantayan pada masa itu, dengan demikian laut menjadi sarana transportasi yang dimanfaatkan dalam aktifitas pelayaran dan perdagangan. Pelayaran dan perdagangan merupakan aktifitas kemaritiman yang tentunya dipicu oleh berbagai faktor, termasuk dalam hal ini ketersediaan komoditi perdagangan, yang kemudian mendorong Bantaeng menjadi kota.

Sejarah Kota Lama Bantaeng dan Jejak Budaya Kemaritiman

Wilayah Bantaeng dalam skala lokal maupun regional merupakan salah satu daerah di Sulawesi yang memiliki banyak tinggalan berupa keramik-keramik asing baik dari Cina, Thailand, maupun Eropa. Keramik pada masa itu merupakan salah satu komoditi perdagangan yang tentunya didatangkan dari luar wilayah Bantaeng melalui aktifitas pelayaran. Beberapa situs arkeologi di Bantaeng kaya dengan tinggalan berupa fragmen keramik yang menjadi salah satu indikasi bahwa wilayah tersebut merupakan pemukiman tua. Bahkan beberapa keramik utuh juga ditemukan sebagai bekal kubur. Hal ini diperkuat pula dengan informasi dari tokoh masyarakat Bantaeng yang mengatakan bahwa pada kurun waktu 1970 sampai awal 1990-an banyak dilakukan penggalian liar di makam-makam tua di Bantaeng untuk mencari bekal kubur termasuk

keramik. Temuan keramik tersebut cukup banyak, namun sayangnya sebagian besar keramik itu dijual kepada para kolektor dari luar Bantaeng.

Dalam konteks sosial ekonomi kemasyarakatan, keberadaan temuan keramik asing di Bantaeng ini tentunya memiliki muatan informasi kesejarahan yang terkait dengan kemampuan ekonomi masyarakat Bantaeng pada masa itu. Hal ini mengingatkan bahwa keramik asing tersebut merupakan barang impor yang tentunya menjadikannya sebagai komoditi perdagangan yang memiliki nilai jual tinggi. Dengan demikian, untuk memiliki keramik asing tersebut tentunya perlu ditunjang oleh modalitas ekonomi yang kuat.

Jika hipotesis ini menjadi acuan dalam membangun argumen, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Bantaeng pada masa itu memiliki perekonomian yang mapan. Perekonomian yang mapan tentunya didukung oleh adanya sumberdaya. Termasuk dalam hal ini sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomis pada masa itu sehingga menjadi komoditi unggulan Bantaeng yang dapat diperdagangkan. Bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di Bantaeng dapat memperkuat argumentasi tersebut. Selain hasil penelitian arkeologi, informasi mengenai temuan keramik asing diperoleh dari aktifitas penggalian liar yang dilakukan di situs-situs kuburan pra Islam untuk mencari barang yang dikubur bersama jenazah antara abad 14 dan awal abad 17.

Penjarahan kuburan pra-Islam ini telah dilaporkan terjadi pada abad 17 (Gervaise 1701:120). Penggalian liar yang berkesinambungan dan sistematis dimulai pada tahun 1936 dan mencapai puncaknya sekitar tahun 1970 (Ito dan Kamakura 1941; Hadimuljono dan Macknight 1983). Para

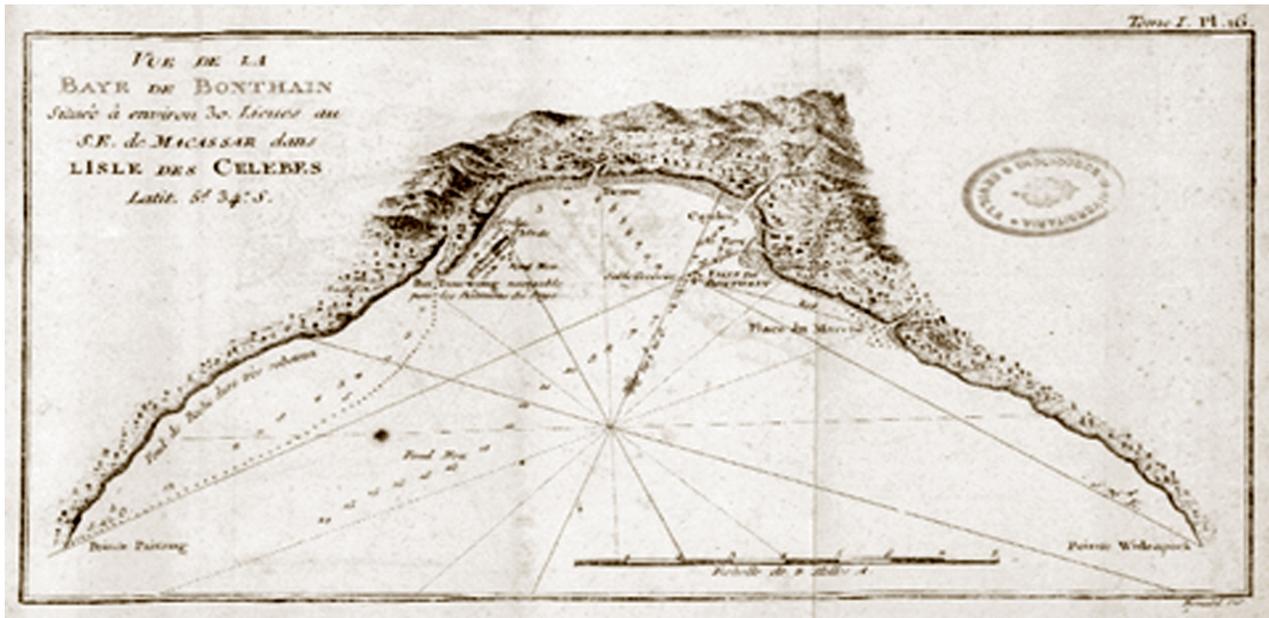
penjarah umumnya memburu keramik Tiongkok, Vietnam, dan Thailand yang diimpor ke Sulawesi Selatan dalam jumlah yang semakin meningkat setelah tahun 1200 Masehi. Selain tinggalan arkeologi berupa keramik asing, pada awal abad 20 di Bantaeng ditemukan pula tiga patung Budha dari perunggu, yang melihat langgam gayanya berasal dari abad ke 7 atau 8 Masehi, (Scheurleer dan Klokke 1988:111-3). Pada penggalian yang dilakukan tahun 1998 ditemukan sejumlah 21 manik-manik bersudut delapan dari bahan carnelian, yang ditemukan dalam satu tempat, kemungkinan berasal dari akhir milenium pertama (Fadillah 1999:28; Bulbeck and Fadillah 2000:47).

Temuan-temuan tersebut memunculkan sebuah pertanyaan besar apa yang dipertukarkan dengan barang-barang impor tersebut. Salah satu hipotesis yang dapat dibangun yaitu bahwa barang-barang tersebut berupa komoditi dari Bantaeng yang kemungkinannya antara lain, barang-barang kebutuhan kapal, penggunaan pelabuhan yang terlindung, produk-produk hutan dan emas dari dataran tinggi di pedalaman barat daya dan tengah Pulau Sulawesi, dan rempah-rempah yang dipindah kapalkan dari Maluku (Caldwell dan Bougas, 2014). Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat yang juga merupakan keturunan Raja Bantaeng, mengatakan di lontara disebutkan bahwa komoditi yang dihasilkan Bantaeng salah satunya berupa kopi, baru kemudian pada masa kolonial Belanda cengkeh, merica, dan lada.

Hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut, untuk lebih memastikan jenis-jenis komoditi dari Bantaeng yang diperjualbelikan pada era pelayaran dan perdagangan di masa lalu,

sebagai bukti bahwa aktifitas kemaritiman tidak dapat dilepaskan dari komoditi yang ada di daratan. Keberadaan makam-makam kuno Islam di Bantaeng pun merupakan penanda adanya aktifitas kemaritiman. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Sejarawan A.B Lopian yang menyatakan bahwa Islamisasi di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari konteks kemaritiman. Jejak artefaktual kemaritiman di Bantaeng memperlihatkan kepada kita bahwa aktifitas kemaritiman yang bertumpu pada pelayaran dan perdagangan, berkembang karena adanya ketersediaan komoditi di daratan, sehingga memungkinkan adanya pertukaran dengan komoditi lain yang dibawa pedagang dengan kapal.

Aktifitas kemaritiman yang berlangsung sejak dulu, menjadikan Bantaeng memiliki warisan budaya yang beragam dan menjadikannya sebagai keunikan yang membedakan Bantaeng dengan daerah lainnya. Karakteristik yang unik inilah sepertinya yang mendorong Pemerintah Hindia Belanda pada saat berkuasa di Nusantara, menjadikan Bantaeng sebagai salah satu afdeling yaitu dengan nama Afdeling Bonthain pada 1905 yang wilayahnya meliputi onderafdeling Bonthain, onderafdeling Bulukumba, onderafdeling Sinjai, dan onderafdeling Seleier (Selayar) (Akbar, 2019). "Bonthain" adalah nama kolonial, mewakili Bantaeng masa lalu dan sejarah. Dalam perjalanannya ke Makassar pada bulan Mei 1768, seorang pria Inggris bernama Captain Carteret menyebut Bonthain beberapa kali dalam buku hariannya (Hasrianti & Mansyur, 2020).



Repro Lukisan Teluk Bonthain yang diterbitkan dalam edisi asli perjalanan Cooks edisi frensh – 1774, Lukisan aslinya oleh Bernard (Sumber: ebay.com)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wilayah Afdeling Bonthain merupakan perkembangan dari wilayah Bantaeng pada masa kerajaan. Pada periode afdeling ini yang kemudian membentuk citra wilayah afdeling Bonthain menjadi Kota Lama Bantaeng. Tinggalan budaya material berupa bangunan maupun struktur dari periode afdeling ini tentunya memiliki nilai penting dan arti khusus yang menjadi dasar penetapan sebagai cagar budaya. Proses penetapan ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng sejak 2019. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam upaya pelestarian cagar budaya yang tentunya perlu didukung bersama. Terkait dengan hal ini pemerintah pusat melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu UPT Kemdikbud, melakukan kegiatan survei penyelamatan di kawasan kota lama Bantaeng pada akhir Januari 2021. Hasil survei tersebut semakin mempertegas pentingnya pelestarian Kota Lama Bantaeng sebagai Kawasan Cagar Budaya penanda identitas dan perjalanan sejarah Bantaeng.

Distribusi Tinggalan Kolonial di Bantaeng

Mengacu pada laporan penelitian Balai Arkeologi Sulawesi Selatan tahun 2017 yang bertajuk “Jejak Peradaban Islam dan Kolonial di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan” tercatat 40 bangunan kolonial di Kabupaten Bantaeng yang dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu:

- Kategori 1, yaitu bangunan yang memiliki ciri arsitektur bangunan kolonial yang kuat dan dapat diidentifikasi pada peta Belanda tahun 1923;
- Kategori 2, yaitu bangunan yang memiliki ciri arsitektur bangunan kolonial, namun tidak dapat diidentifikasi pada peta Belanda tahun 1923;
- Kategori 3, yaitu bangunan yang memiliki ciri arsitektur bangunan tradisional yang kuno;
- Kategori 4, arsitektur bangunan telah mengalami renovasi, namun informasi hasil wawancara menyebut sebagai bangunan masa kolonial;

- e. Kategori 5, yaitu bangunan atau fitur lain yang ada dalam peta dan lokasi dapat diidentifikasi saat survei;
- f. Kategori 6, yaitu bangunan atau fitur lain yang ditemukan saat survei, namun tidak ada dalam peta Belanda tahun 1923.

Berikut tabel kategori bangunan kolonial yang berhasil diidentifikasi pada penelitian tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Sulawesi Selatan.

Tabel.1 Daftar kategori bangunan kolonial yang berhasil diidentifikasi pada penelitian tahun 2017

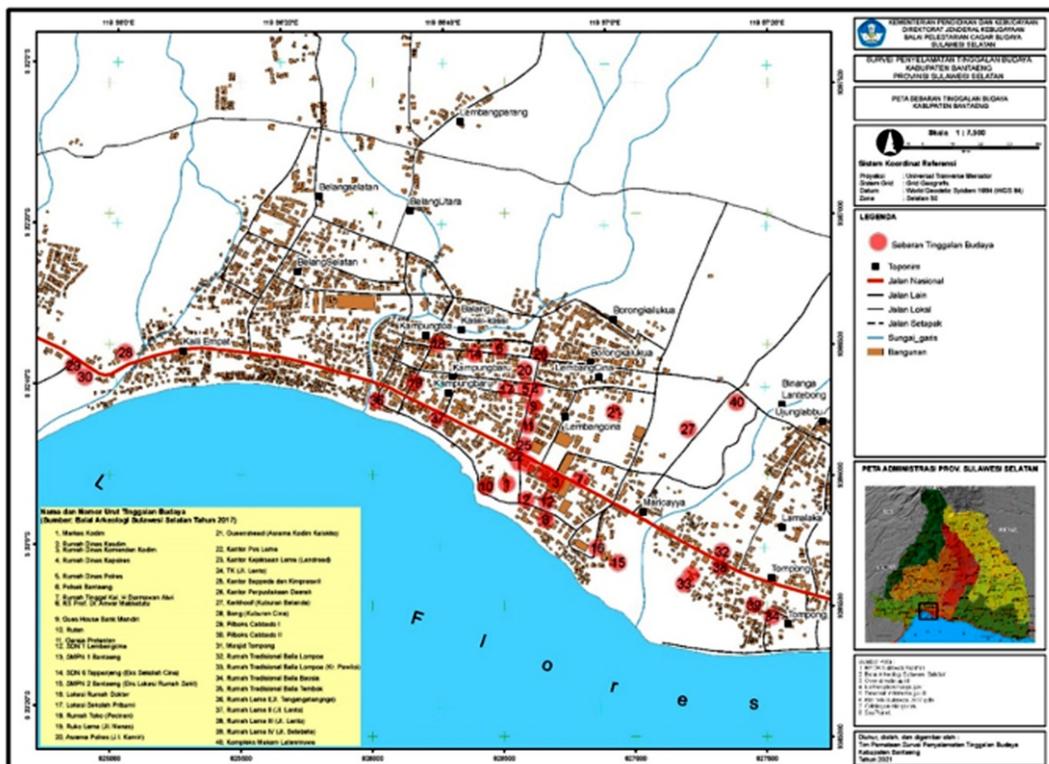
No	Kategori	Nama Bangunan/Fitur	Lokasi	Fungsi Bangunan Pada Masa Kolonial
Kategori 1				
1	Ciri bangunan kuat dan dapat diidentifikasi pada peta 1923	Guest House	Kel. Pallantikang	Pemerintahan
2		Kerkhoof (Kuburan Belanda)	Kel. Pallantikang	Kompleks Pekuburan
3		Rumah Tinggal H. Dermawan Alwi	Kel. Pallantikang	Rumah Tinggal Pejabat Belanda
4		Markas Kodim	Kel. Pallantikang	Militer
5		Rumah Dinas Kasdim	Kel. Pallantikang	Rumah Tinggal Pejabat Belanda
6		Rumah Dinas Dandim	Kel. Pallantikang	Rumah Tinggal Pejabat Belanda
7		SD Negeri 1 Lembangcina	Kel. Pallantikang	Sekolah
8		Rumah Toko Cina (Pecinan)	Kel. Pallantikang	Rumah Tinggal dan Pertokoan
9		SMP Negeri 2 Bantaeng (Lokasi Bekas Rumah Sakit)	Kel. Pallantikang	Rumah Sakit
10		Rutan	Kel. Pallantikang	Penjara
11		SMP Negeri 1 Bantaeng	Kel. Pallantikang	Sekolah / pendidikan
12		Kantor Pos Lama	Kel. Pallantikang	Pemerintahan
13		Kantor Kejaksaan Lama	Kel. Pallantikang	Pemerintahan
14		TK (Jl. Lanto)	Kel. Pallantikang	Pemerintahan

Kategori 2				
15	Ciri bangunan kuat namun tidak ada dalam peta	Rumah Dinas Kapolres	Kel. Pallantikang	Rumah Tinggal Pejabat Belanda
16		Gereja Protestan	Kel. Pallantikang	Religi
17		Bong (Kuburan Cina)	Kel. Bonto Sunggu	Kompleks Pekuburan
18		Queenshead (Asrama) Kalokko	Kel. Pallantikang	Militer
19		Rumah Sakit	Kel. Pallantikang	Rumah Sakit
20		Lokasi Eks Rumah Dokter	Kel. Pallantikang	Rumah Tinggal Pejabat Belanda
21		Polsek Bantaeng	Kel. Pallantikang	Militer
22		Asrama Polres Jl. Kemiri	Kel. Pallantikang	Kompleks Rumah Tinggal Militer
23		Rumah Dinas Polres (Jl. Kartini)	Kel. Pallantikang	Rumah Tinggal Pejabat Belanda

Kategori 3				
24	Bangunan Lokal (ciri bangunan kuno)	Ballak Tembok (Meriam I)	Kel. Letta	Rumah Tinggal Pribumi
25		Ruko Lama (Jl. Nenas)	Kel. Tappanjeng	Rumah Tinggal dan Pertokoan Pribumi
26		Rumah Tua Tangngatangnga	Kel. Tappanjeng	Rumah Tinggal Pribumi
27		Rumah Tua Jl. Lanto	Kel. Tappanjeng	Rumah Tinggal Pribumi
28		Masjid Tompong	Kel. Letta	Religi
29		Rumah Tradisional Balla Bassia	Kel. Letta	Rumah Tinggal Pribumi
30		Rumah Tradisional Balla Lompoa	Kel. Letta	Rumah Tinggal Pribumi
31		Kompleks Makam La Tenriruwa	Kel. Pallantikang	Kompleks Pekuburan
32		Rumah Lama (Jl. Lanto)	Kel. Letta	Rumah Tinggal Pribumi
33		Rumah Lama (Jl. Bete-Bete)	Kel. Letta	Rumah Tinggal Pribumi

Kategori 4				
34	Bangunan telah direnovasi	Kantor Bappeda & Kimpraswil	Kel. Pallantikang	Pemerintahan
35	namun informasi/wawan	Perpustakaan Umum Daerah	Kel. Pallantikang	Pemerintahan
36	cara menyebut sebagai bangunan masa kolonial	SD Negeri 6 Tappanjeng (Eks. Sek. Cina)	Kel. Tappanjeng	Sekolah
Kategori 5				
37	Fitur lain yang ada dalam peta	Lokasi Sekolah Pribumi	Kel. Pallantikang	Sekolah
Kategori 6				
38	Fitur lain yang ditemukan saat survei namun tidak ada dalam peta	Pillbox Caboddo I	Kel. Bonto Sunggu	Militer
39		Pillbox Caboddo II	Kel. Bonto Sunggu	Militer
40		Meriam II dan III (Rujab Bupati)	Kel. Pallantikang	-

Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, 2017



Peta Sebaran Tinggalan Kolonial di Kabupaten Bantaeng (Sumber: BPCB Sulsel, 2021)

Pendataan Cagar Budaya di Kabupaten Bantaeng sejak 2018 dilakukan secara berkala oleh tim pendaftaran cagar budaya BPCB Prov. Sulsel, meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bantaeng. Hasil pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten Bantaeng dapat diakses di website

<https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/public/pencarian>. Dalam website tersebut tercatat 28 objek pendaftaran cagar budaya Kabupaten Bantaeng. Sejak 2019, Kabupaten Bantaeng telah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya yang telah menjalankan tugasnya dan merekomendasikan kepada Bupati Bantaeng untuk penetapan status Cagar Budaya peringkat Kabupaten Bantaeng. Sampai tahun 2020, telah ditetapkan 11 objek Cagar Budaya yang terdiri dari 3 Situs Cagar Budaya, 1 Bangunan Cagar Budaya dan 1 Struktur Cagar Budaya. Selain yang terdapat di Registrasi Cagar Budaya, objek Cagar Budaya lainnya baru didata dan masih sementara dalam proses pendaftaran sesuai mekanisme yang berlaku.



Foto Repro Rumah Onder Afdeling Bonthain tahun 1910 (Sumber: Tropen Museum)

Adapun di database BPCB Sulsel baru tercatat 12 objek dan belum ada objek yang berasal dari periode Afdeling Bonthain. Padahal mengacu pada penelitian Hermina (2013) dan Balai Arkeologi Sulawesi Selatan (2017) terdapat 40

objek dari periode kolonial. Berdasarkan hal tersebut salah satu upaya yang perlu segera dilakukan yaitu segera diproses penetapannya sebagai cagar budaya, sebagai bagian dari upaya pelestarian cagar budaya khususnya di kawasan Kota Lama Bantaeng. Selain itu, mengacu pada faktor dan tingkat keterancaman pada masing-masing objek tinggalan kolonial tersebut, diperlukan tindakan penyelamatan baik berupa pemugaran, revitalisasi atau adaptasi, yang harus diawali dengan studi teknis dan studi kelayakan untuk panduan dalam pelaksanaannya.

Tingkat Keterancaman dan Tindakan Penyelamatan

Mengingat kondisi bangunan maupun struktur cagar budaya di kawasan Kota Lama Bantaeng ini memiliki potensi ancaman bahkan ada yang rusak, maka informasi terkait tingkat keterancaman serta rekomendasi tindakan penyelamatan merupakan hal penting dalam kaitannya dengan revitalisasi. Tingkat keterancaman dalam konteks ini memaparkan skala atau peringkat keterancaman pada masing-masing objek kajian. Skala keterancaman ini dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu tingkat keterancaman rendah, sedang, dan tinggi. Kriteria yang menjadi indikator tingkat keterancaman rendah yaitu; telah ditetapkan sebagai cagar budaya; kondisi objek terawat; dan kerusakan pada objek minim. Adapun kriteria yang menjadi indikator tingkat keterancaman sedang yaitu; objek baru tercatat dalam registrasi atau daftar objek pendaftaran cagar budaya; kondisi kurang terawat; dan kerusakan pada objek cukup tinggi. Sedangkan kriteria yang menjadi indikator tingkat keterancaman tinggi yaitu; belum tercatat dalam registrasi atau daftar objek pendaftaran cagar budaya; kondisi tidak terawat, dan tingkat kerusakan tinggi.

a. Tingkat keterancaman rendah

Objek kajian survei penyelamatan yang termasuk dalam kategori ini yaitu; Bangunan eks Rumah Dinas Controleur (Rumah Dinas Dandim; Bangunan Rumah Dinas Kasdim; Bangunan Rumah Jl. Lanto No.3)

b. Tingkat keterancaman sedang

Objek kajian survei penyelamatan yang termasuk dalam kategori ini yaitu; Bangunan Eks Kantor Kejaksaan dan Pengadilan; Bangunan Eks Sekolah Rakyat (SD Satu Lembang Cina); Bangunan eks Kantor Asisten Residen (Markas Kodim 1410);

c. Tingkat keterancaman tinggi

Objek kajian survei penyelamatan yang termasuk dalam kategori ini yaitu; Kompleks Rutan Bantaeng, Kuburan Belanda (Kerhoff); Kompleks Asrama Kalokko (Queshead); Kantor Pos Lama.

Berdasarkan skala tingkat keterancaman tersebut, perlu dilakukan tindakan penyelamatan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan, kehancuran atau kemusnahan objek cagar budaya. Bentuk tindakan penyelamatan tergantung pada tingkat keterancaman pada masing-masing objek tersebut. Objek cagar budaya yang tingkat keterancamannya rendah, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait nilai penting cagar budaya objek tersebut. Bentuk kegiatan tersebut yaitu:

- a. Sosialisasi dan Publikasi mengenai cagar budaya dan objek cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bantaeng;

- b. Penerbitan buku terkait Cagar Budaya Kabupaten Bantaeng;

- c. Pemasangan Papan Bicara di masing-masing objek Cagar Budaya dan pemberian sertifikat status cagar budaya pada masing-masing pemilik cagar budaya;

- d. Pengalokasian anggaran rutin pemeliharaan Cagar Budaya;

- e. Pemberian insentif, kompensasi, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada pelestarian Cagar Budaya Bantaeng;

Perlu adanya penempatan Juru Pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya sebagaimana diatur dalam Ayat 5 Pasal 76 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Adapun tindakan penyelamatan yang perlu dilakukan terhadap objek yang termasuk dalam kategori tingkat keterancaman sedang yaitu;

- a. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantaeng segera melakukan kajian terhadap masing-masing objek untuk direkomendasikan kepada Bupati guna ditetapkan status dan peringkatnya sebagai Cagar Budaya Kabupaten Bantaeng;

- b. Perlu dilaksanakan studi teknis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemugaran ataupun bentuk pelestarian lainnya yang dibutuhkan;

- c. Perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan publikasi tentang Cagar Budaya Bantaeng dan pentingnya pelestarian kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan tindakan penyelamatan yang perlu dilakukan terhadap objek yang termasuk dalam kategori tingkat keterancaman tinggi yaitu;

- a. Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten Bantaeng segera melakukan pencatatan pada registrasi nasional objek pendaftaran cagar budaya;
- b. Perlu dilaksanakan studi teknis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemugaran ataupun bentuk pelestarian lainnya yang dibutuhkan;
- c. Perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan publikasi tentang Cagar Budaya Bantaeng dan pentingnya pelestarian kepada seluruh lapisan masyarakat;
- d. Perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- e. Perlu dilakukan pemugaran sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kawasan Cagar Budaya Kota Lama Bantaeng

Kriteria kawasan cagar budaya mengacu pada peraturan perundangan adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Mengacu pada kriteria tersebut maka Kota Lama Bantaeng jelas memenuhi kriteria sebagai Kawasan Cagar Budaya, berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- Di kawasan ini masih terdapat tinggalan dari periode kolonial baik berupa bangunan maupun struktur yang merupakan satu kesatuan tata ruang yang khas;
- Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Bantaeng telah memulai upaya pelestarian Kawasan ini dengan melakukan pendaftaran dan penetapan status cagar budaya pada beberapa bangunan tinggalan kolonial di Kawasan ini.

Data terbaru dari hasil survei penyelamatan BPCB Prov. Sulsel, akhir Januari 2021 semakin mempertegas pentingnya Kota Lama Bantaeng sebagai Kawasan yang memiliki nilai penting dan arti khusus terkait identitas dan sejarah Bantaeng. Dengan demikian upaya pelestarian tinggalan kolonial di kawasan ini harus dilakukan dalam kerangka pelestarian kawasan cagar budaya, bukan pelestarian perbangunan maupun struktur cagar budaya. Salah satu langkah pelestarian dalam konteks kawasan ini yaitu berupa revitalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 – 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya. Revitalisasi sebagai upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kawasan yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan revitalisasi yang mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi, dan citra tempat).

Kawasan Cagar Budaya Kota Lama Bantaeng ini terdiri dari bangunan dan struktur cagar budaya yang dari usianya berasal dari rentang waktu akhir abad 19 – pertengahan abad 20 Masehi. Berdasarkan aspek fungsi meliputi bangunan pemerintahan, sarana militer, kesehatan, pendidikan, agama, dan fasilitas sosial. Keberadaan masing-masing objek cagar budaya di kawasan ini merupakan satu kesatuan yang merefleksikan pentingnya wilayah Bantaeng sehingga Pemerintah Hindia Belanda menjadikan kota ini sebagai afdeling dan membangun berbagai sarana dan prasarana kota. Kondisi dari masing-masing objek cagar budaya di kawasan ini berbeda-beda, sehingga perlu penanganan yang disesuaikan dengan kondisi setiap objek tersebut. Adapun dalam kerangka satu kesatuan ruang geografis,



Foto Bangunan Kantor Pos Lama yang saat ini kondisinya terlantar sehingga banyak bagian pada bangunan ini yang telah mengalami kerusakan

Kawasan Kota Lama Bantaeng memang perlu di revitalisasi sebagai bentuk pelestariannya. Revitalisasi di kawasan ini ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting dari cagar budaya Kota Lama Bantaeng dengan penyesuaian baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat jika Cagar budaya yang dimaksud sudah tidak sesuai dengan sebagaimana bentuk dan fungsi aslinya akan dapat bertentangan dengan prinsip pelestarian dan kebudayaan, juga berpotensi menciptakan nilai-nilai baru yang tidak seharusnya. Nilai baru tersebut juga dapat menghilangkan nilai asli yang dimiliki cagar budaya tersebut. Revitalisasi pada kawasan cagar budaya Kota Lama Bantaeng dapat berguna untuk memunculkan potensinya dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lansekap budaya asli yang tentunya harus dilakukan berdasarkan kajian. Revitalisasi ini dilakukan dengan menata

kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya, sebagaimana tercantum dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pada pasal 80 ayat (1) dan (2)*. Mengikuti prinsip pengembangan pada umumnya, revitalisasi harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam Revitalisasi Kota Lama Bantaeng yang menjadi landasan utama untuk dapat dilakukan revitalisasi adalah kesiapan dari setiap tinggalan kolonial yang merupakan cagar budaya itu sendiri untuk direvitalisasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan penanganan dan pengamatan terhadap kesiapannya, jika belum siap maka akan dilakukan tahap pendahuluan, seperti konservasi atau pemugaran jika diperlukan.

Kegiatan konservasi pada bangunan maupun struktur cagar budaya di Kawasan Kota Lama Bantaeng bisa berbentuk preservasi dan pada saat yang sama melakukan pembangunan atau

pengembangan, restorasi, replikasi, reskontruksi, revitalisasi dan atau penggunaan untuk fungsi baru suatu aset masa lalu. Untuk melakukannya perlu upaya lintas sektoral, multidimensi dan disiplin serta berkelanjutan. Kegiatan revitalisasi dapat dilakukan dari aspek keunikan lokasi dan tempat bersejarah. Demikian juga, revitalisasi juga dilakukan dalam rangka untuk mengubah citra suatu kawasan.

Bangunan maupun struktur cagar budaya di kawasan Kota Lama Bantaeng, dalam tindakan revitalisasi membutuhkan suatu kajian fisik. Kajian fisik ini yang dimaksud ialah mempelajari tentang fisik yang terlihat maupun yang memiliki makna sosial di dalam daerah tertentu, fungsinya, sejarah, atau bahkan dari namanya. Hal ini akan mengulas tentang persoalan bentuk yang terlihat dan diambil bahwa dalam bentuk desain yang sebenarnya harus digunakan untuk memperkuat makna dan tidak meniadakan sesuatu makna yang sudah ada sebelumnya. Revitalisasi pada bangunan atau struktur di kawasan ini akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*), jadi bukan sekedar membuat *beautiful place*. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*) Bantaeng khususnya. Kegiatan perancangan dan pembangunan Kawasan Cagar Budaya Kota Lama Bantaeng harus ditujukan untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi dilakukan melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal seperti intervensi fisik,

Rehabilitasi ekonomi dan Revitalisasi sosial/institusional. Intervensi Fisik erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (*urban realm*). Isu lingkungan (*environmental sustainability*) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Intinya bahwa dalam revitalisasi cagar budaya, perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

Adapun rehabilitasi ekonomi merupakan upaya mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan cagar budaya. Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (*vitalitas baru*). Hal ini karena pada dasarnya revitalisasi merupakan tata cara pengelolaan atau penanganan terhadap cagar budaya secara jangka panjang. Mulai dari permasalahan keterawatan hingga pemanfaatan yang memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Selain itu, diperoleh data-data dampak potensial terhadap pengembangan (adaptasi dan revitalisasi) sebuah Cagar Budaya sehingga diperoleh rekomendasi agar setiap upaya pengembangan Cagar Budaya dapat terkendali dan sesuai aturan Undang-Undang.

Penutup

Keberadaan tinggalan budaya dari periode pemerintahan Afdeling Bonthain di Kawasan Kota Lama Bantaeng merupakan potensi yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Pengembangan dan pemanfaatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan pelestarian cagar budaya. Salah satunya yaitu segera melakukan proses perlindungan melalui pendaftaran dan penetapan status sebagai cagar budaya, mengingat masih banyak tinggalan budaya dari periode ini yang belum ditetapkan padahal memenuhi kriteria sebagai cagar budaya.

Selain itu, mengacu pada faktor dan tingkat keterancaman, diperlukan tindakan penyelamatan baik berupa pemugaran, revitalisasi atau adaptasi, yang harus diawali dengan studi teknis dan studi kelayakan untuk panduan dalam menentukan tindakan penyelamatan yang tepat. Dalam prosesnya tersebut perlu kajian untuk memperkuat analisis nilai penting sebagai cagar budaya. Keseluruh objek tinggalan dari periode Afdeling Bonthain ini merupakan satu kesatuan yang dapat menjadi dasar dalam mengembangkan konsep revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kota Lama Bantaeng sebagai salah satu model pelestarian kawasan cagar budaya.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. (2019). Berre' ri Sulawesi Maniang: dari Produksi, Perdagangan, Pelayaran, hingga Penyelundupan Beras (1946-1956). *Jurnal Pangadereng*, 15(1), 141–161. <https://doi.org/10.36869/v5i1.6>
- Bougas, Wayne A. 1998. “Bantayan: An Early Makassarese Kingdom, 1200-1600 A.D” in *Achipel, Année 1998, Volume 55, Numéro 1 p. 83-123*. Paris.
- Cortesao, Armando. 1944. *Suma Oriental: Karya Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina dan Buku Francisco Rodrigues*. Edisi Terjemahan (2015) dari Judul Asli: *The Suma Oriental of Tome Pires An Account of The East, From The Sea to China and The Book of Francisco Rodrigues*. Penerjemah: Adrian Perkasa dan Anggita Pramesti. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Fadillah, Moh. Ali. dan Mahmud, M. Irfan. 2000. *Kerajaan Siang Kuna: Sumber T tutur, Teks, dan Tapak Arkeologi*. Makassar: Balai Arkeologi Makassar dan Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin
- Hasrianti, & Mansyur, S. (2020). The Dutch Colonial Trail Northeast of Bonthain Bay. *WALENNAE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan Dan Tenggara*, 18(1), 13-26. <https://doi.org/10.24832/wln.v18i1.407>
- Mahmud, M. Irfan., dkk. 2007. Bantaeng: *Masa Prasejarah ke Masa Islam*. Makassar: Masagena Press.
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis. Edisi Terjemahan (1996) dari judul asli “The Bugis”*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. Penerjemah: Abdul Rahman Abu, Hasriadi, Nurhady Sirimorok. Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO
- Suryatman, nfn (2017) “Artefak Litik di Kawasan Prasejarah Batu Ejaaya: Teknologi Peralatan Toalian di Pesisir Sulawesi Selatan”, *WALENNAE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara*, 15(1), pp. 1-18. doi: 10.24832/wln.v15i1.2
- Yadi Mulyadi. 2009. “Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Budaya Terpadu dan Kawasan Strategis Konservasi Warisan Budaya di Kota Makassar” dalam *Jurnal Lensa Budaya* Volume 3 No. 4 tahun 2009.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan

Salam Budaya!

Selamat datang, terima kasih atas kunjungan Anda di layanan PPID Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan. Laman ini merupakan sarana informasi secara daring sebagai wujud dalam memenuhi keterbukaan dan hak informasi publik di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.



PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Andini Perdana

Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Sulawesi Selatan

Keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Hal ini bertujuan untuk mencapai penguatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dinyatakan bahwa pelayanan publik di Indonesia belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan bangsa berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi

ketahanan nasional. Informasi publik merupakan hak asasi manusia, sehingga diperlukan keterbukaan informasi sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.



Foto 1 Tampak Depan Ruang Pelayanan Publik BPCB Prov Sulsel

Pentingnya keterbukaan informasi membuat pemerintah membentuk komisi informasi. Komisi tersebut adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi informasi terdiri atas komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi kabupaten/kota.

Salah satu Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pelayanan publik di Sulawesi Selatan adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan (selanjutnya disingkat BPCB Sulsel). BPCB Sulsel merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bidang pelestarian cagar budaya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 173/O/2021 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya, tugas BPCB adalah melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang berada di wilayah kerjanya. Wilayah kerja BPCB Sulsel mencakup tiga provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

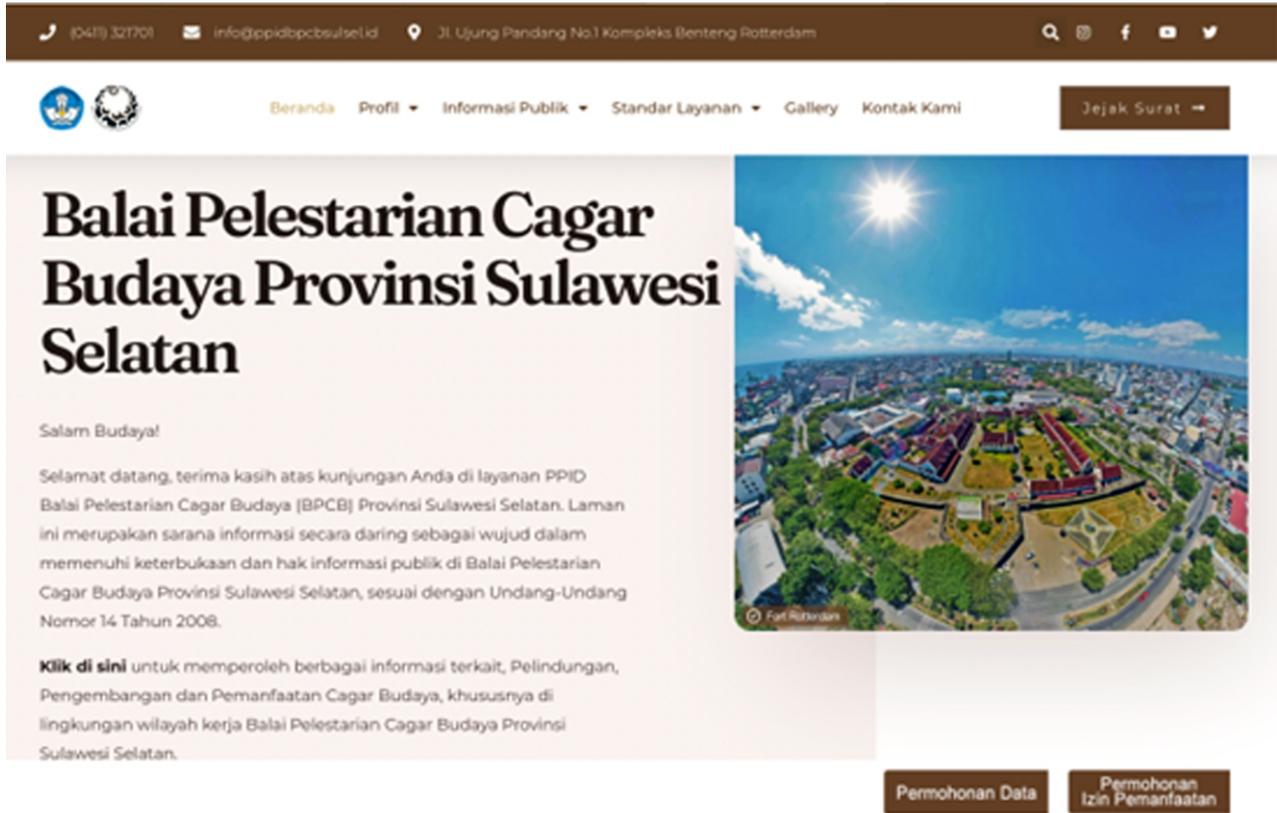
Dalam Keputusan Menteri tersebut juga diamanatkan salah satu rincian tugas BPCB adalah melaksanakan pelayanan perijinan dan pengendalian perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; serta melaksanakan pemberian layanan teknis pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya. Oleh karenanya, terdapat sebuah kelompok kerja yang dibentuk untuk memberikan layanan

kepada lembaga, institusi, komunitas, dan setiap orang yang hendak memanfaatkan Cagar Budaya di wilayah kerja BPCB Sulsel. Permohonan pelayanan dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi ruang pelayanan publik dan juga secara online dengan membuka website bpcb.

Sebagai upaya untuk pemenuhan hak setiap warga negara untuk mengakses informasi publik terkait cagar budaya yang dilestarikan, BPCB Sulsel membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disingkat PPID). Salah satu tugasnya adalah mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di BPCB Sulsel serta memberikan pelayanan pemanfaatan, berupa kunjungan, penelitian, pengambilan gambar/video, pemakaian ruang, dan permintaan data.

Selain itu, juga dilakukan penyampaian informasi kepada publik melalui website dan media sosial BPCB Sulsel. Informasi yang disampaikan pada website berupa profil BPCB Sulsel, profil PPID, daftar informasi publik, standar layanan, galeri, dan kontak kami. Sementara pada media sosial disampaikan berbagai kegiatan dan situs yang berada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Keterbukaan informasi di BPCB Sulsel dapat dikatakan telah sesuai dengan amanat UU No. 14/2008 tentang KIP. Sehingga kedepannya BPCB Sulsel dapat dinominasikan untuk mendapatkan penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik. Tulisan ini akan membahas tentang profil BPCB Sulsel terkait dengan keterbukaan informasi, penganugerahan keterbukaan informasi badan publik, Penilaian Predikat Keterbukaan Informasi Badan Publik pada BPCB Sulsel oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dan pentingnya predikat Keterbukaan Informasi Badan Publik pada BPCB Sulsel.



Gambar 1 Tangkapan layar halaman awal website BPCB Sulsel (sumber: <https://bpcbsulsel.id>)

Keterbukaan Informasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. BPCB Sulsel dibentuk pada 14 Juni 1913 ini terus berkembang menjadi lebih baik, salah satunya dengan memberikan pelayanan kepada publik. Tujuannya untuk mewujudkan visi peningkatan perlindungan dan apresiasi cagar budaya di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Visi tersebut dicapai dengan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat cagar budaya.

Keterbukaan informasi publik di BPCB Sulsel dimulai pada tahun 2012, ketika pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (saat ini Kemendikbudristek) mulai membentuk website khusus untuk kebudayaan, yaitu <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>.

Website yang masih dapat diakses hingga kini, kemudian berkembang menjadi media publikasi berbagai informasi pada Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Unit Pelaksana Teknisnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada website ini BPCB Sulsel menginformasikan tentang BPCB Sulsel, saking, zona integritas, ketatalaksanaan kepegawaian, pelayanan publik, dan terbitan.



Gambar 2 Tangkapan layar website kebudayaan kemendikbud berada BPCB Sulsel



Gambar 3 Tangkapan layar prosedur permohonan data dan izin pemanfaatan cagar budaya pada Media Sosial BPCB Sulsei (sumber IG@bpcbsulsei).

Pada tahun 2015, BPCB Sulsei membuat akun pada media sosial dengan akun *@bpcb_sulsei* untuk mempublikasikan berbagai cagar budaya yang dilestarikan dan kegiatan yang dilaksanakan. Media sosial dipilih sebagai salah satu media publikasi sekaligus media komunikasi dengan berbagai pihak. Selain itu, melalui media sosial BPCB juga terus mengajak masyarakat untuk turut serta dalam melestarikan cagar budaya. Pada media sosial juga diinformasikan cara mudah permohonan data dan izin pemanfaatan cagar budaya di BPCB Sulsei.

Pada tahun 2021, BPCB Sulsei telah memiliki website tersendiri, yaitu website <https://bpcbsulsei.id>. Berbeda dengan website yang menginduk pada kebudayaan kemendikbud, website ini bersifat lebih lengkap dan interaktif sehingga lebih mudah digunakan.

Pada website ini juga pengguna dapat langsung mengajukan permohonan izin, baik kunjungan, peminjaman ruang, akses data, dan penelitian. Selain itu juga terdapat fitur virtual tour di beberapa situs yang membuat pengunjung dapat menjelajah tanpa berkunjung langsung.

Informasi publik yang disampaikan BPCB Sulsei pada websitenya adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah. Sementara informasi detail terkait situs tertentu dapat diakses tanpa biaya dengan mengajukan permohonan ijin akses. Sementara untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum hanya dapat diberikan setelah pengujian tentang konsekuensi yang timbul. Hal ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Adapun informasi yang disampaikan dalam website BPCB Sulsel (<https://bpcbsulsel.id>), adalah sebagai berikut :

1. Beranda berisi informasi selamat datang dan menu pilihan pada website, jejak surat pemanfaatan, nomor telepon, alamat email, jelajah virtual cagar budaya, dan link media sosial BPCB Sulsel.
2. Profil BPCB Sulsel berisi informasi sejarah, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, profil pimpinan, struktur organisasi, dan pegawai BPCB Sulsel;
3. Profil PPID yang susunan organisasinya disesuaikan dengan aturan perundangan;
4. Informasi publik, yang berisi tentang :
 - a. Daftar informasi publik, berupa *release* dan berita;
 - b. Informasi berkala, berupa laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip), laporan rekap pengguna, prosedur memperoleh informasi publik, prosedur memperoleh keberatan, dan informasi jumlah kunjungan.
 - c. Informasi serta merta, berupa database, cagar budaya yang bisa dikunjungi, serta laporan kegiatan;
 - d. Informasi setiap saat, berupa UU No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UU No.5 tahun 2019, OTK BPCB, Permen, bulletin dan buku, serta *leaflet*.
5. Standar layanan, berupa maklumat pelayanan, biaya, prosedur permohonan informasi, prosedur penyelesaian sengketa, pengaduan masyarakat, dan *Whistle Blower System*
6. Galeri yang berisi tentang foto situs yang dikelola BPCB dan *Virtual Reality*;
7. Kontak kami yang berisi nomor telepon dan email BPCB;
8. Fitur lainnya berisi tentang permohonan data, permohonan izin pemanfaatan, dan jejak surat.
Melalui fitur jejak surat pengguna dapat mengunggah surat ijin permohonan data dan pemanfaatan berupa kunjungan, penelitian, gambar dan video, peminjaman Barang Milik Negara, dan pemanfaatan lainnya.

Pada tahun 2021 pula, melalui Surat Keputusan Kepala BPCB Sulsel Nomor 0302/F7.1/KP/2021 dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPCB Sulsel, yang strukturnya terdiri dari Atasan PPID, koordinator, sekretaris, dan anggota. Adapun tugas dan tanggung jawab PPID tersebut adalah:

1. Mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di BPCB Sulsel;
2. Menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik BPCB Sulsel yang bersifat terbuka;
3. Mengusulkan informasi yang akan dikecualikan kepada PPID Kementerian untuk dilakukan uji konsekuensi; dan
4. Menyelesaikan sengketa informasi publik BPCB Sulsel.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi tergantung pada kemampuan PPID dalam menyediakan, mengelola, dan menyebarkan informasi publik. PPID bahkan disebut sebagai agen transformasi agar terwujudnya informasi yang lebih cepat, tepat, akurat, dan terpercaya dalam memfasilitasi kebutuhan publik (Budhirianto, Syarif. 2014: 47-8).

Keterbukaan Informasi Badan Publik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,

dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sementara badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik, kecuali yang bersifat ketat dan terbatas. Informasi yang tidak dapat diakses tersebut adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Sementara keterbukaan informasi sendiri dapat didefinisikan sebagai: *information disclosure is that listed companies publish the information or data which describes their business position, management situation and the audit report to supervisory bodies, stock exchanges and the general public. It may be done according to legislation, regulatory rules or voluntarily.* Pendapat ini dapat diartikan bahwa keterbukaan informasi adalah daftar informasi atau data perusahaan yang dapat dipublikasikan, menggambarkan posisi bisnis mereka, situasi manajemen dan laporan audit kepada badan pengawas, bursa efek dan masyarakat umum. Ini dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang, aturan peraturan atau secara sukarela (Jing, 2014: 14).

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dikatakan bahwa badan publik diberikan peringkat. Pemeringkatan yang dimaksud adalah evaluasi akhir terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik sesuai dengan kategori masing-masing. Metode dan Teknik Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik meliputi berbagai alur dan tahapan kegiatan yang mencakup petunjuk umum, instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*), teknik penilaian, bobot penilaian, dan tata cara pemeringkatan badan publik.

Adapun indikator penilaian pada termin 1 (satu) atau 2 (dua), adalah :

1. Mengumumkan informasi publik;
2. Menyediakan informasi publik;
3. Pelayanan permohonan informasi publik, dan
4. Pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik.

Dalam penilaiannya pada alur kegiatan visitasi, digunakan 5 (lima) indikator penilaian yang terdiri atas komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi; dan konsistensi. Pada termin 1 (satu) atau 2 (dua), dilakukan;

1. Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self-Assessment Questionnaire*) oleh Badan Publik;
2. Verifikasi Tim Penilai atas Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self-Assessment Questionnaire*); dan
3. Verifikasi Lanjutan Acak.

Penilaian Predikat Keterbukaan Informasi Badan Publik pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut penulis, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan dapat

menerima Predikat sebagai Badan yang melakukan Keterbukaan Informasi Badan Publik. Hal ini didasarkan pada penilaian yang sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Adapun penilaian sederhana tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel Kriteria Keterbukaan Informasi Badan Publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan

No	Atribut		Pelaksanaan		Keterangan
			Ya	Tdk	
1	Kewajiban Badan Publik	Menetapkan standar layanan	√		Terdapat pada website dan terdiri dari maklumat layanan, biaya, prosedur permohonan informasi, prosedur penyelesaian sengketa
		Menunjuk dan menetapkan PPID	√		Terdapat pada website dan terdiri dari atasan PPID, koordinator, sekretaris, dan anggota
		Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik	√		Daftar informasi publik dimutakhirkan setiap 3 (tiga) bulan.
		Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik	√		Sarana dan prasarana layanan secara elektronik melalui website sedangkan non elektronik melalui pelayanan langsung di ruang pelayanan publik, Gedung B, Benteng Rotterdam
		Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;	√		Informasi biaya terdapat pada website dan tersedia offline di ruang pelayanan publik.
		Menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;	√		Pembiayaan APBN melalui DIPA BPCB Sulsel
		Membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;	√		Terdapat pada website, khususnya pada laporan rekap pengguna
		Menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan		√	Belum dilakukan
		Melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya;	√		Monitoring, evaluasi dilakukan oleh kelompok Kerja pelayanan publik
2	Kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi	Atasan PPID	√		Dijabat oleh Kepala BPCB Sulsel
		PPID	√		Dijabat oleh Kasubag Tata Usaha dan Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Publik.
		PPID Pelaksana	√		Dijabat oleh beberapa pegawai BPCB Sulsel
		Tim Pertimbangan dan/atau		√	Belum dilakukan
		Petugas Pelayanan Informasi Publik.	√		Dilaksanakan oleh operator pelayanan publik

3	Informasi yang dibuka	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	√		berupa laporan Sakip, laporan rekap pengguna, prosedur memperoleh informasi publik, prosedur memperoleh keberatan, dan informasi jumlah kunjungan.
		Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan/atau	√		berupa database, cagar budaya yang bisa dikunjungi, serta laporan kegiatan
		Informasi yang wajib tersedia setiap saat	√		berupa UU No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UU No.5 tahun 2019, OTK BPCB, Permen, serta bulletin dan buku.
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;		Informasi tentang profil Badan Publik	√		Terdapat pada website, yaitu profil BPCB Sulsel
		Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik	√		Terdapat pada website, yaitu profil BPCB Sulsel
		Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik	√		Terdapat pada laporan sakip
		Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit		-	Belum tersedia
		Ringkasan laporan akses Informasi Publik	√		Terdapat pada website khususnya dalam laporan rekap pengguna
		Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik	√		Terdapat pada website
		Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;	√		Terdapat pada website terkait cara mudah memperoleh akses data
		Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik	√		Terdapat pada website, terkait WBS dan prosedur memperoleh keberatan.
		Informasi tentang pengadaan barang dan jasa		√	Belum tersedia
		Informasi tentang ketenagakerjaan	√		Terdapat pada laporan kepegawaian
	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik		√	Belum tersedia	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa beberapa persyaratan keterbukaan informasi badan publik telah dilaksanakan oleh BPCB Sulsel melalui website dan media sosialnya. Dengan kata lain bahwa BPCB Sulsel dapat menerima penganugerahan keterbukaan informasi badan publik. Untuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik, yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif, ditentukan oleh Tim Penilai.

Pentingnya Predikat Keterbukaan Informasi Badan Publik pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan

Penganugerahan keterbukaan informasi badan publik sangat penting artinya bagi BPCB Sulsel. Dengan alasan:

1. Bukti penting didalam pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel telah diterapkan di BPCB Sulsel.

Dengan adanya Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik, dapat dikatakan bahwa BPCB Sulsel telah menerapkan pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat pada banyaknya informasi terkait cagar budaya yang dikelola dan juga kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

2. BPCB Sulsel telah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), karena telah melakukan keterbukaan informasi publik
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Salah satu area perubahan yang diharapkan adalah adanya keterbukaan informasi pada publik.
3. BPCB Sulsel telah menjalankan amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik
4. Kepercayaan masyarakat semakin meningkat

Dengan adanya pelayanan dan keterbukaan informasi publik di BPCB Sulsel tentunya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dari setiap kegiatan kantor dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang dipublikasikan akan menambah kepercayaan masyarakat.

5. Momentum bagi BPCB Sulsel untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan publik
Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dikatakan bahwa badan publik diberikan peringkat yang diperoleh dari pelaksanaan keterbukaan informasi bagi Badan Publik sesuai dengan kategori masing-masing. Adapun kategorinya adalah informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Penetapan pemeringkatan tersebut akan memotivasi BPCB Sulsel untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan.
6. Mendorong partisipasi masyarakat
Dengan keterbukaan informasi terkait pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang dilakukan BPCB Sulsel, maka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, pengelolaan cagar budaya, dan pelestarian cagar budaya.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. 2017. Profi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar: BPCB Sulsel.

Budhirianto, Syarif. 2014. "PPID dan Transfer Informasi dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat dalam Pengelolaan Informasi di Era Keterbukaan Informasi Vol. 12, Nomor 1, Tahun 2014. Bandung: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung.

Bian, Jing.2014. *China's Securities Market : Towards Efficient Regulation*. United Kingdom: Taylor & Francis Group.

Febriaaningsih, Nunuk. 2012. "Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka menuju tata Pemerintahan yang Baik" dalam *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1 Nomor 1, April 2012. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham.

Aturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 173/O/2021 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya

Sumber Digital

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. 2022. Beranda. Diakses pada <https://bpcbsulsel.id>. tanggal 26 Mei 2022 pukul 14.20 Wita.

Direktorat Jenderal Kebudayaan. 2022. Beranda. Diakses pada <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/> tanggal 26 Mei 2022 pukul 14.20 Wita.

@bpcbsulsel. 2022. <http://instagram.com/bpcbsulsel/>



PERILAKU PENGUNJUNG PADA KOMPLEKS MAKAM RAJA-RAJA LAMURU KABUPATEN BONE, PROV. SULAWESI SELATAN

Dewi Susanti, SS., M.A.

Pamong Budaya Ahli Muda,

Balai Pelestarian Cagar Budaya Prov. Sulawesi Selatan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru merupakan salah satu Objek arkeologi yang ada di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi situs ini berada dalam wilayah Kelurahan Lalebata, Kecamatan Lamuru, dan terletak dalam apitan sungai Soloreng dan sungai Cerekko tepatnya di sebelah barat Kabupaten Bone. Secara administratif, kelurahan Lalebata terletak pada batas-batas wilayah yaitu; sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sengging Palie, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan perwakilan Bengo, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Poleonro, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mattampa Bulu. Topografi permukaan wilayah Lalebata sebagian besar dataran rendah yaitu berada pada 200 m di atas permukaan laut, maka daerah ini dikelilingi beberapa sungai seperti sungai Walanna'E di timur, Lekoballo di selatan

dan Soloreng di utara. Keberadaan sungai-sungai tersebut sangat bermanfaat bagi penduduk setempat karena airnya dimanfaatkan sebagai sumber irigasi persawahan seperti Sungai Lekoballo, Cirekko, dan Sungai Soloreng. Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru ini berada tepat di pusat pemerintahan baik pemerintahan kelurahan maupun pemerintahan kecamatan. Perlu pula dijelaskan bahwa kelurahan Lalebata juga merupakan Ibukota Kecamatan Lamuru sehingga aktivitas sosial kemasyarakatan terpusat di tempat ini.

Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru merupakan salah satu situs terpenting yang terdapat di Kabupaten Bone sehingga sampai saat ini tetap dijaga dan lindungi kelestariannya. Upaya pelestarian terhadap Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru sudah mulai dilakukan, sejak pertama ditemukan. Salah satu upaya itu berupa pemugaran yang mulai dilakukan pada tahun 1984 sampai tahun 1985. Pemugaran ini dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya

Provinsi Sulawesi Selatan. Seiring dengan perkembangan waktu dan pelaksanaan pemugaran telah selesai maka upaya pelestarian tetap dilanjutkan di Kompleks Makam ini tetapi disisi lain aktivitas masyarakat untuk melakukan ziarah mulai berjalan. Mengingat bahwa yang di makamkan dalam Kompleks makam pada umumnya adalah Raja-Raja dan keturunannya. Upaya pelestarian yang dilakukan setelah pasca pemugaran adalah penempatan juru pelihara, pemagaran, zonasi, penataan lingkungan, kajian konservasi, dan konservasi. Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru ini telah di buka untuk umum yang bukan hanya diperuntukkan untuk wisata ziarah tapi juga untuk kepentingan Pendidikan dan terbuka untuk masyarakat umum.



Gambar 1.
Kondisi Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru

Seiring dengan pemanfaatan Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru sebagai objek wisata religi, dampak positif dan negatif kemudian muncul sebagai dampak dari pemanfaatan yang telah

dilakukan. Dampak positif yang ditimbulkan dari pemanfaatan objek ini sebagai wisata ziarah adalah terbuka peluang usaha untuk mencari tambahan pendapatan bagi masyarakat sekitar, seperti tersedianya warung-warung pedagang kaki lima yang menyediakan berbagai minuman dan makanan ringan bagi pengunjung yang datang ke lokasi tersebut. Disisi lain dampak negatif yang muncul akibat pemanfaatan yang dilakukan di lokasi ini adalah potensi kerusakan dan pelapukan pada batuan makam semakin tinggi, stabilitas makam akibat beban dari pengunjung yang tidak teratur dan biasanya terkumpul pada satu sisi jirat makam, serta tingkat vandalisme pada bangunan makam semakin tinggi seperti memanjat dinding (jirat) makam, mencoret batuan makam, membuang sampah disekitar makam, dan bahkan pada makam itu sendiri.

Mengacu dari referensi pada buku *World Heritage Manuals No. 1, Managing Tourism at World Heritage Site: A Practical Manual for World Heritage Site Managers* yang ditulis oleh Arthur Pedersen, menyebutkan bahwa untuk keperluan pengaturan, keberadaan klasifikasi, dan analisis mengenai pengunjung menurut preferensi dan perilaku mereka akan sangat berguna. Dari hasil analisis perilaku pengunjung inilah kemudian hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun **Visitor Management**. Berdasarkan referensi diatas dan dengan melihat potensi yang terjadi di Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru maka penulis tertarik melakukan penelitian sederhana dan mencoba menyajikan data dalam bentuk artikel.

2. Permasalahan

- Bagaimana bentuk perilaku pengunjung pada Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru?
- Bagaimana tingkat apresiasi pengunjung terhadap Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru?

- c. Bagaimana bentuk visitor management yang bisa diterapkan pada Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru?

3. Tujuan

- a. Mengetahui perilaku pengunjung pada saat berada pada Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru
- b. Mengetahui tingkat apresiasi pengunjung terhadap Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru
- c. Membuat model visitor management yang bisa digunakan pada Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru.

4. Metode

Metode adalah salah satu cara kerja yang dilakukan agar dapat memahami kondisi objek yang menjadi sasaran dalam sebuah penelitian. Untuk memecahkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penulisan dan pengumpulan data, metode yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah penalaran yang dimulai dari kajian fakta yang bersifat umum kemudian disimpulkan. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data dan klasifikasi data yang terkait dengan objek kajian, kemudian data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dibuat sebuah kesimpulan yang sifatnya khusus. Metode yang digunakan dalam tulisan dan kajian ini berupa pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder, serta pengolahan data.

a. Pengumpulan Data

1) Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu berupa pengumpulan data atau informasi dengan cara pengamatan langsung kondisi yang terjadi di lapangan mengenai pola kunjungan pada Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru dan melakukan wawancara langsung kepada para

pengunjung untuk mengetahui tujuan dan motivasi mereka. Untuk memudahkan dalam kajian ini maka ada dua teknik pengambilan sampel terhadap pengunjung yaitu dengan cara *random sampling* dan *non random sampling*. Pada kegiatan pengumpulan data saat penelitian untuk penulisan artikel ini maka teknik *random sampling* yang digunakan agar semua pengunjung memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih jadi responden. Metode ini dipilih untuk memperkecil adanya pemilihan responden, dengan mengambil sampel secara acak maka target data yang diinginkan bisa maksimal.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi Pustaka baik berupa buku, jurnal, artikel ataupun hasil penelitian yang telah dilakukan pada objek yang dijadikan kajian dalam penelitian.

3) Pengolahan Data

Data-data yang telah dikumpulkan dilapangan atau data hasil penelusuran pustaka akan di analisis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

B. Pembahasan

1. Data Pengamatan

Data hasil pengamatan yang dikumpulkan selama observasi pada Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru dan pada beberapa pengunjung menunjukkan ada beberapa hal yang berbeda. Dalam pemilihan sampel atau pengamatan ini dilakukan pada tiga hari yang berbeda dan sesuai standar yang telah dibuat yaitu hari-hari puncak keramaian atau kepadatan pengunjung seperti seminggu terakhir sebelum memasuki bulan Ramadhan, hari lebaran idul fitri atau idul adha, dan pasca lebaran, hari biasa serta *weekend*. Klasifikasi ini dilakukan dengan tujuan agar bisa melihat dan mengamati perilaku

pengunjung pada saat melakukan kunjungan di dalam Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru dan durasi waktu yang dibutuhkan dalam setiap kunjungan. Selain itu, klasifikasi yang dilakukan adalah bentuk pengunjung yang datang apakah kelompok atau individu.

Pengamatan yang dilakukan selama beberapa hari pada saat hari-hari biasa, bukan di waktu *weekend* atau hari lebaran terhadap beberapa pengunjung, diperoleh data bahwa dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan pengunjung pada saat melakukan kunjungan di Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru terlihat dan nampak bahwa aktivitas pengunjung sangat bervariasi ada yang positif dan ada negatif. Perilaku positif adalah perilaku yang tidak mempunyai dampak buruk terhadap kelestarian bangunan makam dan lingkungannya, sedangkan perilaku negatif adalah perilaku yang memberikan dampak buruk dan dikhawatirkan akan mengancam kelestarian bangunan makam beserta lingkungannya. Kategori perilaku positif yang dimaksud dalam tulisan ini adalah datang berziarah tetapi tidak naik ke badan makam, mengambil foto makam, foto diri sendiri atau rombongan di sekitar badan makam, duduk pada gazebo atau tempat duduk yang telah disiapkan dalam Kompleks Makam, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, tidak melakukan aktivitas makan dan minum di sekitar badan makam, membaca papan informasi, mengisi buku tamu dan mengikuti aturan-aturan yang dijelaskan oleh petugas, serta memarkir kendaraan pada tempat yang telah disiapkan. Sedangkan kategori perilaku negatif antara lain meliputi duduk di dinding makam (*jirat*), naik dibagian badan makam dan menuangkn air pada tubuh makam, memanjat dinding makam, merokok, makan dan minum, serta buang sampah dimana-mana.

Hasil pengamatan dan pengumpulan data di lapangan diketahui bahwa aktivitas negatif yang terjadi di Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru, yang cukup tinggi dilakukan oleh pengunjung

yang datang secara rombongan dengan tujuan berziarah. Disisi lain, waktu yang dibutuhkan cukup dan termasuk dalam kategori lama, karena waktu yang digunakan minimal 30 menit dan jumlah makam yang mereka kunjungi bukan hanya satu makam tapi biasanya ada beberapa makam, dan objek lain seperti bekas telapak kaki Arung Palakka yang hampir semua pengunjung yang datang ke Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru menjadikan objek tersebut wajib mereka kunjungi. Aktivitas yang dilakukan ketika berada dalam Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru yaitu mulai dari duduk dibagian *jirat* makam, memanjat dan naik diatas makam untuk melakukan ritual siraman, makan dan minum di sekitar badan makam. Aktivitas tersebut tidak hanya di lakukan oleh satu orang dalam setiap rombongan tapi ini biasanya dilakukan oleh minimal 3 orang dalam setiap rombongan. Pengunjung yang datang bersama rombongan akan lebih susah diatur atau diarahkan. Disisi lain yang perlu diketahui bahwa pada Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru ini tidak ada tenaga *guide* yang ada hanya tenaga juru pelestari dan polisi khusus (*polsus*) Cagar Budaya. Pada kondisi lapangan yang terjadi ketika pengunjung rombongan yang datang maka pihak *polsus* dan juru pelestari akan susah untuk mengatur dan pada akhirnya mereka membiarkan pengunjung untuk melakukan aktivitas manjat memanjat pada bagian makam. Kondisi ini sering terjadi pada setiap pengunjung yang datang secara rombongan baik beda tujuan tapi tetap dampak negatif yang ditimbulkan hampir sama. Contoh kasus ketika yang datang rombongan anak sekolah atau mahasiswa yang tujuan mereka datang ke Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru untuk kepentingan Pendidikan tapi aktivitas yang dilakukan sama dengan pengunjung yang tujuannya untuk ziarah.

Untuk pengunjung yang datang dengan jumlah sedikit, misalnya ada yang datang sendiri, dengan pasangan, atau rombongan tapi tujuan mereka hanya untuk jalan-jalan, ambil gambar, selfie, dampak yang ditimbulkan lebih banyak

ke hal-hal positif. Pengunjung dengan tujuan jalan-jalan itu biasanya lebih lama menghabiskan durasi waktu tapi waktu itu digunakan dengan baik seperti mengambil gambar pada setiap makam yang memiliki keunikan tersendiri buat mereka, tetapi mereka tidak menyentuh badan makam atau memanjat makam. Aktivitas lain yang dilakukan adalah mengambil gambar di sekitar lingkungan dan melakukan selfie.

Kunjungan di waktu *weekend*, hari libur lebaran atau hari libur biasa tingkat kunjungan yang terjadi di Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru semakin tinggi. Dengan demikian, kita bisa memperoleh data berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap pengunjung bahwa perilaku negatif pengunjung diwaktu-waktu tersebut juga semakin tinggi. Faktor lain penyebab tingginya perilaku negatif diwaktu-waktu hari libur, karena jumlah petugas yang bertugas disaat waktu-waktu tersebut sangat minim. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya aturan yang dibuat oleh pihak pengelola dalam hal visitor management pengunjung.

Secara keseluruhan berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan perilaku pengunjung yang rombongan atau individu pada saat hari biasa dan hari-hari libur. Perilaku negatif pengunjung pada saat hari biasa mungkin karena kurangnya kesadaran dari pengunjung itu sendiri dan kurangnya pengawasan dari pihak pengelola (juru pelihara dan porsus) yang bertugas pada saat mereka melakukan kunjungan di Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru. Peningkatan perilaku negatif pada saat hari libur seperti hari lebaran idul fitri, idul adha, dan pada saat *weekend* kemungkinan terjadi karena kurangnya pengawasan dari juru pelihara dan porsus dikarenakan rasio jumlah pengunjung dan, jumlah personil juru pelihara serta porsus yang sangat kurang. Dimana kita ketahui bahwa jumlah juru pelihara yang bertugas di Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru hanya ada enam

orang dan satu orang yang bertugas sebagai polisi khusus Cagar Budaya. Kondisi yang terjadi di lapangan biasa tidak ditemukan petugas juru pelihara pada saat *weekend* atau pada saat libur hari-hari besar petugas yang bertugas biasanya hanya satu orang dan biasanya mereka tidak sampai sore. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku pengunjung karena tidak adanya pengawasan dan aturan yang dibuat.



Gambar 2.
Kondisi pengunjung pada saat berziarah

2. Data Wawancara

Wawancara dilakukan kepada sebagian responden yang diamati ketika mereka selesai melakukan kunjungan. Wawancara dilakukan kepada 50 responden. Hal-hal yang ditanyakan antara lain;

- Berapa kali berkunjung ke Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru?
- Motivasi dan tujuan berkunjung?
- Apakah pengunjung mengetahui apakah ada aturan atau fasilitas pendukung yang tersedia di sekitar Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru?

- d) Pengetahuan apa yang mereka dapat setelah berkunjung ke Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru?
- e) Fasilitas apa yang diharapkan pengunjung ketika berkunjung ke Kompleks Makam Raja-raja Lamuru?

Hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pengunjung, diketahui bahwa sebagian besar pengunjung yang datang di Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru telah berkunjung lebih dari satu kali. Motivasi dan tujuan bervariasi mulai dari ingin melakukan ziarah, Pendidikan (*study tour*), penelitian (baik untuk sriksi, tesis, atau peneliti Lembaga pemerintah), berlibur, memberikan pengetahuan kepada anak-anak. Namun hasil yang diperoleh lebih didominasi oleh pengunjung yang memang tujuannya untuk ziarah. Untuk masalah fasilitas yang ada di Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru pada umumnya pengunjung tidak mengetahui apa-apa yang ada di lokasi tersebut. Selain itu pengunjung juga tidak mengetahui aturan-aturan yang ada atau larangan-larangan pada saat mereka berada di dalam lokasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara ini diketahui bahwa tidak adanya fasilitas berupa ruang informasi atau informasi yang dapat diperoleh pengunjung pada saat berkunjung cukup tinggi dampak yang ditimbulkan yaitu pengunjung tidak memperoleh informasi apapun terkait dengan lokasi yang mereka kunjungi, sehingga dengan demikian maka berpengaruh terhadap tingkah laku pengunjung, dimana tingkah laku pengunjung lebih banyak ke hal-hal negatif seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, memanjat badan makam (jirat) bahkan sampai pada puncak makam, melakukan ziarah dengan cara menyiram makam, duduk pada bagian jirat makam, merokok, makan dan minum disekitar makam. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengunjung adalah berdampak negatif langsung terhadap kelestarian Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru. Kurangnya informasi yang diperoleh pengunjung sehingga pengunjung memiliki harapan dan keinginan

biar mereka bisa mendapatkan *leaflet* yang berisi penjelasan singkat mengenai Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru. Selain itu pengunjung juga mengeluh tentang udara panas atau kehujanan pada saat mereka berkunjung ke Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru, sehingga pengunjung ingin ada tambahan gazebo atau ada payung yang disiapkan oleh pengelola.

1. Tingkat Apresiasi Pengunjung

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data serta wawancara di lapangan, diperoleh data bahwa tingkat apresiasi pengunjung berbeda berdasarkan tingkat pendidikan serta tujuan kunjungan. Melihat kondisi di lapangan pada umumnya pengunjung yang datang rata-rata tujuan mereka itu untuk wisata ziarah. Tingkat apresiasi pengunjung sangat minim, hal ini dapat kita lihat dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan perilaku pengunjung yang tidak ada etika atau alur kunjungan pada saat berada dalam Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru. Dari data perilaku, didapatkan berbagai jenis perilaku baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif. Dari pembahasan data di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, tingkat apresiasi pengunjung dapat berbeda ditentukan berdasarkan tujuan kunjungan dan waktu kunjungan, apakah pada saat hari biasa atau hari libur seperti libur lebaran idul fitri, idul adha, atau pada saat *weekend*.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pengunjung yang paling banyak menimbulkan dampak negatif adalah pengunjung yang datang dengan tujuan ziarah dengan jumlah orang lebih banyak dan datang secara rombongan, apalagi ketika mereka datang pada saat hari libur.

2. Visitor Management

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan uraian diatas memberikan kesimpulan bahwa tingkat apresiasi pengunjung terhadap Kompleks

Makam Raja-Raja Lamuru cukup rendah, maka dari itu diperlukan adanya *visitor management* yang dapat meningkatkan apresiasi pengunjung terhadap Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru. Disisi lain juga mampu mengakomodasi ekspektasi yang dipunyai oleh pengunjung ketika mereka mengunjungi Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru.

Adapun *visitor management* Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru dibagi menjadi empat bagian yaitu;

a. Alur pengunjung

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan terhadap alur kunjungan pengunjung dari pintu gerbang menuju ke areal kompleks makam, yang jalur pengunjung hanya satu yaitu pintu masuk sama dengan pintu keluar sehingga pada hari-hari libur pengunjung biasa bertumpuk di pintu gerbang. Sehingga dibutuhkan dan dibuatkan alternative untuk jalur pengunjung yaitu dibedakan antara jalur masuk dan jalur keluar sehingga dengan demikian tidak terjadi penumpukan pengunjung pada saat terjadi kepadatan pengunjung. Sebaiknya pintu masuk dibuat di dekat jalur pengambilan tiket dan pengisian buku tamu dan setelah pintu masuk maka ada petunjuk arah untuk jalur arahan kunjungan kepada pengunjung misalnya dimana kita ketahui bahwa setiap pengunjung yang datang dengan tujuan wisata ziarah pada umumnya pengunjung ada titik-titik ziarah yang wajib mereka datangi seperti makam raja-raja lamuru, bekas telapak kaki arung Palakka, dan biasanya untuk titik selanjutnya di tentukan berdasarkan asal daerah dari pengunjung tersebut. Maka dari itu, sebaiknya dibuatkan jalur kunjungan dan diarahkan sama pihak petugas agar tidak terjadi penumpukan pengunjung pada satu titik dan tujuan lain yang ingin di capai adalah agar pengunjung bisa melihat potensi lain yang ada di Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru. Fasilitas pendukung juga sangat besar pengaruhnya untuk

melakukan pemecahan pengunjung dan bisa membatasi pengunjung untuk ke makam, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan ruang informasi, ruang audio visual, pembagian leaflet, membuat fasilitas pendukung atau areal selfie pada bagian zona pengembangan.

Untuk memudahkan dalam mengarahkan serta mudah dilakukan pengawasan kepada pengunjung yang datang di Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru, sebaiknya pada bagian loket karcis dan pengisian buku tamu petugas yang bertugas harus aktif menjelaskan peraturan-peraturan yang mesti diikuti dan tidak boleh dilakukan selama berada dalam areal Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru. Selain itu, dibagian loket ini petugas juga bisa mengatur atau mengarahkan pengunjung ketika terjadi kepadatan pengunjung, khususnya pengunjung yang ingin melakukan wisata ziarah. Kebijakan lain yang bisa dibuat oleh petugas untuk pengunjung yang ingin berziarah adalah pemberian tanda pada karcis yang dibagikan dan melakukan pembatasan jumlah peziarah yang boleh melakukan penyiraman, tabur bunga, dan naik ke puncak makam, guna untuk mengurangi tingkat kerusakan yang terjadi pada bangunan makam.

b. Fasilitas Pendukung

Fasilitas yang didapat pengunjung pada saat melakukan kunjungan pada Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru yaitu pembagian peta atau denah makam, serta informasi singkat mengenai Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru dan sejarah pemakaman, hal ini dilakukan untuk memudahkan pengunjung dan dapat mempersingkat waktu pada saat kunjungan apabila mereka sudah mengetahui letak-letak makam yang ingin mereka kunjungi.

Fasilitas lain yang bisa diberikan kepada pengunjung adalah harga tiket/ karcis yang dibayar pada bagian loket yang terletak di areal pintu masuk untuk pengunjung kelompok

seperti peziarah, dan pelajar, sudah satu paket dengan juru pelestari yang akan mengantar masuk ke dalam lokasi. Tujuan yang ingin dicapai dengan fasilitas satu paket harga tiket adalah untuk mengawasi aktivitas apa saja yang dilakukan selama berada dalam Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru. Sedangkan untuk pengunjung yang individu yaitu hanya membayar sesuai dengan harga tiket/ karcis masuk saja.

Papan informasi berupa peraturan pengunjung dalam mengunjungi Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru, diletakkan dibagian pintu masuk dan didekat loket. Peraturan tersebut bisa juga dicetak dibagian belakang tiket/ karcis masuk di dalam lokasi.

c. Promosi

Promosi mengenai Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru, lebih fokus pada Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bone. Promosi yang dilakukan bisa dibuat dalam beberapa model yaitu baik melalui media online atau media offline. Promosi yang dilakukan di media online bisa dalam bentuk website, facebook, Instagram, youtube, dan tiktok. Untuk promosi di media offline yaitu bisa dalam bentuk majalah, artikel, bulletin, *leaflet*, dan pameran yang diadakan secara berkala.

d. Pengamanan

Pengamanan yang dilakukan bertujuan untuk melindungi Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru serta memberikan kenyamanan kepada para pengunjung. Pengamanan dilakukan oleh satuan polisi khusus Cagar Budaya, yang telah diberikan pelatihan tentang pengamanan warisan Cagar Budaya dan pelayanan kepada pengunjung. Selain itu, polsus harus memiliki pengetahuan mengenai sejarah Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru, siapa-siapa yang dimakamkan di lokasi tersebut, sejarah mengenai pelestarian yang telah dilakukan pada Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa polsus

adalah petugas yang bersentuhan langsung dengan pengunjung Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru.

C. Penutup

Dari data hasil pengamatan di lapangan mengenai perilaku pengunjung yang dilakukan secara langsung dan juga melalui wawancara terhadap pengunjung yang datang di Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru, dengan tujuan untuk mengetahui motivasi, kesan, serta ekspektasi pengunjung ketika mengunjungi Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru. Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa tingkat apresiasi pengunjung berbeda berdasarkan apa tujuan, latar belakang pendidikan. Sebaliknya, tingkat apresiasi yang rendah dipertunjukkan oleh pengunjung yang datangnya rombongan dengan tujuan untuk ziarah makam, dimana ketika mereka berada di dalam lokasi ada berbagai perilaku negatif yang mereka lakukan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat apresiasi pengunjung terhadap Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru masih cukup rendah apabila dikaitkan dengan kondisi dan tingkah laku pengunjung pada saat berada dalam lokasi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan perilaku pengunjung lebih condong untuk langsung melihat-lihat atau ziarah ke bangunan makam atau ke bekas telapak kaki Arung Palakka. Untuk itu, perlu dibuatkan *visitor management* yang diterapkan pada Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru. Agar dapat mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan seperti menyebarkan alur kunjungan pengunjung, mengurangi perilaku negatif dan memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru.

D. Saran

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas dan juga hasil kesimpulan penelitian yang telah dilakukan di Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru, maka saran yang bisa diusulkan adalah

1. Alur kunjungan yang biasanya langsung ke area Makam, pada bagian pintu tiket diberi pengarah dan petunjuk tentang alur kunjungan yang telah ditetapkan dan diatur oleh pihak pengelola. Hal tersebut dilakukan agar pola alur kunjungan terarah dan tersebar di beberapa titik.
2. Melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan pembatasan pengunjung dengan metode perbedaan warna tiket antara yang tujuannya datang untuk ziarah, jalan-jalan, dan untuk kepentingan pendidikan.
3. Melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas pendukung seperti lahan parkir, toilet, bangku tempat istirahat, gazebo, dan ruang informasi.
4. Menyediakan peta dan brosur secara gratis yang bisa dibagikan kepada pengunjung pada saat berada di loket karcis/ pintu masuk.
5. Memberikan pelatihan kepada juru pelestari dan polsus mengenai apa sih Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru? Bagaimana sejarah? Siapa yang dimakamkan? dan metode penyampaian informasi kepada pengunjung, mengingat bahwa juru pelestari dan polsus adalah petugas yang setiap saat bersentuhan langsung sama pengunjung.
6. Memberikan pendidikan kepada pengunjung mengenai peraturan mengunjungi Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru, dengan cara pembuatan papan informasi yang diletakkan ditempat seperti pintu gerbang/ loket karcis dan di bagian belakang karcis yang dibagikan kepada para pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Laurens, Joyce M. 2005. *Arsitektur dan Perilaku Manusia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Pedersen, Arthur. 2002. *World Heritage Manuals No. 1, Managing Tourism at World Heritage Site: A Practical Manual for World Heritage Site Managers*. Paris: UNESCO World Heritage Center.
- Taufik, M. 2005. *Evaluasi Fasilitas Pendukung Wisata di Jalur Pengunjung Kompleks Candi Borobudur*. Magelang. Studi Penelitian.
- WHC. 2005. *Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention*. Paris: UNESCO World Heritage Center.
- WHC. 2009. *Final Decisions of the 33rd Session of World Heritage Committee*. Seville: UNESCO World Heritage Center.



Olang Mesa dan Landschapesziekenhuis at Madjene sebagai Koleksi Museum

Anggi Purnamasari

Koleksi dalam sebuah museum merupakan aset yang tak ternilai karena dari koleksi merupakan daya tarik dari sebuah museum. Selain daya tarik, koleksi dapat menjadi ciri khas dari sebuah museum. Koleksi bukan sekedar benda, namun merupakan jejak atau bukti keberadaan manusia dalam segala aktivitasnya.

Museum Mandar Majene



Foto 1. Gedung Museum Mandar Majene

Museum Mandar Majene merupakan museum pertama di Sulawesi Barat yang diresmikan pada tanggal 2 Agustus 1989. Pembentukan Yayasan Museum Mandar merupakan cikal bakal dari Museum Mandar. Saat ini museum berlokasi di Jalan Raden Suradi No. 17 Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,

Sulawesi Barat. Saat ini, museum menempati salah satu bangunan kolonial yaitu, *Landschapesziekenhuis at Madjene*.

Penetapan pendirian Museum diawali dengan adanya Seminar Kebudayaan Mandar I (Pertama) di Kabupaten Majene pada Tanggal 2 Agustus 1984. Seminar tersebut diikuti oleh para tokoh masyarakat yang merupakan pemerhati peninggalan purbakala. Pada seminar tersebut, tokoh masyarakat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Majene agar dapat memfasilitasinya.

Salah satu hasil seminar Kebudayaan tersebut menjadi dasar pendirian Museum Mandar. Gagasan pendirian museum disambut baik oleh seluruh peserta seminar, para sejarawan, budayawan, serta oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten segera menindaklanjuti gagasan pendirian Museum yang dijadikan sebagai pusat informasi sekaligus pusat penyimpanan benda-benda bersejarah. Rumah Kediaman Bupati TK. II Majene yang pernah menjadi kantor Pembantu Gubernur Wilayah I dijadikan gedung museum sementara. Saat ini, bangunan tersebut menjadi Rumah Jabatan Wakil Bupati Majene.



Foto 2. Beberapa Koleksi Museum Mandar Majene

Setelah itu, untuk mendukung realisasi pendirian Museum Mandar, dibentuk pula Yayasan Museum Mandar oleh sejumlah sejarawan, budayawan dan tokoh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Yayasan Museum Mandar ini bertujuan untuk mengelola Museum Mandar serta meningkatkan pembangunan dalam bidang pelestarian benda budaya.

Kemudian Yayasan Museum Mandar didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 171, tanggal 21 Desember 1984 Oleh Sistske Limowa, SH dan PPAT Kodya Ujung Pandang dengan menempati lokasi sementara Ruang Kelas SD Inpres No.57 Tangnga-Tangnga Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Setelah dikelola yayasan, pada tahun 1989, pengelolaan Museum Mandar diambil alih oleh Pemerintah Daerah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majenre Nomor : 142/HK-Kpts/IX/1989 bahwa status Museum Mandar berubah dari Status Swasta (Yayasan) menjadi Status Pemerintah Kabupaten Majene. Sejak saat itu, Museum Mandar sudah resmi menjadi milik Pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pada Tahun yang sama lokasi Museum Mandar dipindahkan ke bangunan yang saat ini, yaitu bangunan yang pernah digunakan Rumah Sakit Lama Majene.

Apa yang Masyarakat Inginkan?

Museum tidak dapat terlepas dari koleksi, karena koleksi merupakan unsur terpenting

dalam museum. Dalam perkembangannya, koleksi pun dihadirkan dengan metode yang berbeda dari masa ke masa. Sejak abad 17 diawali dengan kemunculan *cabinet of curiosity* dimana benda-benda dikumpulkan dan disimpan pada rak-rak secara acak. Kemudian berkembang di pertengahan abad ke 18 menjadi sebuah museum tradisional dengan mengurutkan benda-benda tersebut sesuai dengan klasifikasi. Saat itu, memamerkan benda tersebut sudah memiliki tujuan pendidikan dengan memberikan informasi pada setiap benda. Masa kini, muncul konsep *new museology* yang didorong oleh para seniman dan komunitas pada pameran-pameran temporer dengan membuat pameran lebih demoratis, terlepas dari elitisme dan konsumerisme (Marstine 21-30; Prior 68).

Begitupun dengan Museum Mandar Majene yang awalnya hanya tempat untuk menyimpan benda-benda dan dipamerkan hingga jumlah koleksi berjumlah 1.073 koleksi. Sejak tahun 2019, Museum Mandar Majene telah melakukan pembenahan penataan dan kajian terkait koleksi. Pembenahan data museum merupakan langkah awal museum dalam memberikan informasi yang dapat mencerminkan Kabupaten Majene. Sehingga identitas Kabupaten Majene dapat dilihat dari Museum Mandar Kabupaten Majene. Hal inilah yang dapat membedakan Museum Mandar dari museum daerah lainnya.



Foto 3. Re-Inventarisasi Koleksi dalam rangka pembenahan database koleksi Museum Mandar Majene

Museum Mandar merupakan salah satu museum dengan koleksi yang cukup banyak. Pada buku inventarisasi Museum Mandar tercatat sebanyak 1.073 koleksi yang dimiliki Museum Mandar. Koleksi ini terbagi atas 10 klasifikasi, yaitu Geologi, Biologi, Etnografi, Arkeologi, Histori, Numismatik, Filologi, Keramologi, Teknologi dan Seni Rupa.

Dalam memutuskan koleksi apa yang harus menjadi identitas Museum Mandar Majene, selain dilakukan studi literatur mengenai identitas Kabupaten Majene, dilakukan wawancara dan survey mengenai koleksi. Dalam memenuhi informasi, survey dilakukan kepada penduduk sekitar Museum Mandar dan pengunjung dengan cara menyebarkan kuesioner. Survey ini menuliskan beberapa pertanyaan mengenai informasi dan koleksi di Museum Mandar. Adapun pertanyaan pada survey mengenai koleksi adalah, sebagai berikut:

1. Apakah informasi di Museum Mandar Majene sudah memadai?

58.1% dari responden menjawab jika informasi belum memadai. Beberapa tanggapan menyatakan bahwa museum hanya menuliskan nama-nama benda saja tanpa adanya informasi lanjutan. Hal ini

terjadi karena museum belum melakukan penelitian terhadap koleksi-koleksinya. Beberapa koleksi di Museum Mandar bahkan tidak diberikan label. Namun, tidak sedikit juga koleksi dengan informasi.

2. Apakah telah mendapatkan informasi mengenai sejarah Kabupaten Majene ketika berkunjung?

Sebagai Museum Daerah, Museum Mandar Majene harus menampilkan identitas dari Kabupaten Majene. Identitas ini yang akan membedakan Museum Mandar Majene dengan Museum Daerah lainnya. Museum Daerah menjadi tempat bagi peserta didik untuk mempelajari identitasnya. Selain itu menjadi tempat untuk pengunjung mengetahui lebih dalam mengenai suatu daerah.

Pada pertanyaan ini, 45.2 % responden menjawab tidak mendapatkan informasi mengenai sejarah Kabupaten Majene di Museum Mandar Majene. Dengan demikian, museum harus melakukan pembenahan agar museum dapat menginformasikan mengenai Sejarah Kabupaten Majene.



Foto 4. Koleksi tanpa label dan informasi



Foto 5. Koleksi dengan label informasi

3. Informasi apa yang ingin ditampilkan di Museum Mandar Majene?

Pada pertanyaan ini ditawarkan 5 opsi agar responden bisa memilih. Opsi ini didapatkan dari hasil wawancara kepada pemandu museum dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Mandar. Opsi tersebut antara lain, Sejarah Kabupaten Majene, Bangunan Museum Mandar Majene, Potensi Sosial dan Budaya Masyarakat Kabupaten Majene, Sistem Sosial Masyarakat Kabupaten Majene dan Wisata Religi, Alam dan Budaya di Kabupaten Majene.

Opsi-opsi tersebut diberikan agar informasi dapat lebih spesifik mengacu pada identitas Kabupaten Majene yang wajib ditampilkan Museum Mandar Majene sebagai Museum Daerah. Responden dapat memilih lebih dari 1 jawaban. Dari ke 5 opsi tersebut, informasi yang paling diinginkan untuk dipamerkan dalam Museum Mandar Majene adalah Sejarah Kabupaten Majene. Kemudian informasi kedua yang ingin diketahui adalah mengenai Bangunan Museum Mandar Majene yang merupakan eks Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil wawancara dan survey terhadap masyarakat sekitar, informasi terhadap koleksi di Museum Mandar Kabupaten Majene masih sangat kurang. Kajian terhadap koleksi perlu dilakukan agar pemberian informasi kepada pengunjung dapat dilakukan. Namun, sehubungan dengan banyaknya koleksi yang dimiliki oleh Museum Mandar Kabupaten Majene, maka perlu dilakukan penyaringan terhadap koleksi-koleksi yang akan ditampilkan secara mendalam. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung setidaknya dapat memahami dan mengingat pesan yang ingin disampaikan oleh Museum Mandar Kabupaten Majene.

Hasil wawancara dan survey Museum Mandar Kabupaten Majene dan pengunjung Museum Mandar Majene, juga menunjukkan bahwa mereka menginginkan koleksi prioritas yang mencerminkan identitas Museum Mandar Majene. Koleksi yang dimaksudkan yaitu koleksi museum yang bersifat unik, langka baik replika maupun miniatur. Koleksi itu bukan sekedar benda mati, namun harus berbicara tentang dirinya kepada pengunjung dan merupakan jejak keberadaan manusia dalam segala aktivitasnya. Dua koleksi tersebut adalah *Olang Mesa* dan *Landschapesziekenhuis at Madjene*.

Olang Mesa



Foto 6. Miniatur Olang Mesa

Dalam memori kolektif masyarakat Mandar, perahu paling tua adalah *Olang Mesa*. Hal ini juga terkonfirmasi berdasarkan laporan Van Vuuren mengenai pelayaran dan perkapalan di Mandar tahun 1916. Laporan itu tidak menyebutkan Sandeq. Van Vuuren menyebutkan Pakur dan satu jenis perahu bercadik lain yang lebih kecil, disebut dengan *Olang Mesa*. Disebutkan juga lambungnya sangat runcing dengan layar *tanja* (besar sekali) (Liebnerm 2002;35).



Foto 7. Miniatur Olang Mesa

Olang Mesa masuk dalam kategori perahu bercadik dengan menggunakan Sobal Taja (layar segi empat panjang). Setelah Olang Mesa, orang Mandar kemudian menciptakan perahu yang lebih besar dengan sebutan Pakur. Kemudian, pada tahun 1930, jenis perahu bercadik ini dikembangkan dengan menggunakan layar segitiga sehingga pergerakannya menjadi lebih cepat. Perahu ini yang kemudian disebut dengan Sandeq (warisanbudaya.kemdikbud.go.id).

Olang mesa dapat menceritakan nenek moyang suku Mandar yang merupakan penduduk asli dari Kabupaten Majene. Raja-raja Mandar yang terlahir dari keturunan bahari yang sangat mempengaruhi pembentukan konfederasi politik dalam Kerajaan di masa lalu.

Catatan literatur Olang Mesa cukup sulit ditemukan, mungkin dikarenakan usianya yang cukup tua. Kebanyakan literatur hanya membahas mengenai Pakur dan Sandeq. Sehingga penelitian lebih mendalam perlu dilakukan untuk Olang Mesa.

Secara garis besar, melalui tema koleksi Olang Mesa, dapat menceritakan asal muasal masyarakat bahari Kabupaten Mandar hingga kini. Informasi mengenai Olang Mesa dapat diawali dengan membahas asal muasal masyarakat Kabupaten Majene. Dalam beberapa naskah disebutkan bahwa masyarakat Mandar merupakan masyarakat Bahari. Hal ini juga terdapat dalam cerita rakyat bahwa Raja/Ratu berasal dari laut. Pada bagian ini foto atau diorama dapat ditampilkan untuk mengilustrasikan tema ini.

Selanjutnya melalui Olang Mesa, memori masyarakat Mandar dapat diingatkan kembali bahwa sebelum ada Sandeq, Olang Mesa merupakan jenis perahu tertua. Olang Mesa merupakan sebatang pohon yang kemudian menjadi alat transportasi. Olang Mesa dapat ditampilkan menjadi salah satu koleksi dengan menampilkan miniaturnya dilengkapi dengan penjelasan fungsi-fungsi dari setiap bagian dari Olang Mesa.

Olang Mesa juga dapat mengenai perkembangan perahu bercadik Suku Mandar. Berawal dari Olang Mesa yang kemudian

dimodifikasi menjadi Pakur dan akhirnya menjadi Sandeq yang kini menjadi Warisan Budaya Tak Benda. Pada tema ini, perahu olang mesa, pakur dan sandeq dapat disandingkan. Informasi yang diberikan dapat menjelaskan mengenai perbedaan dan fungsi masing-masing jenis perahu.



Foto 8. Lambang Kabupaten Majene

Kehadiran Olang Mesa juga dapat menjadi salah satu penjelasan dari beberapa simbol dalam lambang Kabupaten Majene. Pada tema ini dapat dijelaskan sejarah perkembangan Kabupaten Majene yang terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda. Selain itu, dapat dijelaskan makna dari unsur lambang dari Kabupaten Majene. Informasi ini dapat dijelaskan melalui infografis.

Tema yang dapat dimunculkan dengan koleksi Olang Mesa adalah sosial dan budaya

masyarakat bahari di Kabupaten Majene. Penciptaan perahu di Kabupaten Majene tidak lepas dari upacara yang dilakukan masyarakat setempat. Pada tema ini dapat diceritakan upacara-upacara terkait kehidupan bahari masyarakat Kabupaten Majene. Upacara dan adat istiadat itu kemudian diceritakan keberlangsungannya hingga saat ini. Tema ini dapat ditampilkan bersama dengan koleksi etnografi yang berkaitan.

Landschapesziekenhuis at Madjene

Landschapesziekenhuis at Madjene saat ini masih berdiri kokoh di tengah pemukiman masyarakat. Bangunan ini beralamat di Jalan Raden Suradi No. 17 Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Bangunan ini telah ada sejak masa pendudukan Belanda di Indonesia, tepatnya dibangun pada 1905.

Tahun 1905 bukit mendarat ini dijadikan sebagai barak militer Belanda. Selanjutnya pada mulai tahun 1908 dibangun rumah sakit untuk orang asing yang bermukim di Mandar dan sekitarnya dengan nama *Landschapesziekenhuis at Madjene*. Masyarakat mengenalnya dengan sebutan “Boyang to Monge” yang artinya Rumah Orang Sakit.



Foto 9. *Landschapesziekenhuis at Madjene*



Foto 10. Bagian Pintu Bangunan Museum Mandar Majene

Pada tahun 1910, rumah sakit ini mulai beroperasi untuk orang-orang asing. Pada tahun 1911 menurut *Annual Report Civil Medical Service*, rumah sakit ini merupakan sebuah rumah sakit gabungan antara militer dan sipil dengan kapasitas 34 tempat tidur. Namun pada 1917, rumah sakit kemudian menjadi rumah sakit umum yang dapat diperuntukan masyarakat lokal juga.

Rumah sakit ini semakin berkembang dan menjadi salah satu rumah sakit rujukan pada masa kolonial. Bahkan, rumah sakit ini telah

memulai operasi pertama pada tahun 1925. Sebelum dijadikan bangunan untuk museum, bangunan ini sempat difungsikan menjadi Rumah Sakit Umum Majene.

Secara garis besar, Tema *Landschapesziekenhuis at Madjene* dapat menceritakan mengenai cikal bakal terbentuknya Kabupaten Majene dari masa Kolonial Belanda hingga kemerdekaan bahkan hingga saat ini. Jika dibagi menjadi subtema dalam pameran, dapat dibagi menjadi 4 sub tema.

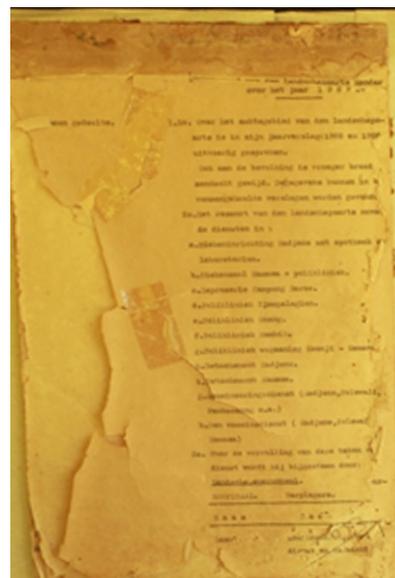
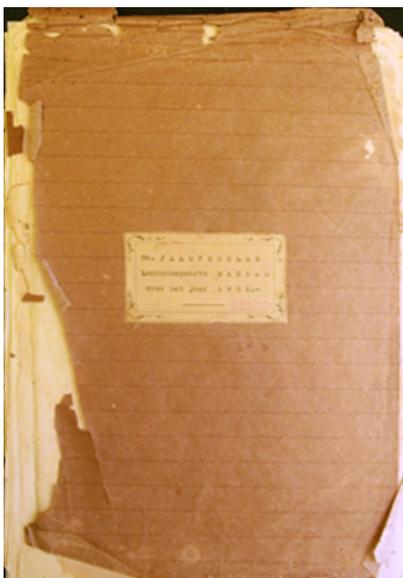


Foto 11. Naskah Tua dari *Landschapesziekenhuis at Madjene*

Sub tema pertama dapat menjelaskan bahwa lokasi ini dipilih Kolonial Belanda untuk menjadi barak militer pada bukit mendatar. Sub tema ini dapat dijelaskan melalui diorama dan foto-foto. Sub tema kedua dapat menjelaskan perubahan barak militer Belanda menjadi rumah sakit bagi orang asing yang menetap di Majene dan sekitarnya. Koleksi yang dapat digunakan adalah naskah tua yang diterjemahkan dan dibuat replikanya.



Foto 12. Ranjang Operasi

Sub tema selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Boyang to Monge. Pada sub tema ini dapat dijelaskan bahwa Rumah Sakit kemudian diperuntukan juga untuk masyarakat lokal. Bahkan Rumah Sakit ini menjadi Rumah Sakit rujukan yang dapat melakukan operasi. Pada sub tema ini dapat dipamerkan foto-foto masyarakat local yang pernah dirawat. Selain itu, koleksi lainnya berupa tempat tidur operasi.

Sub tema selanjutnya dapat menjelaskan perubahan fungsi bangunan pasca kemerdekaan. Bangunan ini juga pernah digunakan sebagai Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene. Informasi ini dapat dijelaskan melalui infografis mengenai perubahan fungsi bangunan.

Storyline di atas merupakan alur singkat berdasarkan koleksi prioritas dari Museum Mandar Kabupaten Majene. Penelitian lanjutan sebelum melakukan tata pameran perlu dilakukan agar informasi yang disajikan dapat lebih lengkap. Jika ada koleksi yang sangat penting untuk disajikan berkenaan dengan storyline tersebut, maka museum dapat melakukan pengadaan koleksi. Namun, jika telah memiliki koleksi namun koleksi tersebut bersifat rapuh, maka dapat dilakukan reproduksi koleksi. Sebagai contoh yang koleksi yang dapat direproduksi pada Museum Mandar adalah naskah-naskah kuno.

Kesimpulan

Museum Mandar Mejene memiliki 1.073 koleksi yang terbagi atas 10 klasifikasi koleksi, yaitu Geologi, Biologi, Etnografi, Arkeologi, Histori, Numismatik, Filologi, Keramologi, Teknologi dan Seni Rupa. Pengelolaan koleksi sebelumnya dilakukan secara internal yang biasanya dilakukan oleh pihak museum sendiri, mulai dari penyimpanan, perawatan, penelitian hingga pameran. Kini, pengelolaan koleksi museum dilakukan dengan berbagai aspek dan dengan disiplin ilmu yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menggali lebih dalam makna dari sebuah koleksi. Dengan demikian, informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat lebih mendalam.

Banyaknya koleksi yang dimiliki, tentu saja membuat Museum Mandar Majene kaya akan koleksi yang dipamerkan. Namun, melalui survey dan wawancara, koleksi belum memiliki informasi yang baik dan belum mencerminkan identitas Kabupaten Mandar sebagai museum daerah Kabupaten Mandar. Setelah dilakukan wawancara dan survey, responden memilih informasi mengenai sejarah Kabupaten Majene dan sejarah bangunan museum yang merupakan bangunan kolonial.

Dua koleksi koleksi prioritas yang dapat menggambarkan dua tema tersebut adalah koleksi perahu Olang Mesa dan bangunan *Landschapesziekenhuis at Madjene*. Melalui sub-sub tema, koleksi ini bisa ditampilkan bersama koleksi lain yang ada di museum untuk menceritakan baik sejarah Kabupaten Majene maupun sejarah bangunan museum. Diharapkan dengan menampilkan kedua tema tersebut, pengunjung dapat lebih memahami mengenai Kabupaten Majene dan identitasnya.

Daftar Pustaka

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017 Proposal Revitalisasi dan Penataan Ruang Museum Mandar Kabupaten Majene. Majene. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.*
- Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud, 2015 *Pedoman Data Base Koleksi Museum*. Jakarta. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud.
- Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud, 2018 *Modul Penata Pmeran Museum*. Jaskarta. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud.
- Horst, Liebner H. *Perahu-Perahu Tradisional Nusantara*. Makassar: P3MP Unhas, 2002.
- Marstine, Janet. *New Museum Theory and Practice*. Malden: Blackwell Publishing, 2006.
- Museum Mandar Majene. 2019 *Laporan Kajian Koleksi Musuem Mandar tahap I, . Majene UPTD Museum Mandar Majene*
- Museum Mandar Majene , 2020 *Laporan Kajian Koleksi Musuem Mandar tahap I, Majene UPTD Museum Mandar*
- Sunani, Ulya. Analisis Simbolik Perahu Sandeq dan Kearifan Lokal di Polewali Mandar. Mitzal. Vol 3 No. 1: 2018.



Pemanfaatan Website dan Museum Virtual Bagi Museum

Linda Siagian

Abstrak

Perkembangan paradigma yang terjadi di bidang permuseuman belakangan ini memberikan perubahan tidak hanya dalam manajemen museum tetapi juga dalam fokus pengelolaannya. Jika sebelumnya museum berorientasi pada objek, maka kini museum memberikan perhatiannya terhadap publik. Perkembangan paradigma ini kemudian menjadi pengaruh di berbagai aspek termasuk dalam media yang digunakan oleh museum dalam menyampaikan informasi. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu jembatan dalam memenuhi kebutuhan museum saat ini. *Website* dan museum virtual menjadi pilihan yang dapat diadakan agar masyarakat dapat mengapresiasi museum dalam kondisi saat ini.

Kata Kunci: *New Museology*, *website*, teknologi, museum virtual

Abstract

The development of the paradigm that has occurred in the museum sector recently has provided changes not only in museum management but also in the focus of its management. If previously the museum was object-oriented, now the museum is paying attention to the public. The development of this paradigm then became an influence in various aspects including the media used by the museum in conveying information. The use of technology is one of the bridges in meeting the needs of today's museum. Virtual museum is an option that can be held so that the public can appreciate the museum in its current condition.

Keyword: *New Museology*, *website*, *technology*, *virtual museum*.

Pengantar

Bidang permuseuman telah banyak mengalami perubahan, khususnya memasuki abad 21 yang kemudian dikenal dengan *New Museology*. Perubahan yang sangat menjadi dasar dalam pengelolaan museum saat ini adalah terjadinya pergeseran perhatian museum dari *object oriented* menjadi *public oriented*. Beberapa yang menjadi ciri untuk museum yang baru ini adalah museum memiliki visi misi serta nilai-nilai yang relevan dengan masyarakat saat ini yang didukung dengan strategi guna memperoleh respon dari masyarakat, fleksibel dan inovatif (Anderson, 2012).

Merujuk pada pengertian museum yang dikeluarkan oleh *International Council of Museum* (2007) bahwa museum meliputi warisan sejarah kemanusiaan yang berwujud benda dan tak benda beserta lingkungannya, Bersifat nonprofit dan permanen serta terbuka untuk umum, bertugas mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan, dengan tujuan museum adalah untuk pendidikan, penelitian dan hiburan. Sedangkan tugas museum sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum, adalah melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya.

Museum kini dituntut untuk dapat memberikan layanan yang relevan dengan kebutuhan saat ini. Belakangan ini tidak semua museum mampu melayani secara maksimal, selain kondisi juga terkait dengan ketergantungan pada pemasukan. Memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat luas memerlukan strategi yang kreatif dan inovatif. Hal inilah yang kemudian penting bagi pengelola museum untuk memiliki strategi dalam manajemen yang tepat agar museum dapat tetap berjalan pengelolaannya. Oleh sebab itu, prioritas dalam pelayanan kepada

pengunjung harus menjadi fokus dalam manajemen museum saat ini.

Berbagai cara perlu dilakukan agar museum dapat tetap maksimal dan aktif dalam kegiatannya mengkomunikasikan koleksi kepada masyarakat, tetapi juga tidak memerlukan banyak pengeluaran bagi museum. Perkembangan teknologi belakangan ini dapat menjadi pertimbangan bagi museum untuk tetap aktif dan relevan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, media seperti apakah yang dapat diterapkan agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk tetap dapat menikmati koleksi museum serta mendapatkan informasi yang terkandung dalam setiap koleksi dengan mudah.

Website Museum

Terdapat dua teknik dalam menginterpretasi museum yang berkembang seiring dengan konsep *New Museology* saat ini. Seperti yang dikemukakan oleh Pine dan Gilmore (2006:80), kedua teknik interpretasi itu adalah teknik statis dan teknik dinamis. Salah satu media yang termasuk dalam teknik interpretasi dinamis adalah dengan memanfaatkan atau menggunakan *website*.

Dilansir dari informasi daring, diketahui seorang bernama Tim Berners-Lee merupakan tokoh yang menciptakan website pertama kali pada tahun 1991. Tujuannya adalah untuk memudahkan pekerja seperti peneliti dalam hal bertukar atau ketika melakukan perubahan informasi. Merujuk pada Pine dan Gilmore (2006:36), *website* sendiri merupakan salah satu metode dalam promosi atau pemasaran museum. Terdapat 5 (lima) manfaat dari media ini bagi museum, yaitu:

1. Untuk menuangkan informasi tentang museum;
2. Sebagai tempat pameran berbasis digital;
3. Sebagai sarana interaktif;
4. Sebagai tempat yang mengkaitkan atau menghubungkan informasi museum

dengan informasi terkait lainnya melalui sebuah *link*, serta

5. Sebagai sarana publikasi museum.

Hal ini juga menjadi pendekatan yang dianggap efektif untuk mengajak masyarakat mengapresiasi museum dengan cara yang mudah, Karena hampir seluruh lapisan masyarakat global kini memiliki gawai atau ponsel yang terhubung dengan internet, tidak terkecuali di Indonesia. Seperti yang tercatat dalam penelitian Global Digital Report 2020 oleh platform media sosial *Hootsuite* dan platform media *We Are Social*, penggunaan internet oleh penduduk Indonesia adalah sebanyak 64%. Selain itu dikatakan bahwa Indonesia berada pada urutan kelima di dunia dalam hal pengguna internet terlama melalui ponsel. Maka, dengan demikian hal ini tentu saja menjadi peluang bagi museum untuk memanfaatkannya menjadi sarana dalam meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.



Global Digital Report 2020

Tetapi, apakah cukup bagi museum untuk hanya memiliki *website*? Lebih lanjut dikatakan oleh Pine dan Gilmore, bahwa terdapat 3 (tiga) hal penting yang harus ada dalam sebuah *website*, yakni domain, hosting dan konten. Terkait dengan artikel ini maka fokus penulis adalah kepada konten. Saat ini, hampir seluruh lembaga termasuk museum telah memiliki *website* yang digunakan untuk menyebarkan informasi ke seluruh pengguna internet di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa museum telah berinovasi dalam pengelolaannya.

Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) maka yang dimaksud dengan konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Museum saat ini diharapkan menjadi tempat memperoleh pembelajaran yang menyenangkan, maka sebaiknya dapat diakses kapan saja dan dimana saja serta oleh siapa saja. Melalui *website* dan produk berupa konten maka hal tersebut dapat terpenuhi. Adapun konten yang dimaksud salah satunya adalah museum virtual.

Banyak museum memiliki *website* tetapi sedikit sekali yang melihat atau mengunjunginya. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah tampilan yang monoton dan informasinya tidak *update* atau tidak pernah diperbaharui. Hal ini senada dengan Kotler (2008: 402) bahwa keberhasilan sebuah *website* adalah terkait dengan isinya, desain yang menarik serta navigasi yang mudah digunakan untuk berinteraksi.

Museum Virtual

Salah satu konten yang dapat dimasukkan dalam *website* museum adalah Museum Virtual yang merupakan sebuah ide untuk menyampaikan gambaran museum secara nyata melalui media digital kepada masyarakat. Melalui museum virtual masyarakat dapat mengunjungi museum seperti aslinya. Terdapat beberapa fungsi dari museum virtual menurut Pine dan Gilmore baik bagi museum maupun pengunjung, yaitu:

- Untuk menginformasikan dan menjelaskan baik misi maupun tujuan kepada pengunjung;
- Untuk memperkuat identitas museum;
- Untuk meningkatkan pemahaman kepada pengunjung bahwa museum menyediakan pengalaman virtual;
- Untuk membantu pengunjung dan komunitas mengikuti perkembangan museum;
- Sebagai sarana bagi forum komunitas antar generasi, sebagai tempat berdiskusi dan bertukar ide berkaitan dengan pengembangan konten digital serta museum dimasa yang akan datang, sehingga akan menciptakan partisipasi dan rasa kepemilikan;
- Sebagai sarana pemasaran yang efektif bagi museum;

- Sebagai akses untuk menjadi sumber pembelajaran yang dapat diandalkan;
- Menjadi penyedia *link* kepada sumber lain baik tingkat internasional maupun nasional.

Apabila melihat pada 8 (delapan) fungsi diatas maka dapat menjadi kesempatan bagi museum lebih dekat lagi kepada penggunaanya atau pengunjungnya.

Penting bagi pengelola museum untuk memasukkan layanan-layanan atau konten interaktif lainnya yang dapat dipilih oleh pengunjung museum virtual tersebut. Seiring dengan penjelasan diatas, Mario Bucolo dalam buku milik Neil Kotler (2008:407) menyatakan bahwa museum virtual merupakan pameran yang relatif mudah dibuat dan berbiaya rendah. Lebih lanjut dikatakan bahwa web dan dunia digital yang berkembang saat ini telah mengubah komunikasi dalam pemberian informasi satu arah menjadi komunikasi dua arah. Namun, perlu untuk menjadi perhatian adalah apakah cukup hanya dengan membuat website dan memasukkan museum virtual di dalamnya?

Kembali kepada penjelasan sebelumnya mengenai konten, mengembangkan sebuah museum virtual tentu saja tidak hanya sekedar menampilkan pameran museum dalam bentuk virtual. Pengelola memerlukan penambahan konten-konten lain yang mendukung pemberian informasi lainnya. Seperti dikemukakan sebelumnya misi museum perlu untuk diketahui oleh masyarakat dan dapat dipadukan dengan informasi umum museum seperti nama, alamat, peta lokasi, cara berkunjung, dan latar belakang pendirian. Bagi penulis, penting untuk memasukkan denah atau *layout* museum yang dilengkapi dengan nama setiap ruang dan dapat digerakkan dengan kursor atau dipilih pada layar. Sehingga akan membantu pengunjung dalam berkunjung.

Konten lainnya yang dianggap perlu dimasukkan dalam museum virtual adalah informasi koleksi. Setidaknya informasi koleksi memenuhi lima unsur yakni *What* (apa), *When* (kapan), *Where* (dimana), *Who* (siapa), *Why* (kenapa) dan *How* (bagaimana), atau yang lebih dikenal dengan singkatan 5W1H. *What* (apa) berguna untuk menginformasikan nama

koleksi tersebut, kemudian *When* (kapan) menginformasikan waktu penggunaan koleksi atau waktu pembuatan koleksi serta waktu penyerahan jika berkaitan dengan hibah koleksi. Lalu *Where* (dimana) berguna untuk menginformasikan lokasi atau tempat penemuan, juga dapat berupa informasi tempat ketika koleksi tersebut pernah digunakan. Kemudian, *Who* (siapa) menginformasikan siapa pemilik atau orang yang membuat koleksi tersebut, sedangkan *Why* (kenapa) berguna untuk menginformasikan atau menjelaskan sejarah, kisah atau latar belakang benda tersebut dibuat atau digunakan. Terakhir adalah *How* (bagaimana) dapat menjadi penguat dalam menjelaskan atau menguraikan proses benda tersebut dapat menjadi koleksi museum. Jika kelima unsur ini diterapkan ke dalam informasi koleksi yang ditampilkan maka koleksi akan menjadi lebih informatif.



Salah satu tampilan museum virtual pada laman museumkepresidenan.id

Komponen-komponen yang penting dalam museum virtual adalah koleksi, video atau film, gambar atau foto serta konten-konten lainnya yang tentu saja memerlukan perhatian khusus dalam hal resolusi gambar atau video yang ditampilkan. Visual menjadi penting ketika museum ingin memperlihatkan koleksi yang dimiliki kepada masyarakat, sehingga demikian pemilihan gambar atau pun dalam pengambilan video sebaiknya menggunakan gambar dan video dengan tingkat resolusi tinggi. Tampilan yang jernih dan baik akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat. Selain gambar dan video resolusi tinggi, hal lain yang tak kalah penting adalah audio. Penggunaan audio yang disesuaikan dengan tampilan pada museum virtual akan mendukung suasana ketika pengunjung berada di museum secara nyata.

Sebaiknya dalam museum virtual selain menampilkan ruang dan koleksi museum, perlu untuk koleksi yang merupakan film ditampilkan juga dan dapat dinikmati seperti ketika berkunjung ke museum secara nyata. Sehingga, museum virtual dapat menjadi pengalaman baru secara virtual kepada masyarakat. Sama halnya dengan museum secara nyata bahwa museum virtual menjadi ajang kegiatan pameran museum. Terkait dengan hal ini, maka pameran virtual dapat dibagi menjadi dua yakni untuk pameran tetap maupun pameran tidak tetap.

Merujuk pada tulisan Mario Bucolo dalam Kotler (2008: 407), pameran virtual dapat dilakukan dengan memanfaatkan foto atau gambar ruang, foto koleksi juga konten yang penyajiannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) cara, yakni yang pertama adalah dengan mengumpulkan foto-foto ruang museum dan sekitarnya lalu dibuat menjadi tampilan 360 derajat atau dengan kata lain keliling penuh. Pengguna kemudian dapat menggunakan kursor atau dengan menyentuh layar dan mengarahkannya sesuai keinginan penggunanya. Sementara itu yang kedua adalah menggunakan model 3 (tiga) dimensi, dalam tampilannya akan tampak lebih nyata. Biasanya pada model kedua, membutuhkan teknologi seperti misalnya *Augmented Reality* (AR). Penggunaan teknologi tambahan ini akan membantu museum mempertemukan pengunjung dengan bentuk museum yang sebenarnya. Pada prinsipnya AR akan menghubungkan benda maya baik dua atau tiga dimensi ke dalam lingkungan nyata.

Selain tampilan informasi dasar maupun koleksi serta ruang pameran museum, sebaiknya dalam museum virtual ini juga menyediakan pilihan lain seperti pengguna dapat mengunjungi perpustakaan atau menyediakan spot foto yang ada di museum. Kebanyakan museum hanya memperlihatkan koleksi ruang pameran saja, dan melupakan koleksi lain yang terdapat di perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sendiri menjadi berguna bagi pengunjung yang ingin menemukan informasi lain di museum. Dalam penyajian informasi tentu saja tidak hanya berupa gambar bergerak tetapi akan

lebih menarik lagi apabila ditambahkan dengan suara atau audio. Audio dapat menjadi suara latar selama gambar bergerak ataupun berupa narasi atas koleksi atau spot yang ditayangkan.



Ruang Perpustakaan
Pada Museum Kepresidenan RI Balai Kirti

Museum dapat memanfaatkan keberadaan perpustakaan untuk menawarkan seseorang menjadi pengunjung tetap museum. Saat ini koleksi buku yang ada di perpustakaan tidak hanya dapat dinikmati oleh penggemar buku, tetapi juga dapat menjadi sarana belajar khususnya bagi penelitian. Setelah mendaftar maka akan mendapatkan *username* dan *password* untuk dapat masuk ke dalam koleksi buku perpustakaan museum secara lengkap. Hal ini dapat menjadi keuntungan bagi museum, dengan adanya pengunjung tetap artinya museum meskipun secara virtual tetap eksis atau tidak kehilangan pengunjung. Museum dapat menawarkan jika menjadi anggota perpustakaan, maka pengunjung tersebut mendapatkan akses membaca serta mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh museum secara gratis. Lalu museum juga dapat memberikan souvenir bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota perpustakaan. Terkait dengan hal tersebut maka, sebaiknya museum melakukan digitalisasi koleksi buku-bukunya. Dengan demikian, museum dapat menampilkan judul, penulis, tahun terbit, penerbit serta abstrak dari buku-buku tersebut.

Terdapat satu hal yang selalu luput dari perhatian para pengelola museum, khususnya pengelola *website* juga dalam museum virtual, yakni belum tersedianya akses bagi pengunjung museum

berkebutuhan khusus. Museum harus dapat mengakomodir berbagai kondisi masyarakat. Sehingga misi museum yang ingin diterima dalam lapisan seluruh masyarakat dapat tercapai.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh pengelola museum, misalnya saja dalam tayangan museum virtual sebaiknya informasi ruang pamer, informasi koleksi dilengkapi dengan tayangan bahasa isyarat. Museum dapat melakukannya dengan meminta bantuan atau mempekerjakan orang yang telah memiliki keahlian dalam bidang ini. Sementara itu untuk buku-buku yang terdapat di perpustakaan, pengelola dapat mengubahnya menjadi *Digital Talking Book Player* (DTB). Bentuknya berupa *Compact Disc* (CD) atau menjadi sebuah rekaman. Sehingga akan lebih mudah digunakan oleh penyandang berkebutuhan khusus karena dapat memutar setiap judul buku yang telah menjadi DTB tadi. Menurut penulis, jika museum melengkapi diri dengan Website dan museum virtual yang update dan dilengkapi dengan sarana bagi pengunjung berkebutuhan khusus maka akan memungkinkan museum mendapatkan perhatian serta apresiasi lebih dari masyarakat.

Penutup

Berdasarkan uraian diatas maka jelas untuk museum sebaiknya memiliki *website* dalam upaya

memberikan pilihan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi tentang museum. Keberadaan museum virtual di dalam *website* akan sangat efektif dalam menayangkan museum secara nyata kedalam bentuk digital. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses museum kapan saja dan dimana saja serta bersama siapa saja. Selain itu, dengan kelengkapan fitur yang dikembangkan oleh museum, diharapkan dapat membantu serta mempermudah masyarakat dalam memilih informasi apa yang ingin diperoleh.

Museum virtual sebagai alternatif mengunjungi museum secara digital sebaiknya diikuti pula dengan kajian mendalam. Kajian yang dimaksud bertujuan untuk lebih memperdalam atau lebih mengetahui lagi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Layanan seperti apa yang diinginkan. Sehingga konten-konten yang ada didalamnya dapat lebih mengena dan relevan dengan masyarakat.

Semoga dengan adanya artikel ini dapat menjadi masukan dan mendorong museum untuk lebih berinovasi dan lebih kreatif dalam menyebarluaskan informasi museum dan koleksinya. Selain itu, museum juga dapat memberikan ruang atau kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pengalaman virtual. Sehingga dengan demikian museum tetap hidup dan menunjukkan eksistensinya.

Daftar Pustaka

- Anderson, Gail. 2012. *Reinventing The Museum, The Evolving Conversation on The Paradigm Shift*. Altamira Press: New York
- Kotler, Neil G, dkk. 2008. *Museum Marketing and Strategy-Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources*. Jossey-Bass: San Fransisco
- Ambrose, Timothy, dkk. 2006. *Museum Basics*. Routledge: New York
- <https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-website>
- <https://kbbi.web.id/konten>
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/08/26/menelisik-tren-peningkatan-pengguna-internet-di-indonesia>
- <https://www.smarteye.id/blog/kegunaan-augmented-reality>



SUKU KAJANG SEBAGAI TUJUAN WISATA BUDAYA DI SULAWESI SELATAN

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia baik di pedesaan hingga pedalaman selalu memiliki pengetahuan lokal dalam menjalani hidupnya dan tetap selaras dengan lingkungan hidupnya. Pengetahuan lokal terkait dengan perubahan dan siklus iklim kemarau dan penghujan, jenis-jenis fauna dan flora, kondisi geografi, demografi, dan sosiografi. Hal ini terjadi karena masyarakat mendiami suatu daerah itu cukup lama dan telah mengalami perubahan sosial yang bervariasi menyebabkan mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya.

Kemampuan adaptasi ini menjadi bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam menaklukkan alam, yang disebut sebagai kearifan lokal di daerah tertentu. Dimana masyarakat tersebut menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka melalui pandangan hidup dan ilmu pengetahuan yang diserap dari lingkungan mereka berada. Biasanya kearifan lokal tersebut diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun disetiap generasi, memiliki perbedaan karena pengaruh dari perkembangan luar.

Fatriani Fara

Kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai penjabaran kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya (Sedyawati, 2006).

Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesis atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Dalam Undang-undang Pemajuan Kebudayaan keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Hal tersebut seiring dengan penetapan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017 mengenai

upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Objek Pemajuan Kebudayaan salah satunya adalah adat istiadat atau kearifan lokal di daerah tertentu.

Masyarakat Kajang merupakan salah satu desa yang memiliki kearifan lokal yang beragam, baik kearifan lokal yang telah lama ada yang diwariskan dari generasi ke generasi, maupun kearifan lokal baru atau belum lama muncul sebagai hasil interaksi dengan masyarakat dan budaya lain. Salah satu kearifan lokal masyarakat Kajang adalah 'kepercayaan', dimana masyarakat Kajang menganut agama Islam tapi tetap mempertahankan ajaran lamanya. Hal ini menjadi alasan bagi penulis membahas masyarakat Kajang Sebagai Tujuan Wisata Budaya, selain nilai kearifan lokalnya terdapat juga nilai arkeologinya didalam.

Kearifan lokal digunakan sebagai daya tarik wisata, yaitu bagaimana kearifan lokal atau sosial budaya lokal yang dimiliki suatu daerah dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Selain keindahan alam yang dimilikinya maupun tinggalan arkeologisnya yang harus dilestarikan. Sosial budaya lokal dapat dijadikan objek wisata sehingga meningkatkan pendapatan daerah setempat. Alasan penulis membahas Suku Kajang adalah, sebagai salah satu pemerhati budaya penulis dituntut lebih kritis dalam memperhatikan sumber daya budaya yang ada di sekitar. Tidak hanya melihat benda arkeologisnya, namun faktor pendukung lainnya sangat berpengaruh dalam pelestarian budaya.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan di Indonesia dan mempunyai skala prioritas yang strategis (Murniatmo, 2000). Dukungan sumber daya alam serta keragaman seni dan budaya merupakan modal dasar bagi pengembangannya.

Pengertian pariwisata menurut A.J Burkat (2013), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. Pada dasarnya pariwisata merupakan perjalanan dengan tujuan untuk menghibur yang dilakukan diluar kegiatan sehari-hari, guna memberikan keuntungan yang bersifat permanen ataupun sementara. Apabila dilihat dari segi konteks, pariwisata bisa juga mendidik. Seseorang melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu untuk rela melakukan perjalanan yang jauh dan menghabiskan dana cukup besar. Suatu daerah harus memiliki potensi daya tarik yang besar agar wisatawan mau menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi wisata.



Foto 1.
Pintu Masuk Kajang Dalam.

Sumber : <https://mediaindonesia.com/weekend/258206/wujud-hidup-lestari-masyarakat-adat-kajang>

Potensi Suku Kajang tidak hanya terbatas pada alamnya, akan tetapi juga potensi budayanya. Peninggalan arkeologis berupa makam dengan orientasi utara selatan menunjukkan bahwa adanya pengaruh Islam yang telah masuk. Penamaan Suku Kajang berdasarkan atas sejenis *mengkuang* atau yang biasa disebut

sebagai pandan berduri, digunakan untuk membuat atap yang tumbuh banyak di Kawasan Kajang (Darmapoetra, 2014).

Suku Kajang tinggal secara berkelompok dalam suatu wilayah hutan seluas 50 km. Mereka memilih menjauh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan modernitas. Kegiatan ekonomi Suku Kajang berpusat di hutan. Maka dari itu, Suku Kajang sangat dekat dan menyandarkan kehidupannya kepada hutan.

B. Identifikasi Suku Kajang Secara Singkat

1) Bahasa

Kajang terletak di salah satu kecamatan di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Dusun Janayya, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang. Letak astronomisnya berada pada 05° 19' 43,9" LS dan 120° 18' 05,2" BT dengan ketinggian 194 Mdpl. Suku Kajang menggunakan bahasa Konjo dalam sehari-hari, bahasa Konjo pada dasarnya adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Bulukumba, khususnya pada kawasan Bulukumba bagian Timur.

2) Sistem Kepercayaan

Sistem kepercayaan Suku Kajang terdiri atas konsep-konsep yang menimbulkan keyakinan dan ketaatan bagi penganutnya. Kepercayaan tersebut mengenai adanya dunia gaib, ide tentang Tuhan, kehidupan dihari kemudian, adanya kekuatan-kekuatan supra natural, serta berbagai macam hal yang dapat menimbulkan rasa kepercayaan tersebut (Akib dalam Fara. 2016). Paham-paham tersebut memanifestasikan perasaannya melalui pemujaan, sehingga menimbulkan kecintaan, rasa takut bahkan ketakjuban

terhadap objek pemujaan yang digunakan sebagai simbol.

Dari uraian Katu (Fara, 2016) mengenai sistem kepercayaan dalam Pasang Ri Kajang, terdapat enam kerangka dasar yaitu kepercayaan kepada Tu Rie' A' Ra' na, percaya kepada alam gaib, percaya terhadap Ammatoa, percaya terhadap kebenaran pasang, percaya terhadap hari kemudian dan percaya terhadap takdir (Fara, 2016). Meskipun seperti itu, agama yang dianut oleh Suku Kajang adalah Islam.

Sistem sosial yang dianut oleh Suku Kajang telah diatur dalam pasang. Paham yang dianut oleh sebagian masyarakat, diidentifikasi sebagai "prinsip hidup" *kamase-masea*. Maka Pasang sebagai sistem sosial yang bermakna sebagai suatu tata aturan yang mengatur jaringan dan hubungan yang timbul sebagai manifestasi dari doktrin-doktrin dan ajaran yang dikandungnya (Fara, 2016). Dalam hal kepercayaan, masyarakat Kajang Dalam menganut kepercayaan Patuntung. Patuntung adalah sistem kepercayaan terhadap Tuhan yang disebut dengan Turie' A' rakna, kata Patuntung dapat pula berarti belajar maupun mencari. Untuk melakukannya seseorang akan ditunjuk melalui musyawarah bersama agar berinteraksi langsung terhadap Tuhan yang disebut dengan *Ammatoa*.

3) Pakaian dan Rumah

Warna hitam menjadi identitas Suku Kajang, dikarenakan hitam telah disakralkan. Warna hitam dimaknai sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan.

Suku Kajang berkeyakinan tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna hitam adalah kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan sang pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan utamanya kelestarian hutan yang harus dijaga kelestariannya sebagai sumber kehidupan di masa sekarang dan masa depan.



Foto 2. Kondisi Kajang Dalam

Sumber : <https://travelingyuk.com/suku-kajang/225837>

Suku Kajang menjadikan desanya sebagai desa yang berbeda dengan desa pada umumnya di Sulawesi Selatan. Sebut saja rumah yang digunakan oleh Suku Kajang, secara keseluruhan di Kajang Dalam orientasi rumah mereka adalah barat. Kesamaan seluruh unsur yang digunakan dalam rumah, serta tata ruang di dalam rumah sangatlah unik. Dapur Suku Kajang berada tepat di sebelah kiri setelah pintu masuk. Hal tersebut seragam dengan rumah yang lainnya. Letak kamar mandi berada di depan pintu rumah dan tanpa pintu. Seluruh kegiatan cuci mencuci dan buang air kecil jadi satu, buang air besar dilakukan di hutan.

4) Kajang Dalam dan Kajang Luar

Suku Kajang meyakini tempat tinggal mereka sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dipelihara. Tana Toa adalah penyebutan lain dari tempat tinggal Suku Kajang. Suku Kajang terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kajang Dalam dan Kajang Luar. Kajang Luar berada di tujuh wilayah Kecamatan Kajang, sedangkan Kajang Dalam berada di dusun Benteng.

Tidak ada perbedaan yang mencolok dari kebudayaan Kajang Dalam dan Kajang Luar. Mereka hidup dengan tujuan yang sama, yaitu melestarikan warisan leluhur. Suku Kajang sangat terkenal akan tradisi nenek moyang mereka, namun jika dibandingkan dari kedua kelompok tersebut Kajang Dalam lebih teguh tradisinya dibanding Kajang Luar.

Kajang Luar adalah wilayah masyarakat yang hidup diluar dari ajaran *Kamase-mase*. Seperti halnya masyarakat pada umumnya, di Kajang Luar orang-orang lebih terbuka akan adanya modernisasi berupa teknologi maupun pendidikan. Lain halnya dengan Kajang Dalam, masyarakat yang berada di wilayah tersebut cenderung tertutup dengan dunia luar atau masih hidup secara tradisional. Hal tersebut dikarenakan mereka masih berpegang teguh terhadap *Kamase-mase*.

5) Tradisi Suku Kajang

Kondisi masyarakat Kajang dalam kehidupan sehari-harinya berlandaskan pada Pasang. Segala sesuatu yang menjadi tolak ukur apakah baik ataupun

buruk, boleh ataupun tidak, dituju ataupun dilawan merupakan fungsi dalam Pasang. Maka dari itu Pasang adalah kumpulan-kumpulan pesan, petuah maupun aturan-aturan bagaimana seseorang menempatkan dirinya untuk menjaga keharmonisannya dengan alam dan Tuhan.

Ajaran *Kamase-mase* menjadi bekal bagi masyarakat Kajang dalam hidup di dunia. Dengan kata lain masyarakat Kajang tidak dibolehkan memiliki Hasrat berlebihan dalam kehidupan sehari-hari, baik makan maupun kebutuhan lainnya. Prinsip ini dijaga sehingga Suku Kajang memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan.

Isi dari ajaran *kamase-mase* berbunyi; *jagai lino lolling bonena, kammayatempa langika, rupa taua siayang boronga*. Artinya, peliharalah dunia beserta isinya, demikian pula langit, manusia, dan hutan. Hal tersebut mengajarkan Suku Kajang bagaimana berinteraksi dengan alam lingkungan. Memanfaatkan seperlunya, agar keseimbangan alam tetap terjaga.

Filosofi *kamase-mase* menempatkan langit, dunia, manusia, dan hutan sebagai satu kesatuan yang utuh. Satu ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia hanyalah salah satu elemen kecil yang berada di dunia.

Dalam berinteraksi dengan alam, manusia harus memperhatikan keseimbangan ekosistem. Manusia tidak dapat mengeksploitasi alam sesuai hawa nafsunya. Manusia tidak dapat sewenang-wenang terhadap alam,

karena dapat merusak keseimbangan alam.

Salah satu implementasi kehidupan *kamase-masena* adalah bentuk rumah. Rumah adat Suku Kajang sangat berbeda dari rumah adat Bugis Makassar, secara struktur. Bentuk rumah yang seragam, dari segi bahan, ukuran, dan arah hadapnya yaitu barat. Keseragaman itu bermaksud menghindari saling iri di kalangan mereka, yang dapat berakibat pada keinginan memperoleh hasil yang lebih.

Larangan membangun rumah dengan bahan batu bata. Hal ini adalah pantangan, karena bagi *pasang* hanya orang mati yang berada di dalam tanah. Rumah yang berbahan baku batu bata, maka penghuninya dianggap mati karena telah dikelilingi oleh tanah (Darmapoetra, 2014).

Ritual yang diadakan oleh Suku Kajang bernama *andingingi*. Tradisi lokal tersebut bertujuan menjaga alam lingkungan dengan memohon keselamatan yang dilakukan setiap tahun pada tanggal 23 Oktober (Darmapoetra, 2014). Uniknyanya, ritual tersebut dilakukan oleh seluruh masyarakat Suku Kajang, baik Kajang Dalam maupun Kajang Luar. Masyarakat menggunakan pakaian serba hitam lalu berbondong-bondong menuju gerbang Tana Toa untuk menyelenggarakan adat istiadat



Foto 3. Ritual Suku Kajang (kiri) dan Kondisi jalan masuk Kajang Dalam (kanan)
 Sumber; <https://makassar.terkini.id/hitam-simbol-setera-suku-kajang-bercerita/>

Penduduk Suku Kajang pada umumnya adalah petani, tanaman yang di tanam adalah padi, jagung, kopi, dan lainnya. Pengerjaan pertanian berdasarkan kondisi lingkungan dan curah hujan yang turun. Di dalam Tana Toa terdapat hutan yang sangat lebat. Seluruh desanya dikelilingi oleh hutan. Jalan masuk Kajang Dalam tidak beraspal, melainkan jalan setapak yang terbuat dari batu-batu. Batu disusun secara rapi dan teratur sebagai penanda jalan. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan Kajang Dalam yang menolak segala macam modernisasi. Pemanfaatan kuda sebagai kendaraan ke sawah atau ladang dan kerbau sebagai pembajak.

Kaum perempuan bekerja menenun kain di rumah. Menenun kain untuk dijadikan sarung hitam khas Suku Kajang dengan sebutan *Tope' Le'leng*. Kain hasil tenunan dijual kepada pendatang sebagai penghasilan tambahan. Membuat pakaian atau menenun merupakan syarat bagi seorang wanita untuk dapat melangsungkan pernikahan. Pembuatan pakaian masih

dilakukan secara tradisional, mulai dari pembuatan benang, proses pewarnaan hingga menenunnya menjadi selembar kain.

Kaum Wanita Suku Kajang diwajibkan bisa membuat kain dan memasak. Sedangkan kaum pria diwajibkan untuk bekerja di ladang dan membuat perlengkapan rumah dari kayu. Kewajiban tersebut harus dipenuhi jika ingin berumah tangga. Kedua hal tersebut menunjukkan saling terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangga.

6) Agama

Kondisi masyarakat Kajang Luar di kehidupan sehari-harinya berlandaskan pada syariat Islam. Seperti masyarakat umumnya yang beragama Islam, merekapun melakukan shalat lima waktu maupun berpuasa. Meskipun masyarakat Kajang Dalam mengakui keislamannya, namun hal-hal dalam syariat Islam tidak diindahkan sama sekali.

Perbedaan yang terjadi menularkan kondisi masyarakat yang berbeda pula, hal tersebut ditunjukkan oleh masyarakat Kajang Dalam maupun Kajang Luar melalui sikapnya. Selain itu, masyarakat yang berada di Kajang Dalam maupun Kajang Luar masih berada dalam satu Kawasan adat yang sama. Meskipun keduanya telah membagi diri, namun keduanya masih memiliki pemikiran yang sama, hanya saja dalam prakteknya menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Agama yang dianut saat ini oleh Suku Kajang adalah Islam. Sebelum masuknya Islam di Kajang, tentu sudah ada kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Kepercayaan pra-Islam pada dasarnya dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, kepercayaan terhadap dewa-dewa patuntung, dan kepercayaan pada persona jahat. Ketiga kepercayaan tersebut telah ada jauh sebelum adanya Islam di Sulawesi Selatan dan terdapat di setiap wilayahnya (Sewang dalam Fara, 2016).

Keyakinan Kajang sebelum kedatangan Islam, tidak berbeda jauh dengan keyakinan yang masih melembaga dalam komunitas Kajang Dalam saat ini, yakni percaya pada Tu Rie' A'ra' na. Kepercayaan akan terbentuknya bumi berawal dari Tanah Toa, begitupun dengan terbitnya matahari di daerah Tondong dan terbenam di Tombolo (kawasan Kajang Dalam). Demikian juga pemahaman mereka mengenai manusia pertama di dunia adalah Ammatoa.

Keyakinan akan keberadaan Tu Rie' A'ra' na di Kajang Dalam disimbolkan pada zat yang juga disebut To Manurung. Kajang

Dalam meyakini To Manurung sebagai penyelamat pada saat keadaan dunia kacau balau. Pemahaman tersebut pada umumnya juga terjadi diberbagai wilayah Sulawesi Selatan. Keyakinan akan To Manurung sebagai penghubung Tu Rie' A'ra' na pada masa pra Islam ini, berkaitan dengan keberadaan kepercayaan lokal Patuntung dan sumber dogma Pasangri Kajang.

Komunitas Kajang Dalam menjalin hubungan dengan Tu Rie' A'ra'na melalui pa 'nganroang dan pendekatan kebatinan atau tapakkoro (Akib, 2003). Pa'nganroang adalah bagian dari ritus kepercayaan Patuntung yang diwarisi dari leluhur mereka yang dahulu berdiam di sekitar Gunung Bawakaraeng sebelum terdesak oleh agama Islam. Tapakkoro adalah usaha batin mendekati "Tuhan" melalui bersih diri baik jasrnani maupun rohani. Hal tersebut merupakan cara yang hampir sama dengan yang dilakukan seorang ahli tasawuf untuk rmendekatkan diri kepada Allah SWT.

Usaha batin tersebut mendekati Tu Rie' A'ra'na bukan murni pengaruh dari ajaran Islam, sebab cara seperti itu telah dikenal terlebih dahulu. Perbedaannya hanya pada sasaran dan tujuan. Dahulu usaha batin dilakukan untuk tujuan yang animis dan dinamis, berisikan ide-ide spiritual tradisional.

Kedatangan Islam di Kajang, terjadi pada abad ke-17 setelah Raja Tallo I Malingkang Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awalul Islam menerima Islam pada tahun 1605. Banyak versi yang menunjukkan bagaimana proses islamisasi pada masyarakat Kajang. Versi pertama oleh Sewang (2005),

mengatakan bahwa Islamisasi tidak terlepas dari pelopor Islam yang berasal dari Koto Tangah Minangkabau dengan sengaja didatangkan oleh para pedagang muslim Melayu untuk mengislamkan para penguasa. Para pedagang muslim telah berada di Sulawesi Selatan sejak akhir abad XV. Para pedagang Melayu mengambil keputusan tersebut untuk mengimbangi misi Katolik. Seorang misionari Katolik berkunjung ke Sulawesi Selatan pada tahun 1542.

Kehadiran tiga datuk dilatarbelakangi oleh persaingan antara misionaris dan para pedagang muslim. Datuk tersebut dikenal dengan nama datuk tellue' (Bugis) atau datuk tallua (Makassar), yaitu (1) Abdul Makmur, Khatib Tunggal, yang lebih populer dengan nama Datuk ri Bandang, (2) Sulaiman, Khatib Sulung, yang populernya Datuk Patimang, (3) Abdul Jawad, Khatib Bungsu, populernya Datuk ri Tiro.

Keahlian masing-masing muballigh disesuaikan dengan kondisi kepercayaan dan pemikiran masyarakat setempat. Datuk ri Tiro bertugas di daerah Tiro, Bulukumba, dengan lebih menekankan pada ajaran tasawuf, sesuai kondisi masyarakat yang dihadapinya, yaitu masyarakat yang masih teguh berpegang kepada masalah-masalah kebatinan, sihir dengan segala mantranya. Masyarakat Tiro memiliki kegemaran dalam menggunakan kekuatan sakti (doti) untuk membinasakan musuh. Masyarakat demikian, menurut Datuk ri Tiro, akan lebih berhasil jika dilakukan pendekatan tasawuf (Fara, 2016).

Masyarakat Kajang Dalam melakukan pendekatan kebatinan dengan cara tidak jauh berbeda seperti ajaran tasawuf. Pendekatan tersebut dilakukan setiap saat dengan tujuan agar selalu bersama dengan Tu Rie' A'ra'na. Perilaku tersebut adalah cerminan dari nilai pasang yang mengerahkan jati diri agar selalu baik kepada umat manusia dan alam dengan cara mematuhi norma-norma dan tata Susila.

Islamisasi yang dilakukan oleh Datuk ri Tiro tidak sepenuhnya mengubah pola pemikiran Kajang Dalam. Masyarakat Kajang Dalam menyebut dirinya sebagai pemeluk agama Islam, namun kualitas dalam agama Islamnya tidak diindahkan. Meskipun seperti itu, mereka berusaha menjauhkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang tercela (Faisal dalam Fara, 2016).

Kondisi pengamalan Islam di Kajang Dalam sangatlah kurang, syariat Islam tidak dilaksanakan kecuali pada tatanan perkawinan, kematian, sunnat dan zakat serta tahlilan. Masyarakat Kajang Dalam masih berpegang teguh terhadap kepercayaan animisme, percaya akan adanya kekuatan pada benda-benda tertentu dan kepada roh-roh nenek moyang. Tetapi meskipun seperti itu, emosi Islam cukup tinggi karena mereka tidak sudi apabila dikatakan bukan beragama Islam.

Tinggalan arkeologis yang terdapat di Suku Kajang Dalam maupun Kajang Luar menunjukkan telah terjadi islamisasi. Penanda pertama sebagai acuan makam Islam dilihat dari orientasi makam, yaitu utara-selatan. Selain itu, data penunjang

lainnya adalah wawancara dengan kepala adat Kajang Dalam atau yang biasa disebut Ammatoa.

Kompleks makam di Kajang Dalam merupakan makam Ammatoa pertama yang memeluk agama Islam dengan orientasi makam utara-selatan. Tidak dapat diketahui secara pasti Ammatoa keberapa yang memeluk agama Islam pertama, namun makam tersebut sangat dihormati hingga sekarang sebagai pemeluk agama Islam pertama di Tana Toa.

Suku Kajang adalah salah satu suku di Indonesia yang menjadi tujuan wisata budaya di Sulawesi Selatan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Suku Kajang selalu dilestarikan untuk menjaga nilai-nilai atau norma-norma zaman dahulu. Untuk mendukung pelestarian dan keaslian Suku Kajang, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bulukumba bekerjasama untuk mewujudkannya, sebagai contoh, pemerintah mengadakan dan menyiapkan lahan khusus untuk masyarakat Kajang yang digunakan untuk menanam bahan baku kain tenun. Masyarakat membuat organisasi atau kumpulan, yang dimana mereka membagikan diri ada yang sebagai *local guide*, penerima tamu, dan sebagainya.

C. Pengembangan Pariwisata

Dalam pengembangan pariwisata diperlukan pembentukan pilar-pilar pariwisata yang berguna untuk mendorong dan memajukan pariwisata berbasis alam, sosial, dan budaya pada suatu daerah wisata agar bisa berkembang lebih baik dan maju. Dorongan pilar pariwisata tersebut antara lain: pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Dorongan dan sumbangsih mereka sangat penting untuk membantu memajukan destinasi suatu tempat wisata (Soeroso, 2008).

1) Pemerintah

Tana Toa merupakan salah satu desa adat dan rumah adat yang nilai ketradisionalannya sangat khas. Untuk mendukung dan melestarikan Suku Kajang, pemerintah selalu mengedepankan Desa Suku Kajang dalam pengembangan dan pelestarian serta selalu menyertakannya dalam beberapa dokumentasi untuk dilampirkan dalam brosur maupun promosi pariwisata di luar daerah maupun ke luar negeri, terlebih bila ada even-even nasional selalu mengajak tamu yang hadir untuk mengunjungi Tana Toa.

2) Masyarakat

Salah satu pilar utama dalam mengembangkan dan melestarikan Suku Kajang ini adalah masyarakat, karena masyarakat Kajang adalah pelaku dari Tana Toa tersebut. Dengan tidak dilestarikannya desa adat maupun nilai-nilai ketradisionalan tersebut, maka kearifan lokal Suku Kajang ini terancam punah sehingga perlu untuk dilestarikan dan diajarkan kepada generasi muda, termasuk orang tua juga perlu mengajarkan dan mendidik generasi bahwa betapa berharganya warisan budaya dari nenek moyang kita.

3) Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu yang berperan dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk Suku Kajang. Hal tersebut seiring dengan kearifan kosmologinya yang masih kental. Penghormatan terhadap alam dan hutan menjadi identitas mereka, tercermin dari kesadaran dan kearifannya terhadap pelestarian hutan. Dapat dijadikan contoh bagi daerah lain bahwa pentingnya menjaga atau melestarikan budaya lokal yang ada dan menjaganya untuk diwariskan ke generasi berikutnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Suku Kajang yang terletak di Dusun Janayya, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki unsur-unsur nilai kebudayaan. Di Kajang terdapat rumah tradisional serta adat budaya masyarakat lokal yang masih dipertahankan dan masih kental. Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan

melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain, kearifan lokal tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan tentang keunikan Suku Kajang yang sudah menjadi desa wisata akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengembangan pariwisata di Bulukumba.

Daftar Pustaka

Anonim. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Darmapoetra, Juma. 2014. *Kajang; Pecinta Kebersamaan dan Pelestari Alam-Makassar*. Makassar: Arus Timur.

Fara, Fatriani. 2016. *Skripsi; NISAN TIPE MENHIR PADA KOMPLEKS MAKAM ISLAM DI KAJANG DALAM DAN KAJANG LUAR KABUPATEN BULUKUMBA*. Makassar; Universitas Hasanuddin.

Gatut Murniatmo, dkk. 2000. *Khazanah Budaya Lokal (Sebuah Pengantar Untuk Memahami Kebudayaan Daerah di Nusantara)*.

Sedyawati, Edy. 2006. *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

SETYANINGSIH, Z., & Arch, M. (2013). *PENGARUH PENGALAMAN WISATAWAN TERHADAP CITRA DESTINASI PARIWISATA Kasus: Jl. Malioboro dan Jl. Ahmad Yani, Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)

Soeroso, A., & Susuilo, Y. S. (2008). Strategi Konservasi Kebudayaan Lokal Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan / Journal of Theory and Applied Management*.

Sumber Internet

<https://makassar.terkini.id/hitam-simbol-setera-suku-kajang-bercerita/>

<https://mediaindonesia.com/weekend/258206/wujud-hidup-lestari-masyarakat-adat-kajang>

<https://travelingyuk.com/suku-kajang/225837>



PAMERAN CAGAR BUDAYA BERTAJUK "KERETA API RIWAYATMU DULU"

Cresentia Zita Octaviani

(Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur)

A. Hadirnya Kereta Api

'Naik kereta api, tut- tut- tut

*Siapa hendak turut? Ke Bandung,
Surabaya Bolehlah naik dengan percuma
Ayo kawanku lekas naik Keretaku tak
berhenti lama*

Lekas keretaku jalan, tut-tut-tut

*Banyak penumpang turun
Keretaku sudah penat
Karena beban terlalu berat
Di sinilah ada stasiun
Penumpang semua turun'*

Sekilas lagu karangan Saridjah Niung atau biasa dikenal Ibu Soed di atas, mengingatkan kita dalam masa kanak-kanak. Lagu berjudul 'Naik Kereta Api' tersebut dimainkan secara berkelompok dengan masing-masing

memegang pundak sembari berkeliling bak kereta api sedang beroperasi. Meskipun hanya sebuah intermeso, namun siapa sangka, kereta api sejak masa kanak-kanak telah mendapat tempat sebagai transportasi yang istimewa dan paling digemari.

Kehadiran kereta api di Nusantara memiliki perjalanan sejarah cukup panjang hingga dapat dinikmati saat ini. Berbagai buku pun telah hadir mengulas sejarah kereta api di antaranya : Sejarah Perkeretaapian Indonesia (Jilid I dan II) oleh Tim Telaga Bakti Nusantara, Kereta Api di Indonesia (Sejarah Lokomotif Uap) oleh Yoga Bagus, dkk, *Sepoer Oeap di Djawa Tempo Doeloe* oleh Olivier Johannes Raap, Sejarah Kereta Api Indonesia oleh Yati Nurhayati dan lain sebagainya.

Kereta Api yang berjasa di Indonesia pada masa Hindia-Belanda, sebagian besar diproduksi di Jerman, Belanda, Inggris, Swiss, Amerika

Serikat, dan Jepang. Pelopor utama bernama **Richard Trevithick** sebagai seorang insinyur tambang dari Inggris yang merancang kereta api bergerak di atas rel (Tim Telaga Bakti Nusantara, 1997). Namun, sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui adanya perbedaan istilah antara kereta api dan trem. Istilah trem diartikan sebagai kereta api berskala kecil dan dijangkau hanya di dalam kota (regional). Rel yang dibangun pun lebih berkonstruksi ringan, lokomotif dan gerbongnya berukuran kecil, kapasitas rendah, kecepatan lebih lambat (maksimal 35 kilometer per jam), proses pembangunan cepat dan biaya pembuatannya murah (Olivier, 2017). Sedangkan kereta api, kebalikan dari istilah trem atau dapat dikatakan sebagai transportasi berjangkauan luas, kecepatan cenderung lebih laju, proses pembangunan membutuhkan biaya mahal, waktu yang panjang, serta membutuhkan sarana dan prasarana memadai.

Munculnya kereta api baik berskala besar maupun kecil (trem) berawal dari fenomena sejak abad ke-18 Masehi. Kala itu transportasi menjadi persoalan besar. Eksploitasi kekayaan sumber daya alam Indonesia dalam upaya perdagangan ke pasar internasional era kolonial tentu membutuhkan alat angkut yang memadai. Kekayaan alam seperti kayu, kopi, lada, cengkeh, pala, tembakau, teh, karet, kapur barus, minyak bumi, gas, dan lain sebagainya mengalami kerusakan saat dilakukan pengiriman dari lokasi produksi ke wilayah tujuan. Bahkan, pengiriman memakan waktu sehari-hari hingga berbulan-bulan (Imam Subarkah, 1987 dalam Tim Telaga Bakti Nusantara, 1997). Kondisi ini lah memicu pemerintah kolonial Belanda menghadirkan kereta api di Indonesia sejak tanggal 10 Agustus 1867 (Tim Telaga Bakti Nusantara, 1997).

B. Kereta Api di Jawa Timur

Membahas kereta api tentu melekat dengan tempat pemberhentian (stasiun). Stasiun awal mulanya hadir setelah tahun 1870 di Pulau Jawa. Stasiun berfungsi sebagai :

- Tempat kereta api berhenti dan berangkat. Momen ini sebagai tempat menurunkan maupun memberangkatkan penumpang (manusia, hewan, dan barang).
- Sebagai tempat kereta api bersilang, menyusul dan disusul (Handinoto, 1999).

Selain arsitektur (stasiun), hal penting yang menunjang hadirnya kereta api adalah jalur jalannya kereta. Melihat dari perkembangan kereta api di Jawa khususnya Jawa Timur, Handinoto (1999) menguraikan jalur kereta api mulanya diresmikan pada tanggal 16 Mei 1878 yang dimulai dari jalur Surabaya – Pasuruan, dilanjut cabang Bangil – Malang yang diresmikan pada tanggal 20 Juli 1878. Selanjutnya menyusul jalur-jalur lainnya seperti cabang Sidoarjo – Madiun (diresmikan 16 Oktober 1880), Mojokerto (diresmikan 1 Juli 1882), Kediri – Blitar (diresmikan 16 Juni 1884). Jalur selanjutnya dari Pasuruan ke arah timur hingga Probolinggo sejauh 40 kilometer dan selesai dibangun pada tahun 1884. Tahun 1895 rel kereta api tersebut diperpanjang hingga Probolinggo – Klakah. Terakhir, tahun 1896 mulai dibangun jalur-jalur ke Lumajang, Pasiran dan kemudian diteruskan hingga ke Jember, Bondowoso, dan berakhir di pelabuhan Panarukan sepanjang 151 kilometer. Jalur-jalur kereta tersebut semua selesai terbangun pada tahun 1897.



Kolonel Jhr van Der Wijk
sebagai tokoh pencetus ide penggunaan
kereta api di Indonesia
(Sumber: www.wikipedia.com)

Jalur lainnya yang memudahkan kegiatan ekspor yaitu jalur Cepu – Bojonegoro – Babat pada tanggal 1 Maret 1902. Tahun 1897 hingga 1902 tercatat dua jalur besar yang telah dibangun yakni Surabaya – Padangan – Gundhi dan Surabaya – Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu. Jalur-jalur tersebut kemudian memudahkan kegiatan pengangkutan komoditi andalan di Jawa Timur seperti gula dan tebu dari wilayah Kediri, Pasuruan, Besuki, Madiun, dan Surabaya. Selain itu, hasil minyak dari penambangan di Cepu juga semakin mudah diangkut ke Surabaya, yang kala itu Surabaya sebagai pusat dari berbagai jaringan kereta api di Jawa Timur sekaligus sebagai pusat perdagangan dan pelayaran untuk kawasan Indonesia bagian timur. Hasil minyak pun dikirim ke depo kereta api di Sidotopo lalu digunakan dalam perawatan kereta api. Selain minyak, angkutan lainnya berupa kayu jati dan tepung tapioka juga dikirim dari Cepu ke

Surabaya (ANRI, 1978). Jalur lainnya juga terbuka pada tanggal 1 Agustus berupa jalur Bubad – Tuban (terhubung dengan jalur Surabaya – Lamongan). Jalur ini berfungsi dalam pengangkutan dari wilayah Tuban seperti kopra, kapas, kacang, kedelai, jagung, dan beras untuk dikirim ke pelabuhan Surabaya (von Faber, 1933). Hingga akhirnya, peranan alat tradisional seperti gerobak, pedati maupun dokar yang mulanya sebagai alat pengangkut manusia, barang, dan hewan mulai tergeser kecuali peruntukannya dalam jarak dekat (Nurudin, 2015).

C. Sajian Informasi Panel dalam Pameran Cagar Budaya Kereta Api

Pameran cagar budaya merupakan kegiatan dalam upaya mengedukasi masyarakat untuk mengenal, memahami, dan mengajak masyarakat berperan dalam pelestarian cagar budaya. Hal ini dipertegas dalam amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya khususnya pasal 95 yang menyebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat dan menyelenggarakan promosi Cagar Budaya.

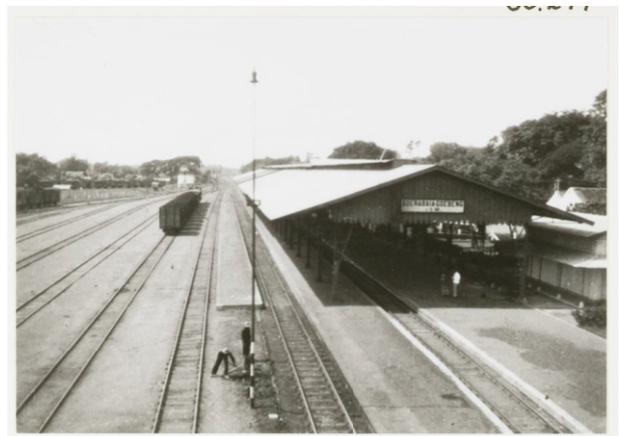
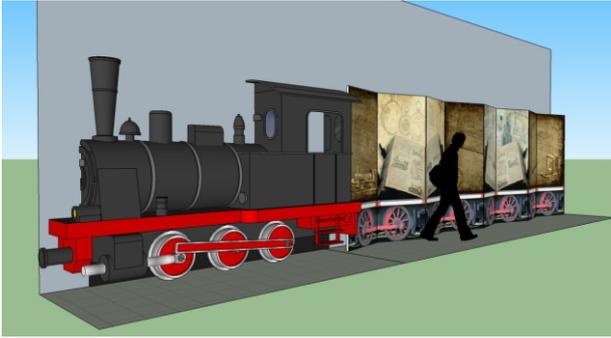


Foto Lama Stasiun Gubeng Surabaya
(sumber: www.kitlv.com)



Desain Panel Pameran Kereta Api
(Sumber: BPCB Jatim, 2021)

Tahun 2021, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur mengusung tema terkait kereta api di Jawa Timur pada era kolonial Belanda. Tema ini dilatari kurangnya edukasi terhadap transportasi-transportasi masa lalu yang berperan penting dalam keberlangsungan perekonomian manusia. Meskipun pembahasan perihal kereta api kerap disajikan dalam kegiatan *webinar*, diskusi luring, maupun kegiatan literasi, namun melalui kegiatan tatap muka dalam konsep kegiatan pameran masih jarang dilakukan. Melalui kegiatan pameran ini lah, institusi yang bergerak dalam bidang pelestarian cagar budaya perlu melakukan edukasi sejarah transportasi dalam hal ini kereta api terhadap masyarakat.

Pilihan lokasi dalam pameran kali ini yakni Stasiun Gubeng Surabaya. Selain peran wilayah Stasiun di Surabaya dalam masa lalu begitu penting seperti yang telah diuraikan sebelumnya, stasiun Gubeng Surabaya yang berdiri sekitar tahun 1870-an ini juga memiliki daya tampung penumpang yang cukup besar. Hal ini tentu sangat bermanfaat dalam mengedukasi masyarakat untuk terlibat dalam pameran cagar budaya kereta api yang sedang berlangsung tepat di titik stasiun baru Gubeng Surabaya. Meskipun bangunan megah ala *Indishce* masih terlihat di Stasiun Gubeng saat ini, penentuan lokasi pameran dilaksanakan di

stasiun baru untuk alasan keluasan, keamanan dan kenyamanan.

D. Informasi Panel

Konsep utama dalam pameran cagar budaya bertajuk 'kereta api riwayatmu dulu' ini, yakni membuat replika kereta api yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung untuk berfoto maupun melihat secara ringkas atribut kereta api. Replika kereta api ini dilengkapi kumpulan panel yang terbagi menjadi 8 panel. Adapun informasi yang disajikan dalam panel, diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Panel1 : Berisi kumpulan foto dan gambar stasiun Gubeng Surabaya di masa lalu.



Contoh stasiun Gubeng Surabaya masa lalu
(Sumber: www.kitlv.com)

2. Panel2 : Berisi tentang sejarah perkeretaapian. Seperti yang telah diuraikan dalam poin sebelumnya, panel ini juga menekankan sejarah kereta api sebagai penunjang pergerakan ekonomi, maupun mobilitas manusia dalam berpindah satu tempat ke tempat lain. Kereta api juga tidak terlepas dari peristiwa penemuan teknologi uap saat terjadi Revolusi Industri yang disertai kebijakan politik, sosial, dan

ekonomi pada masa kolonial Belanda. Selain itu, pencetus ide penggunaan kereta api pertamakali di Indonesia yaitu Kolonel Jhr van Der Wijk pada tahun 1840 sebagai upaya mengatasi kesulitan ekonomi dan pertahanan. Diuraikan pula manfaat akses jalur kereta api sebagai moda transportasi massal dengan membuka jalur-jalur baru di kawasan pedalaman yang sulit dijangkau.



Arsitektur Stasiun Kereta Api di Bondowoso
(Sumber: www.kitlv.com)

3. Panel 3 : Berisi terkait perusahaan kereta api. Panel ini menginformasikan adanya perusahaan kereta api milik pemerintah *Staatsspoorwegen* (SS) yang dimulai dari Surabaya – Bangil – Pasuruan sepanjang 63 kilometer, dan Bangil – Lawang – Malang sepanjang 49 kilometer pada tahun 1878-1879. Selanjutnya disusul lintas jalur Sidoarjo – Kertasono – Madiun – Surakarta dan lintas Kertasono – Kediri – Tulungagung – Blitar pada tahun 1880-1884. Perkembangan pengoperasian jalur kereta api memunculkan pula perusahaan kereta api dan trem swasta di beberapa kota maupun kabupaten (*Gementee* dan *Regentschap*) di Jawa Timur, diantaranya :

- OJS (*Ooster Java Stoomtram*

- *Maatschappij*): lintas Pelabuhan Ujung-Krian-Mojokerto-Ngoro dan jaringan trem listrik di Kota Surabaya tahun 1889-1923.

- PsSM (*Pasoeroean Stoomtram Maatschappij*): Jalan rel Pelabuhan-Pasuruan-Warungdowo-Sengon tahun 1896-1912.

- PbSM (*Probolinggo Stoomtram Maatschappij*): Jalan rel lintas Probolinggo-Kraksaan-Paiton tahun 1897-1912.

- KSM (*Kediri Stoomtram Maatschappij*): Jalan rel Kediri-Jombang dan Pare tahun 1897-1899

- MSM (*Modjokerto Stoomtram Maatschappij*): Jalan rel lintas dalam kota Mojokerto-Porong-Pandaan-Bangil tahun 1898-1899.

- BDSM (*Babat-Djombang Stoomtram Maatschappij*): Jalan rel lintas Babat-Jombang tahun 1899-1902.

- MT (*Madoera Stoomtram Maatschappij*): Jalan rel lintas Kamal-Pamekasan tahun 1898-1913.

- MS (*Malang Stoomtram Maatschappij*): Jalan rel lintas Malang-Singosari-Tumpang-Gondanglegi-Dampit-Kepanjen tahun 1897-1908.

4. Panel 4 : Berisi terkait arsitektur stasiun kereta api. Panel ini menguraikan komponen ruang yang perlu dihadirkan dalam pembangunan stasiun kereta api, diantaranya halaman (berfungsi sebagai

perpindahan sistem transportasi jalan baja ke jalan raya dan biasanya sebagai tempat bongkar muat barang), bangunan stasiun (terdiri dari ruang depan, loket, fasilitas administrasi, fasilitas operator), peron (terdiri dari tempat tunggu, naik turun dari maupun menuju kereta api, bongkar muat barang, serta memiliki atap meskipun ada pula yang tidak beratap), serta emplasemen (terdiri dari sepur lurus, peron, sepur belok dan berfungsi sebagai tempat kereta api berhenti untuk memberi ruang kereta lain lewat). Selain itu, dilihat dari arsitektur bangunannya, stasiun yang dibangun tahun 1900 didominasi gaya arsitektur '*Indische Empire*' (dilengkapi pilar, segitiga gevel, teras depan) seperti yang terlihat di stasiun Pasuruan, Kediri, dan sebagainya. Hingga pada tahun 1900-an, terjadi perubahan arsitektur bangunan stasiun dengan menyesuaikan perkembangan kota kala itu. Hal ini dilihat di Stasiun Malang yang menghadap ke barat dengan menerapkan arsitektur kolonial modern yang sempat berjaya pada tahun 1915 – 1940. Cirinya terlihat dari atap yang datar berbahan cor semen serta penggunaan ornamen didominasi berbahan kaca.



Salah satu contoh Stasiun di Kabupaten Blitar setelah peristiwa Gunung Kelud Meletus (Sumber: www.kitlv.com)

- Panel 5 : Berisi sekumpulan foto stasiun masa kolonial di Jawa Timur.



Kereta Api Pengangkutan Barang Melintas di Lawang (Sumber: www.kitlv.com)

- Panel 6 : Berisi terkait jenis kereta api. Adapun jenis kereta api diuraikan sebagai berikut:

- Kereta Api Penumpang

Bagian kereta api ini dikhususkan untuk melayani manusia dengan pembagian kelas kecepatan berupa Kereta Api Ekspres, Kereta Api Cepat, dan Kereta Api penumpang biasa.

- Kereta Api Barang

Jenis kereta api ini difungsikan sebagai sarana pengangkut barang yang terbagi berdasarkan fasilitas dan kecepatannya yaitu Kereta Api Barang cepat dan Kereta Api Barang biasa.

- Kereta Api Campuran

Jenis kereta yang difungsikan sebagai pelayanan angkutan penumpang manusia dan barang sekaligus. Biasanya kereta ini memiliki kecepatan yang lebih lambat dan hanya terhubung oleh stasiun-stasiun kecil.

- Kereta Api Luar Biasa (KLB)

Jenis Kereta api ini memiliki fungsi khusus dari kereta api lainnya. Kereta api ini hanya beroperasi apabila ada permintaan khusus karena melonjaknya jumlah penumpang; seperti libur hari raya/hari besar agama, musim liburan, pengangkutan gula, dan kepentingan ekspor lainnya.



Salah satu foto jenis kereta trem listrik di Wonokromo Surabaya
(Sumber: www.kitlv.com)

7. Panel 7 : Panel ini berisi sekumpulan foto kereta api masa lalu yang digunakan baik dalam skala besar maupun kecil.



Edukasi Sejarah Kereta Api terhadap Anak Usia Dini
Sumber : BPCB Jatim, 2021

8. Panel 8 : Berisi terkait riwayat pelestarian oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur terhadap stasiun-stasiun di Jawa Timur. Adapun beberapa langkah pelestarian yang telah dilakukan, diantaranya :

- Pendataan stasiun-stasiun di Jawa Timur. Pendataan berisi deksripsi objek dan lingkungan, kondisi saat ini, luas, dimensi, dan lokasi objek. Pendataan tersebut meliputi stasiun Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Mojokerto.
- Konservasi gerbong 'maut' pada koleksi Museum Brawijaya Kota Malang. Kegiatan ini bertujuan menjaga kelestarian objek dalam menghambat proses korosi yang terjadi khususnya bagian dinding dan atap gerbong.
- Studi teknis arkeologis di Stasiun Surabaya. Kegiatan ini bertujuan mengetahui kerusakan dan kondisi bangunan serta kawasannya guna upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya.
- Studi signifikansi bangunan stasiun dan gudang kereta api jalur Bojonegoro – Surabaya Pasar Turi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasi kondisi bangunan dan kawasannya di Bojonegoro (Stasiun Kapas, Stasiun Sumber, Stasiun Bowerno) dan Lamongan (Stasiun Gembong, Stasiun Pucuk, Stasiun Sumiaran, dan Stasiun Duduk).
- Pendampingan dan fasilitasi pelestarian cagar budaya di Stasiun Mojokerto. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data kesejarahan, kondisi eksisting bangunan dan lingkungan untuk selanjutnya dianalisis guna menentukan penanganan terhadap bangunan.

E. Pelaksanaan Pameran

Pelaksanaan pameran tentu membutuhkan persiapan khusus dimulai dari penentuan



Edukasi Sejarah Kereta Api terhadap Mahasiswa dan Pelajar (Sumber : BPCB Jatim, 2021)

pemandu yang mampu menguasai konsep dan penyajian informasi pameran, persiapan sarana dan prasarana, serta koordinasi terhadap PT. Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya. Hal terpenting dalam pelaksanaan pameran selain pemegang teknis kegiatan, juga diperhatikan lokasi yang strategis agar pengunjung mudah mengakses jalannya pameran. Adapun sasaran utama dalam kegiatan pameran yakni para pengunjung yang hendak menunggu jadwal keberangkatan. Selain itu, pameran juga tetap terbuka untuk umum seperti para akademisi, pelajar, komunitas, wartawan, dan sebagainya.

Secara teknis, pemandu mengarahkan pengunjung mengikuti alur pameran yang dimana dimulai dari pintu masuk, mengisi buku pengunjung, menerima kertas informasi cagar budaya disertai cinderamata berupa *totebag*. Setelah bagian administrasi selesai, pengunjung diarahkan ke bagian panel informasi terkait

sejarah dan perjalanan kereta api di Jawa Timur, lalu memasuki panel informasi terkait Cagar Budaya peringkat Nasional di Jawa Timur (bertujuan memperkenalkan pengunjung berbagai cagar budaya peringkat Nasional), serta beragam koleksi penunjang yang dirangkum berdasarkan pembabakan masa (prasejarah – kolonial). Adapun hal terpenting dalam kegiatan pameran yakni melakukan diskusi maupun tanya jawab antar pemandu dan pengunjung.

Penutup

Pameran cagar budaya terkait transportasi di masa lalu dalam hal ini kereta api, mengingatkan kita pentingnya transportasi sebagai sarana pergerakan kemajuan perekonomian awal di Nusantara serta mempengaruhi laju mobilitas penduduk dari wilayah satu ke wilayah lain. Peran kereta api sangat bermanfaat bahkan masih dirasakan hingga saat ini. Tentu saja, transportasi ini menjadi pilihan semua kalangan baik anak-anak hingga dewasa.

Hadirnya pameran cagar budaya terkait kereta api diharapkan mampu memberikan kesadaran terhadap para pengguna kereta api akan pentingnya perjalanan sejarah yang cukup panjang yang telah dilalui hingga kita bisa menikmati kereta api saat ini. Nilai penting yang terkandung dalam kereta api baik secara material maupun kesejarahannya, diharapkan menyadarkan masyarakat dalam upaya pelestarian transportasi kereta api agar kelak apa yang dihasilkan dari masa lalu, dapat dimanfaatkan, disaksikan di masa kini hingga masa yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

- Terima kasih kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan ruang publikasi dalam memberikan informasi terkait kereta api di Jawa Timur agar hadirnya kereta api di Sulawesi juga perlu direfleksikan kembali peranannya.
- Terima kasih kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur yang melibatkan penulis dalam kegiatan pameran dan memberikan data untuk dipublikasikan.
- Terima kasih kepada tim pameran cagar budaya baik koordinator pameran, pengarah pameran, teknisi dan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Salam

DAFTAR PUSTAKA

Handinoto. 1999. ***Perletakan Stasiun Kereta Api dalam Tata Ruang Kota-Kota di Jawa (Khususnya Jawa Timur) pada Masa Kolonial***. Dimensi Teknik Arsitektur Vol.27 No.2, Hal 48-56. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan : Universitas Kristen Petra.

Raap, Olivier Johannes. 2017. ***Sepoer Oeap di Djawa Tempo Doeloe***. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), PT Grafika Mardi Yuana: Bogor.

Subarkah, Imam. 1981. ***Jalan Kereta Api***. Bandung : Idea Dharma.

Tim Telaga Bakti Nusantara. 1997. ***Sejarah Perkeretaapian Indonesia Jilid I***. APKA (Asosiasi Perkeretaapian Indonesia), CV.Angkasa: Bandung.

Von Faber, G.H. 1933. ***Nieuw Soerabaia : de Geschiedenis van Indies Eerste Kopstad in de Eerste Tewarteeuw sedert hare Instelling 1906-1931***. Soerabaia.

Yoga Bagus, dkk. 2017. ***Kereta Api di Indonesia, Sejarah Lokomotif Uap***. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), ISBN : 978-602-0818-55-9. Jogja Bangkit Publisher : Yogyakarta.

Arsip :

Staatsblaad Van Nederlandsch Indie No.97 tahun 1878 Staatsblaad Van Nederlandsch Indie No.201 tahun 1878 Staatsblaad Van Nederlandsch Indie No.315 tahun 1905 Memori Van Overgave Residentie Bojonegoro 1921-1930 (Jakarta ANRI, 1978).

Internet :

www.kitlv.com, diakses tanggal 28 Maret 2022 pukul 18:31 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Carel_Herman_Aart_van_der_Wijck, diakses tanggal 28 Maret 2022 pukul 22:49 WIB



Kampung Budaya di Jawa Timur: Permainan, Bangunan, dan Kesenian

Abstrak

Keberagaman kearifan lokal yang dimiliki Indonesia saat ini (mulai dari kesenian, bangunan, dan permainan) kurang diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga dan melestarikannya. Permainan anak-anak mulai beralih dari permainan tradisional puluhan tahun yang lalu menuju permainan berbasis digital yang cukup dilakukan dengan gesekan jari. Senada dengan nasib permainan tradisional, nasib kesenian tradisional juga tampak 'kalah bersaing' dengan budaya populer. Remaja-remaja masa kini lebih gemar mengoleksi *merchandise* yang bergambar wajah artis-artis luar negeri daripada mengagumi kain-kain batik Nusantara yang tidak kalah estetik. Begitu pula nasib bangunan-bangunan cagar budaya yang dibiarkan tak terurus begitu saja. Di tengah fakta 'kurang menyenangkan' tersebut, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap berusaha menjaga kearifan lokal masing-masing daerah, bahkan mengembangkannya ke skala yang lebih luas. Hal yang membanggakan ini terjadi di Kampong Dolanan Surabaya, Kampong Heritage Kajoetangan Malang, dan Kampung Budaya Polowijen Malang.

Akhmad Idris

Akhmadiris9@gmail.com

Kata Kunci: Kampung Budaya, Permainan Tradisional, Kesenian, & Bangunan Cagar Budaya

1. Pendahuluan

Sebutan Indonesia sebagai negeri yang kaya dengan budaya bukanlah isapan jempol semata. Alfyy Rev lewat video yang diberi tajuk *Wonderland Indonesia* telah berhasil membuktikan pernyataan tersebut. Video yang sukses merajai daftar video *trending* di Youtube tersebut menampilkan kekayaan khas Nusantara yang meliputi situs cagar budaya seperti Pura Ulun Danu Beratan Bedugul dan Candi Borobudur, lagu-lagu daerah seperti Sajojo dan Anak Kambing Saya, tari-tari daerah seperti Tari Janger dan Tari Piring, hingga rumah-rumah adat khas Nusantara seperti Rumah Panggung dan Rumah Joglo. Atas dasar kekayaan inilah, Alfyy Rev tak lagi menyebut Indonesia sebagai negeri yang indah (*wonderful*), tetapi lebih dari itu. Indonesia adalah negeri ajaib (*wonderland*).

Sajian *Wonderland Indonesia* oleh Alffy Rev berbanding lurus dengan data statistik tentang kebudayaan Indonesia pada tahun 2019 yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Sofiah, 2019) mengungkapkan bahwa jumlah bangunan cagar budaya (*cultural heritage*) yang ada di seluruh penjuru Nusantara berjumlah 2.319 bangunan, sedangkan warisan budaya tak benda berjumlah 819 item yang terdiri atas 102 tradisi & ekspresi lisan; 271 seni pertunjukan; 209 adat istiadat; 196 kerajinan tradisional; dan 41 kebiasaan tingkah laku terhadap alam semesta. Kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia ini dilatarbelakangi oleh keberagaman suku yang tersebar pada berbagai provinsi. Saking kayanya, satu provinsi bisa memiliki beragam budaya. Sebut saja seperti provinsi Jawa Timur yang memiliki beragam kesenian dari kota-kota di dalamnya. Ada kesenian reog di kota Ponorogo dan juga ada kesenian topeng di kota Malang.

Selain kesenian, hal lain yang menjadi identitas sebuah kota adalah keberadaan bangunan-bangunan di dalamnya. Beberapa kota di Indonesia cukup mudah dikenali dengan bangunan ikoniknya. Ketika melihat monumen Tugu Pahlawan, maka dengan mudah akan dikenali bahwa tempat yang dikunjungi saat itu adalah kota Surabaya. Lalu berpindah di tempat lain melihat gedung bersejarah Lawang Sewu, maka dengan mudah akan ditebak bahwa tempat yang dikunjungi selanjutnya adalah kota Semarang. Kemudian berpindah lagi ke tempat peribadatan lawas Gereja Katolik Hati Kudus atau biasa disebut dengan Gereja Kayutangan, maka dengan mudah akan diketahui bahwa tempat yang dikunjungi setelahnya adalah kota Malang. Oleh sebab itu, bangunan menjadi representasi dari identitas sebuah kota.

Budaya khas Nusantara lainnya yang tak kalah mengagumkan adalah permainan tradisional.

(Danandjaja, 1991) mengartikan permainan tradisional sebagai satu di antara permainan anak-anak yang bersifat tradisional dan diwarisi secara turun temurun dengan berbagai bentuk variasi. Satu di antara ciri permainan tradisional khas Nusantara adalah peraturannya yang sederhana atau bahasa mudahnya tidak memperumit para pemainnya. Misalnya saja permainan *petak umpet* yang cukup dimainkan dengan menggunakan tangan kosong. Satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sedangkan pemain yang tersisa sibuk mencari tempat persembunyian yang paling aman ketika si penjaga menutup mata sambil menghitung mundur berdasarkan durasi yang telah disepakati.

Contoh lainnya adalah permainan *gobak sodor* dan *benteng-bentengan*. Dua permainan ini juga sudah bisa dimainkan dengan tangan kosong, sebab cara memainkannya cukup dengan saling bekerja sama menjaga wilayah pertahanan masing-masing dari 'serangan' musuh. Kelebihan permainan tradisional tidak hanya dari cara memainkannya yang sederhana, permainan tradisional juga dapat dimainkan dengan gratis——tanpa perlu khawatir kehabisan kuota. Ditambah lagi, permainan tradisional dapat membantu perkembangan karakter anak yang berhubungan dengan kepekaan; kekompakan; dan kepedulian. Kabar baiknya, sifat-sifat seperti inilah yang perlahan mulai hilang dari generasi-generasi milenial yang lebih memprioritaskan unggahan di media sosial, sehingga menjaga kelestarian permainan tradisional sama saja dengan menjaga karakter-karakter baik untuk generasi muda.

Keberagaman kearifan lokal yang dimiliki Indonesia saat ini (mulai dari kesenian, bangunan, dan permainan) *sayangnya* kurang diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga dan melestarikannya. Permainan anak-anak

mulai beralih dari permainan tradisional puluhan tahun yang lalu menuju permainan berbasis digital yang cukup dilakukan dengan gesekan jari. Hal ini dapat diamati dari tempat tongkrongan generasi muda milenial yang dihuni oleh segerombolan remaja tanpa komunikasi karena lebih sibuk menonton layar telepon genggamnya sendiri-sendiri. Ada yang bermain *game online* berbasis petualangan, teka-teki, pertarungan, hingga strategi. Jarang ditemui generasi muda kekinian yang sibuk membawa *dakon*, bola bekel, kelereng, maupun rangkaian karet gelang untuk permainan lompat tali.

Senada dengan nasib permainan tradisional, nasib kesenian tradisional juga tampak 'kalah bersaing' dengan budaya populer. Remaja-remaja masa kini lebih gemar mengoleksi *merchandise* yang bergambar wajah artis-artis luar negeri daripada mengagumi kain-kain batik Nusantara yang tidak kalah estetis. Para generasi milenial lebih berbahagia kala nongkrong di tempat makan——dengan lebih sibuk memotret segala sudut daripada menikmati makanannya——dari pada duduk tafakur mengamati proses pembuatan kesenian topeng khas Nusantara. Mau diakui atau tidak, punahnya kesenian tradisional bukan karena sudah waktunya, tetapi karena para penjaganya sudah kebingungan mencari sosok yang bersedia menerima tongkat estafet untuk meneruskannya. Begitu pula nasib bangunan-bangunan cagar budaya yang dibiarkan tak terurus begitu saja. Karena kesadaran yang minim tentang nilai historis di dalamnya, sebagian besar masyarakat memilih abai dan tak peduli dengan bangunan-bangunan cagar budaya di sekitarnya. Berkali-kali terjadi pencurian arca di berbagai situs yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara menjadi bukti keabaian masyarakat terhadap keberadaan cagar budaya. *Bahkan* berdasarkan

laporan Kompas.com, dari sekitar 7.400 cagar budaya di Indonesia yang berhasil didata, hanya sekitar 1.600 yang telah dijaga dengan baik. Sementara 5.800 cagar budaya yang tersisa masih kurang terawat karena pemerintah terkendala biaya perawatan.

Di tengah fakta 'kurang menyenangkan' tersebut, ternyata masih ada beberapa orang (baik generasi muda maupun tua) yang tetap berusaha menjaga kearifan lokal masing-masing daerah, bahkan mengembangkannya ke skala yang lebih luas. Hal yang membanggakan ini terjadi di Kampoeng Dolanan Surabaya, Kampoeng Heritage Kajoetangan Malang, dan Kampung Budaya Polowijen Malang. Tiga kampung tersebut memiliki objek konservasi yang berbeda-beda. Kampoeng Dolanan melestarikan permainan-permainan tradisional, lalu Kampoeng Heritage Kajoetangan mengelolah bangunan-bangunan bersejarah tempo dulu yang berlokasi di wilayah Kayutangan, dan Kampung Budaya Polowijen menjaga kesenian khas Malang dan situs Ken Dedes.

Semula konsep konservasi hanya terbatas pada upaya melestarikan benda-benda bersejarah, namun konsep tersebut kini telah mengalami perluasan makna. Konservasi tak lagi terbatas hanya pada benda-benda bersejarah; monumen; maupun bangunan, tetapi juga pada lingkungan yang memiliki nilai sejarah beserta kelangkaan sebagai dasar upaya konservasi. Berbanding lurus dengan pernyataan yang terdapat dalam piagam *Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance* atau yang biasa disebut dengan istilah Piagam Burra Charter, bahwa konservasi merupakan proses pengelolaan suatu tempat atau objek dengan tujuan memelihara makna kultural yang terkandung di dalamnya dengan baik.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat (Budiharjo, 1997) yang menyebutkan bahwa konservasi adalah upaya untuk melestarikan lingkungan maupun bangunan serta mengatur arah perkembangannya berdasarkan kebutuhan saat ini dan masa depan, sehingga makna kulturalnya tetap dapat terpelihara. Lebih lanjut, (Danisworo, M. dan Martokusumo, 2002) merinci objek yang dapat dilakukan konservasi meliputi kawasan, lahan, gedung, maupun kelompok gedung termasuk lingkungannya. Objek-objek tersebut pada dasarnya harus menampilkan makna dari sisi budaya, tradisi, sejarah, sosial, estetika, maupun fungsional.

2. Isi

2.1. Kampoeng Dolanan Surabaya

Dilansir dari *website* resmi Kampoeng Dolanan, kali pertama gagasan tentang kampung tematik yang berbasis permainan tradisional muncul adalah tanggal 13 Desember 2016. Gagasan ini dicetuskan oleh kepengurusan Karang Taruna yang baru di Kampung Kenjeran Gang IV-C RT 04 RW 02, Simokerto, Surabaya. Gagasan inovatif ini muncul tidak berarti tanpa hambatan, sebab ada rasa pesimis dari para Karang Taruna bahwa gagasan tersebut akan terwujud. Untuk menanggulangi ketakutan itu, dilakukan pencarian relawan yang bersedia membantu mewujudkan ide menjaga kelestarian permainan tradisional di era digital.



Foto 1.
Kampoeng Dolanan.
Sumber:
Kampoeng Dolanan

Relawan-relawan yang terkumpul akan menjadi *partner* dalam mendidik Karang Taruna sekaligus memperkenalkan permainan tradisional di luar Kampung Kenjeran (Kampoeng Dolanan). Akhirnya, pada tahun 2017 diperoleh lebih dari 100 relawan yang mendaftar dan dikenal dengan nama Relawan KD *Batch 1* sekaligus menjadi cikal bakal Kampoeng Dolanan berani menunjukkan dirinya di 'luar kandang', baik dalam kancah lokal; nasional; hingga internasional. Lambat laun, Kampoeng Dolanan kian berkembang dan memiliki banyak program, mulai dari bidang pendidikan; seni; budaya; ekonomi; jurnalistik; hingga *sociopreneur*.

2.1.1 Menjaga Permainan Tradisional

Masalah utama yang disorot oleh Karang Taruna Kampoeng Dolanan adalah 'ruang sepi' dari anak-anak yang bermain permainan tradisional, sebab 'ruang ramai' yang sedang digemari anak-anak adalah permainan berbasis digital dan virtual. Satu hal penting yang perlu diketahui, yakni misi dari pembentukan Kampoeng Dolanan tidak semata-mata tentang permainan saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, pesan filosofis dari tujuh lubang dan biji-biji dalam permainan tradisional dakon. Konsep ini merupakan simbol jatah makan dalam seminggu. Artinya, setiap lubang yang diisi dengan biji-biji akan berpengaruh terhadap isian pada lubang selanjutnya. Jika pengisian biji tidak diperhitungkan dengan bijaksana, maka dapat dipastikan lubang yang selanjutnya tidak akan mendapatkan jatah. Kurang lebih seperti itulah pesan filosofis yang terkandung dalam permainan dakon.



Gambar 2.
Kampoeng Dolanan di CFD.
Sumber: Kampoeng Dolanan

Untuk menjaga kelestarian permainan tradisional sekaligus pesan-pesan filosofis di dalamnya, para Karang Taruna Kampoeng Dolanan melakukan sosialisasi permainan tradisional kepada khalayak ramai, terlebih kepada anak-anak. Untuk selanjutnya, kegiatan sosialisasi ini diberi nama Kampoeng Dolanan Roadshow atau KD Roadshow. Disebutkan di dalam *website* resminya bahwa kegiatan pertama yang dilakukan oleh Kampoeng Dolanan dalam menyosialisasikan permainan tradisional adalah menampilkan permainan tradisional saat kegiatan *Car Free Day* setiap Minggu pagi di Jalan Tunjungan Surabaya. Berulang kali sosialisasi itu dilakukan dan berulang kali pula para relawan Kampoeng Dolanan diusir oleh petugas. Beruntungnya, para pengunjung yang merasakan dampak positif dari permainan tradisional tersebut turut melakukan pembelaan dari usiran petugas.

Tekad yang kuat membuat para relawan Kampoeng Dolanan tetap bertahan menyosialisasikan permainan tradisional. Jika ditotal, para relawan telah diusir sebanyak lima kali dan pengusiran itu tidak menyurutkan semangat mereka. Akhirnya, Kampoeng Dolanan diberikan keleluasaan untuk

melakukan sosialisasi di setiap agenda *Car Free Day*. Selain melakukan sosialisasi saat *Car Free Day* di Jalan Tunjungan, program Kampoeng Dolanan Roadshow juga dilaksanakan di kampung-kampung lain (di luar Kampung Kenjeran) atau biasa dinamai dengan istilah *sambang kampung* (mengunjungi kampung). Sementara sosialisasi saat *Car Free Day* dapat dikategorikan ke dalam *sambang dalam* (mengunjungi jalan) karena 'mengampanyekan' permainan tradisional di Jalan Tunjungan dan juga dapat dikategorikan ke dalam *sambang event* (mengunjungi kegiatan) karena mempromosikan permainan tradisional dalam acara *Car Free Day*.



Gambar 3.
Sambang Sekolah.
Sumber: Kampoeng Dolanan

Dua kategori yang tersisa adalah *sambang sekolah* (mengunjungi sekolah) dan *sambang komunitas* (berkolaborasi dengan komunitas lain). Menyosialisasikan permainan tradisional dalam lingkungan pendidikan menjadi hal yang *urgent* untuk dilakukan dalam menjauhkan anak-anak dari kecanduan telepon genggam. Di jam istirahat, para siswa sebaiknya saling bersosialisasi dengan teman-temannya lewat melakukan permainan tradisional daripada

sibuk menatap *game-game* di layar telepon pintar.

Di bidang ekonomi (program bisnis Kampoeng Dolanan), program kegiatan yang diadakan adalah *outbond wodowo* dan pendirian *dolip store*. Program *outbond wodowo* yang bekerja sama dengan *omah Padma* ini merupakan tempat *outbond* yang memberikan suasana baru untuk dunia pendidikan dan kesenian. Tempat yang berlokasi di dusun Semambung, Capang, Purwodadi, Pasuruan menawarkan kegiatan *outbond* yang memanfaatkan permainan tradisional di setiap posnya dalam agenda *jelajah desa*. Pada setiap pos, para peserta *outbond* harus menuntaskan satu jenis permainan tradisional untuk bisa melanjutkan 'jelajah' ke pos selanjutnya. Beberapa permainan tradisional yang ditawarkan adalah gobak sodor, tarik tambang, benteng-bentengan, hingga egrang bambu.

Jika *outbond wodowo* dibuat untuk program jelajah desa, maka berbeda dengan *dolip store* yang didirikan untuk menjual produk-produk permainan tradisional sekaligus untuk membantu masalah finansial komunitas Kampoeng Dolanan. Permainan tradisional yang dijual oleh *dolip store* tidak sekedar permainan tradisional yang 'apa adanya', tetapi permainan tradisional yang telah didaur ulang dan dihias kembali dengan semenarik-menariknya. *Dolip store* telah memiliki banyak *supplier* di beberapa kota seperti Jepara, Jombang, Cibubur, Sidoarjo, dan Surabaya. Kreativitas dalam menghias produk permainan tradisional inilah yang menjadi daya tarik untuk meningkatkan nilai jual produk-produk *dolip store* di masyarakat, khususnya anak-anak.

2.2. Kampung Budaya Polowijen Malang

Dari Kota Pahlawan beralih ke Kota Pendidikan di Jawa Timur, yakni kota Malang. Tepat di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang terdapat sebuah kampung tematik di pinggir sungai yang mengusung konsep kesenian lokal malang. Kampung tersebut bernama Kampung Budaya Polowijen. Ketika melewati gerbang pintu masuk, di dinding sebelah kiri terdapat dokumentasi peresmian Kampung Budaya Polowijen oleh wali kota Malang saat itu, Ir. H. Mochamad Anton pada tanggal 2 April 2017. Kampung ini digagas oleh satu di antara penduduk yang bernama Isa Wahyudi, namun kerap disapa oleh masyarakat sekitar dengan panggilan Ki Demang.



Gambar 4.
Kampung Budaya Polowijen.
Sumber: Dokumen Pribadi

Nuansa yang terlihat dari Kampung Budaya Polowijen adalah suasana tempo dulu dari ornamen bangunan rumah dan pemandangan area persawahan di sisi utara. Sekitar belasan rumah yang ada di Kampung Budaya Polowijen secara sengaja diberi ornamen dari bambu untuk menarik minat pengunjung sekaligus menambah kesan kearifan lokal. Tak hanya ornamen rumah, masyarakat Polowijen juga mendirikan panggung bambu, rumah bambu, dan gazebo untuk memperkuat kesan *jadul*

tersebut. Menurut Ki Demang, semua sarana dan prasarana yang dibangun merupakan berorientasi pada kegiatan budaya dan seni. Semua masyarakat sama-sama menyadari bahwa semua ini dilakukan untuk tetap menjaga dan melestarikan warisan leluhur.

2.2.1 Kesenian Khas Malang

Budaya lokal Malang yang sedang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Kampung Budaya Polowijen adalah kerajinan dan tari topeng khas Malangan yang terancam 'terpinggirkan' sebab kedatangan kecanggihan teknologi yang kerap kali disambut dengan kurang bijaksana oleh para generasi muda. Satu di antara cara yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk melestarikan budaya lokal tersebut adalah mengadakan pelatihan rutin pembuatan topeng khas Malangan, pelatihan menari topeng khas Malangan, mendirikan pasar topeng (yang dimungkinkan menjadi satu-satunya di dunia), dan mengadakan festival-festival budaya yang berskala lokal maupun nasional.



Gambar 5.
Ornamen Bambu.
Sumber: Dokumen Pribadi

Kesenian topeng khas Malangan sebagai budaya khas kota Malang sudah ditunjukkan sejak awal lewat tempelan berbagai jenis

topeng di dinding ornamen bambu dekat gerbang masuk. Topeng-topeng tersebut dapat dipelajari cara pembuatannya dan juga dapat dimiliki dengan cara membelinya. Dengan topeng-topeng ini pula, para penari menampilkan gerakan-gerakan ritmis dan estetis lewat pertunjukan seni tari topeng khas Malangan. selain kesenian topeng khas Malangan, budaya lokal yang sedang dilestarikan di Kampung Budaya Polowijen adalah Tembang Macapat dan Batik Ken Dedes.

2.2.2 Situs Cagar Budaya Ken Dedes

Selain melestarikan kesenian khas Malangan, Kampung Budaya Polowijen juga menjaga benda-benda bersejarah sebagai situs cagar budaya yang berupa Sumur Windu Ken Dedes, Situs Watu Kenong, Makam Mbah Reni, dan Situs Joko Lolo. Situs Ken Dedes diberi nama 'Sumur Windu' oleh masyarakat Polowijen disebabkan anggapan tentang kedalaman sumur yang tak berujung. Situs Ken Dedes dikategorikan ke dalam situs hunian keagamaan. Oleh sebab itu, banyak ditemui dupa di area sekitar situs dan beberapa orang yang melakukan pertapaan hingga menginap beberapa malam di area situs.



Gambar 6.
Situs Watu Kenong.
Sumber: Dokumen Pribadi

Tak jauh dari situs Sumur Windu, terdapat situs Watu Kenong yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai ubahan dari seperangkat gamelan miliki pengiring pengantin putri “Dedes”. Watu Kenong sebenarnya merupakan umpak dari pendapa atau bangunan rumah. Di kompleks area situs Ken Dedes juga terdapat situs Joko Lolo yang berupa pohon beringin besar yang berada di tengah pemakaman. Punden Joko Lolo sendiri dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat persemayaman Joko Lolo kala berada di Polowijen. Situs penting lainnya yang berada di Kampung Budaya Polowijen adalah makam Mbah Reni. Nama aslinya adalah Tjondro Suwono. ia merupakan sungging dan guru tari di Desa Polowijen.

Menurut papan informasi yang ditempelkan di dinding ornamen bambu, Mbah Reni merupakan keturunan dari Sunan Bonang. Pada tahun 2011, makam Mbah Reni dipugar untuk mengenang jasanya sebagai orang pertama yang membuat topeng di Pulau Jawa. Dengan kandungan nilai sejarah dan budaya dalam situs dan keseniannya, Kampung Budaya Polowijen menjadi bukti nyata kekayaan Nusantara yang perlu dijaga kelestariannya agar generasi-generasi muda selanjutnya tetap bisa merasakannya.

2.3. Kampung Kayutangan Heritage

Sejarah memang tidak bisa diulang, tetapi kisah masa lampau tersebut masih bisa dikenang dan dibayangkan lewat bangunan-bangunan lawasnya. Jika Polowijen dikenal sebagai kampung budaya di Malang, maka tempat di Malang yang dikenal dengan bangunan-bangunan lawasnya adalah wilayah Kayutangan. Saking bersejarahnya, Kampung Kayutangan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai kawasan warisan budaya (*heritage*) sejak tanggal 22 April 2018. Kampung ini berlokasi di Jalan Basuki Rachmat Gang VI, Kauman, Klojen, Malang.



Gambar 7.
Kampung Kayutangan.
Sumber: Dokumen Pribadi

(Khakim, M.N.L., 2019) menyebut Kampung Kayutangan sebagai kampung yang dapat menawarkan wisata budaya dengan muatan edukasi sejarah lewat sajian arsitektur bangunan peninggalan Belanda. Kini, Kampong Heritage Kajoetangan telah tertata rapi dengan konsep tempo dulu. Ada denah dan papan petunjuk saat memasuki area perkampungan ini. Bukti bahwa meskipun berbasis kampung wisata, Kayutangan tetap ingin menawarkan edukasi sejarah tentang nama-nama dan lokasi bangunan lawas di dalamnya.

2.3.1 Bangunan Lawas & Minuman Khas

Pada tahun 1914, pusat kota Malang terletak di kawasan Kayutangan hingga alun-alun kota Malang. Oleh sebab itu, kawasan ini menjadi kawasan yang bersejarah pada masa kolonial Belanda gegara statusnya sebagai pusat kota. Jejak sejarah itu masih dapat dilihat lewat

keberadaan bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda yang tidak kehilangan bentuk aslinya seperti Gereja Katolik Hati Kudus Yesus dan bangunan rumah tinggal seperti rumah-rumah di Kampung Kayutangan. Selain bangunan, sisa-sisa peradaban masa lampau juga ditunjukkan oleh barang-barang kuno yang 'dipamerkan' di lorong gang seperti lampu; sepeda ontel; radio, teko, dan beberapa perabotan rumah tangga.



Gambar 8.
Gadis Tersesat di Kayutangan.
Sumber: Dokumen Pribadi

Di kompleks *Destinasi Taloen Shoot*, beberapa bangunan lawas ikonik yang dapat dinikmati adalah Aeo Galeri Omah Lor, Rumah Jamu, Rumah Habib, Galeri Pak Eko, Cangkruk, Rumah Pak Udin, Rumah Punden, Gubuk Ningrat, Rumah Jacobeb, dan Nyak Abbas Acoeb. Sebelum memandangi rumah-rumah lawas tersebut, tak jauh dari gerbang pintu masuk terdapat minuman legendaris khas Malang (sudah ada sejak tahun 1950) yang bernama Es

Taloen. Menelusuri setiap sudut gang di Kampung Kayutangan seolah memasuki zaman-zaman penjajahan Belanda karena arsitektur khas bangunan di samping kanan & kiri. Seperti bangunan Rumah Jacobeb yang telah dibangun sejak tahun 1920. Jika dilihat dari atas, bangunan Rumah Jacobeb berbentuk segitiga. Sejak awal pembangunan, bangunan Rumah Jacobeb tetap mempertahankan bentuk aslinya, bahkan *buk* yang ada di depan rumah.



Gambar 9.
Rumah Jacobeb.
Sumber: Dokumen Pribadi

Bangunan ikonik lainnya adalah Gubuk Ningrat dan Rumah Jamu. Gubuk Ningrat dibangun pada tahun 1940-an, jauh lebih dulu pembangunan Rumah Jacobeb. Penamaan Gubuk Ningrat didasari atas bentuk rumah yang tampak mentereng dibandingkan yang lain. 'Kemewahan' itu dapat dilihat dari ornamen batu pada bagian bawah beserta satu-satunya kaca jendela jenis es di wilayah RT 10 Kampung Kayutangan. Semasa dengan Gubuk Ningrat,

Rumah Jamu juga dibangun pada tahun 1940-an. Awalnya Rumah Jamu digunakan untuk tempat pengobatan tradisional khas Tiongkok (pengobatan Sinshe), namun kini digunakan untuk berjualan berbagai jenis jamu seduh. Atas dasar inilah, rumah lawas tersebut disebut dengan nama Rumah Jamu.

3. Penutup

Akhir kata, kampung-kampung budaya di Jawa Timur memiliki peran penting dalam menjaga sekaligus melestarikan budaya lokal khas Nusantara di masing-masing kota. Kampoeng

Dolanan Surabaya menjaga eksistensi permainan tradisional, lalu Kampung Budaya Polowijen Malang melestarikan kesenian topeng khas Malangan, dan Kampung Kayutangan Malang merawat bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda. Setiap kampung memiliki cara yang berbeda-beda untuk melakukan konservasi. Kampoeng Dolanan Surabaya lebih memfokuskan pada kegiatan *roadshow*, kemudian Kampung Budaya Polowijen lebih memanfaatkan festival budaya serta pelatihan, dan Kampung Kayutangan lebih memaksimalkan potensi wisatanya.

Daftar Pustaka

- Budiharjo, E. & S. (1997). *Arsitektur Pembangunan dan Konservasi*. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Djambatan.
- Danandjaja, J. (1991). *Folklore Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng Dan Lain-Lain*. PT. Grafiti.
- Danisworo, M. dan Martokusumo, W. (2002). *Revitalisasi Kawasan Kota: Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota*. URDI, 13.
- Khakim, M.N.L., dkk. (2019). Urgensi Pengelolaan Pariwisata Kampung Heritage Kajoetangan Malang. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 4(1).
- Sofiah, S. (2019). *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*. Penerbit Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan

Salam Budaya!

Selamat datang, terima kasih atas kunjungan Anda di layanan PPID Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan. Laman ini merupakan sarana informasi secara daring sebagai wujud dalam memenuhi keterbukaan dan hak informasi publik di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Klik di [sini](#) untuk memperoleh berbagai informasi terkait, Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, khususnya di lingkungan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan.



B u l e t i n

S O M B A L O P U

